

RELASI PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN MASYARAKAT

(Studi di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan

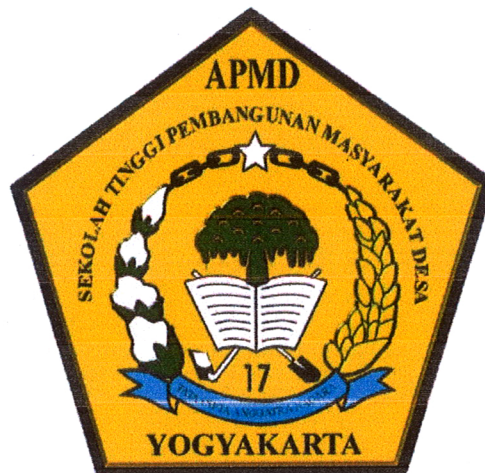
Kabupaten Bantul)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh:

RIFA HUSNIYA

21520121

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025



RELASI PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN MASYARAKAT

(Studi di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan

Kabupaten Bantul)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh:

RIFA HUSNIYA

21520121

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA



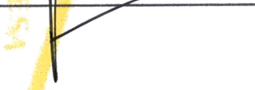
2025

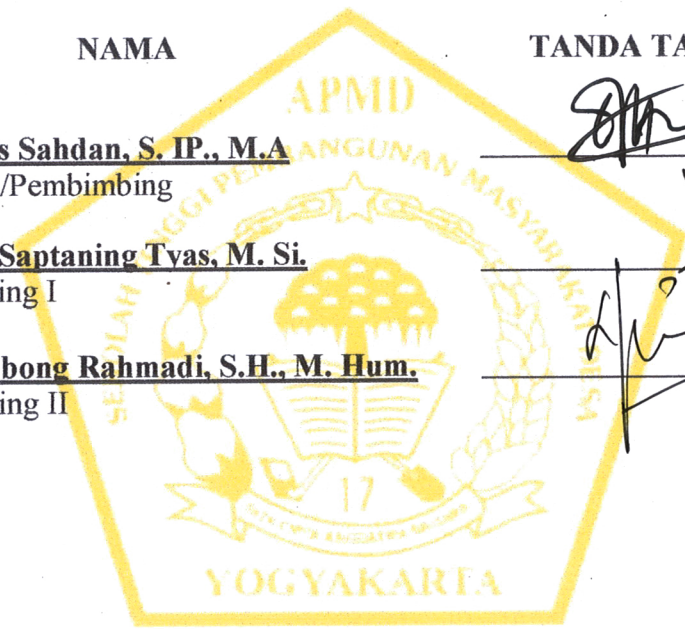
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Mei 2025
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

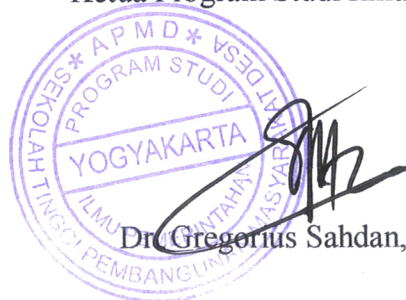
TIM PENGUJI

	NAMA	TANDA TANGAN
1.	<u>Dr. Gregorius Sahdan, S. IP., M.A</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2.	<u>Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M. Si.</u> Penguji Samping I	
3.	<u>Dr. RY. Gembong Rahmadi, S.H., M. Hum.</u> Penguji Samping II	



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP.,M.A

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifa Husniya
NIM : 21520121
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Relasi Pemerintah Kalurahan Dengan Masyarakat (Studi Di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul)”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Rifa Husniya
21520121

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Rifa Husniya
NIM : 21520121
Telp : 089636877567
Email : rifaahusniyaa@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ Relasi Pemerintah Kalurahan Dengan Masyarakat (Studi Di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul) ”

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 15 Mei 2025
Yang membuat pernyataan

The image shows a yellow rectangular official stamp with a red border. Inside the stamp, there is a red circular emblem with a bird (Garuda) in the center. Below the emblem, the text "METERA TEMPEL" is printed in red. At the bottom of the stamp, the alphanumeric code "EHC01AMX234279234" is visible. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

Rifa Husniya
21520121

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

“Jangan pernah menyesali suatu perjuangan”

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”

(Helen Keller)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang akan bertepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa , akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih yang selama ini telah memberikan dukungan, motivasi, serta memberikan kekuatan sehingga saya bisa dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan terima kasih saya kepada:

1. Dengan segala kerendahan hati, ucapan syukur saya kepada Allah SWT. karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasaalam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta saya Bapak Hari Ambaryanto dan Ibu Mujiyati, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya dan keberhasilan dalam penulisan skripsi ini, ucapan terimakasih saya tak akan pernah cukup untuk membalas segala kebaikan kalian.
3. Terimakasih saya untuk nenek Bingah (Almh) dan Ratinah yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa untuk saya sebagai salah satu cucu dari mereka.
4. Terimakasih juga untuk kakak perempuan saya Alfi Riski Ambar Wulansari dan adik perempuan saya Shabrina Akmalunnisa, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, keceriaan serta do'a yang kalian panjatkan untuk keberhasilan ini, cinta dan kasih sayang kalian telah memberikan saya semangat yang menggebu, terima kasih dan sayangku untuk kalian.
5. Terimakasih juga untuk dosen pembimbing saya Dr. Gregorius Sahdan, S.IP.,M.A yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya serta memberikan bimbingan dan pelajaran agar saya tetap semangat serta menjadi lebih baik dalam penulisan skripsi saya. Terimakasih selalu tulus membantu dalam penulisan skripsi saya dan semoga menjadi ilmu yang sangat bermanfaat.

6. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan saya ilmu dan pendidikan akademik selama saya menempuh studi di kampus Desa yang Luar bisa ini yang penuh dengan kesabaran dan ketekunan.
7. Terimakasih saya ucapkan kepada sahabat saya dibangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam masa masa kuliah yaitu Maria Andriana Peria Doni Nimunuho, terimakasih sudah menjadi teman, sahabat, dan saudara yang selalu menguatkan penulis. Mengambil banyak peran penting dibalik layar, kebersamai dalam perjuangan dan tidak pernah mengeluh ketika direpotkan. Semoga kita sama sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.
8. Terimakasih juga untuk seluruh teman-teman saya yang tidak bisa seluruhnya saya tuliskan satu per satu, yang selalu ada untuk saya disaat suka maupun duka yang sudah kita lalui bersama-sama, dan semangat dari kalian sangat berharga bagi saya.
9. Kepada seseorang yang selalu memberikan nasehat kepada penulis, Herdin Laia. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan pundaknya sebagai ruang bagi penulis untuk bercerita. Ternyata hadirnya anda dalam kehidupan ini cukup memberikan motivasi dan dukungan bagi penulis untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan dan rasa sabar. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ RELASI PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN MASYARAKAT (Studi di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul “ ini tepat pada waktunya. Skripsi ini adalah salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, keterbatasan, baik itu dalam pengalaman dan ilmu pengetahuan serta wawasan dalam berfikir dan menulis. Maka dari itu, apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dimohon untuk kritik dan sarannya. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP.,M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta serta selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra., Safitri Endah Winarti, M.Si. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M. Si. selaku penguji samping I (satu) yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. RY. Gembong Rahmadi, S.H., M. Hum. selaku penguji samping II (dua) yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak/Ibu dosen, serta segenap karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMMD “APMD” Yogyakarta.
7. Pemerintahan Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, dan seluruh masyarakat Kalurahan Guwosari yang telah memberikan izin, ruang, tempat, waktu, dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Relasi Pemerintah Desa Dengan Masyarakat. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik di kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum, dalam memahami pentingnya relasi pemerintah desa dengan masyarakat. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Yogyakarta, 15 Mei 2025

Penulis



Rifa Husniya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
INTISARI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Literatur Review	13
G. Kerangka Konseptual.....	25
1. Relasi.....	25
2. Pemerintah Desa	40
3. Masyarakat	43
H. Metode Penelitian	46
1. Jenis Penelitian	46
2. Unit Analisis	47

a) Subjek Penelitian	47
b) Objek Penelitian.....	48
3. Teknik Pengumpulan Data.....	48
a. Observasi (<i>Observation</i>).....	49
c. Dokumentasi	51
4. Teknik Analisis Data.....	51
a. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	52
b. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	52
c. Penarikan Kesimpulan	53
BAB II PROFIL KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON	
PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL	54
A. Sejarah Kalurahan Guwosari	54
B. Kondisi Geografis.....	58
C. Kondisi Demografis.....	61
1. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	61
2. Data Penduduk Berdasarkan Usia.....	62
3. Data Penduduk Berdasarkan Agama.....	64
4. Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan	65
5. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	66
D. Pemerintah Kalurahan Guwosari	69
BAB III RELASI PEMERINTAH DESA DENGAN MASYARAKAT DI KALURAHAN	
GUWOSARI.....	75
A. Relasi Hegemoni Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Di Kalurahan Guwosari.....	75
B. Relasi Konflikual Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Di Kalurahan Guwosari	97
C. Relasi Egaliter Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Di Kalurahan Guwosari	110
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	142
B. Saran	144

DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN	151
DOKUMENTASI	159

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan.....	47
Tabel 2.1 Batas Wilayah Kalurahan Guwosari.....	59
Tabel 2.2 Padukuhan Kalurahan Guwosari	60
Tabel 2.3 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Tabel 2.4 Data Penduduk Berdasarkan Usia	63
Tabel 2.5 Data Penduduk Berdasarkan Agama	64
Tabel 2.6 Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan	65
Tabel 2.7 Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	66
Tabel 2.8 Organisasi Pemerintahan Kalurahan Guwosari.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sembilan Program Cahaya Atau Prioritas Guwosari.....	70
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Guwosari	72
Gambar 3.1 Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan Di Kalurahan Guwosari...	96
Gambar 3.2 Pertemuan Rutin Warga Padukuhan Di Kalurahan Guwosari....	109
Gambar 3.3 Saluran Aduan Masyarakat Di Kalurahan Guwosari.....	139
Gambar 3.4 Kegiatan Sosialisasi Di Kalurahan Guwosari.....	140

INTISARI

Relasi antara Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat di Kalurahan Guwosari, yang mencakup tantangan dalam partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perumusan kebijakan. Meskipun Pemerintah Kalurahan memiliki peran penting dalam mengelola perumusan kebijakan, terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran mereka, keterbatasan akses informasi, dan keterbatasan dalam partisipasi. Selain itu, konflik antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat juga menjadi isu yang perlu diatasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif. Oleh karena itu, penting untuk mendeskripsikan bagaimana Pemerintah Kalurahan dapat memperkuat komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam mengenai interaksi, komunikasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami perspektif masyarakat dan bagaimana mereka berinteraksi dengan pemerintah desa dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Penelitian tentang Relasi Pemerintah Kalurahan dengan Masyarakat di Kalurahan Guwosari ditemukan bahwa partisipasi aktif masyarakat, mekanisme evaluasi kebijakan, dan penanganan konflik yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang inklusif dan harmonis. Pemerintah Kalurahan terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan, namun peran masyarakat dalam merumuskan kebijakan melalui musyawarah dan jaring aspirasi menjadi landasan utama. Selain itu, penanganan konflik dengan pendekatan kolaboratif dan transparansi juga berdampak positif pada stabilitas sosial dan penguatan hubungan egaliter antara Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat.

Kata kunci : Pemerintah Desa, Masyarakat, Relasi, Pengambilan Keputusan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa di Indonesia berperan sebagai lembaga pemerintahan tingkat lokal yang memiliki tanggung jawab penting dalam mengatur dan memajukan wilayah pedesaan. Karena berada paling dekat dengan warga, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Tugas ini meliputi berbagai bidang, seperti pengelolaan potensi alam, pembangunan sarana dan prasarana, serta pemberian layanan publik yang optimal. Berkat posisinya yang strategis, pemerintah desa mampu menanggapi secara langsung berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, sehingga solusi yang diberikan lebih tepat dan efisien (Sari, 2020).

Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian warga, pemerintah desa berupaya mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan. Dengan mengajak warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah desa tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap program yang dijalankan. Dengan demikian, masyarakat berperan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan, bukan sekadar penerima hasilnya (Hidayati, 2021).

Peran strategis pemerintah desa juga tampak jelas dalam menjaga kestabilan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Dengan tata kelola yang baik, desa mampu menghadapi berbagai persoalan, seperti kemiskinan dan

pengangguran, yang kerap menjadi tantangan utama di daerah pedesaan. Pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah pusat, memastikan aspirasi warga tersampaikan dalam proses pengambilan kebijakan. Kehadiran pemerintah desa yang tanggap dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi sangatlah penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang seimbang dan produktif (Prasetyo, 2022).

Keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri. Kerjasama yang baik antara semua pemangku kepentingan akan menciptakan sinergi yang positif dalam pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan menjadi sangat penting. Dengan demikian, pemerintah desa dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, serta memastikan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal (Rahman, 2024).

Pemerintah desa memainkan peran krusial dalam membina hubungan yang harmonis dan sinergis dengan masyarakat. Hubungan yang solid antara aparat desa dan warga merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program serta kebijakan pembangunan di tingkat lokal. Dengan kemampuan membangun komunikasi yang baik, pemerintah desa dapat merancang dan mengeksekusi program pembangunan secara lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan aktif warga dalam forum musyawarah desa dan kegiatan sosialisasi program memungkinkan pemerintah desa untuk memastikan bahwa arah dan tujuan

pembangunan sejalan dengan aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat (Wibowo, 2020).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur relasi antara pemerintah desa dan masyarakat dengan menekankan pada otonomi, partisipasi, dan pemberdayaan. Undang-Undang Desa memberikan wewenang lebih besar kepada desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai kebutuhan lokal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memperjelas kewenangan desa dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan keuangan dan pembangunan, serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat. Dengan demikian, hubungan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Hubungan yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat berkontribusi pada meningkatnya partisipasi serta keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Ketika warga merasa aspirasinya dihargai dan dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, mereka cenderung menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif terhadap program-program desa. Kondisi ini memperkuat kedekatan emosional antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, keterbukaan pemerintah desa dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan evaluasi program mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat serta partisipasi mereka dalam mengawasi proses pembangunan (Putri, 2021).

Terdapat beberapa permasalahan yang timbul di Kalurahan Guwosari mengenai relasi pemerintah desa dengan masyarakat, salah satunya yaitu timbulnya beberapa konflik antara pemerintah desa dengan masyarakat meskipun dapat langsung diatasi dengan baik. Dengan adanya kerjasama yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat, potensi konflik yang bisa muncul dalam pelaksanaan program pembangunan dapat diminimalisir. Pemerintah desa yang terbuka dan responsif terhadap masukan serta aspirasi masyarakat akan lebih mudah menyesuaikan kebijakan yang ada dengan kebutuhan riil warganya. Kemudian, masyarakat yang merasa didengarkan akan lebih cenderung mendukung dan berpartisipasi aktif dalam upaya pembangunan di desa mereka. Dengan memfasilitasi dialog dan diskusi terbuka antara berbagai pihak yang terlibat, pemerintah desa dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan bersama (Siregar, 2022).

Hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat adalah mengenai tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa informasi terkait dengan program pembangunan, anggaran, dan kebijakan publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang terbuka dan saling percaya antara pemerintah desa dan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung efektivitas dan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal. Melalui penerapan praktik *good governance* dan pelibatan aktif masyarakat dalam mekanisme pengawasan, transparansi pemerintah desa dapat ditingkatkan untuk memenuhi harapan

masyarakat akan akuntabilitas dan keberlanjutan pembangunan (Utomo, 2023).

Hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh komunikasi yang baik, tetapi juga oleh keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan di tingkat lokal. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan program desa, pemerintah dapat mendorong peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan. Selain itu, warga yang terlibat secara aktif biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pemerintahan desa, sehingga potensi terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman terhadap kebijakan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, menumbuhkan budaya partisipatif yang inklusif menjadi langkah strategis dalam mewujudkan desa yang berkembang dan sejahtera (Rahman, 2020).

Selain partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan juga berperan penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warganya. Pemerintah desa yang transparan dalam pengelolaan dana dan program pembangunan akan lebih dipercaya oleh masyarakat, sehingga meminimalisir potensi konflik dan kecurigaan. Transparansi ini dapat diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan secara berkala, diskusi terbuka mengenai alokasi anggaran, serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih memahami dasar kebijakan yang dibuat dan merasa lebih dilibatkan dalam pembangunan desa. Karena itu, penerapan transparansi perlu menjadi elemen integral dalam pengelolaan desa

yang berkelanjutan guna membangun dan menjaga kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat (Suganda, 2021).

Akuntabilitas pemerintahan desa juga menjadi faktor kunci dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta memastikan keberlanjutan pembangunan desa. Pemerintah desa yang akuntabel akan selalu bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka terapkan serta hasil yang dicapai dari program yang telah dijalankan. Masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi dan menilai efektivitas kebijakan pemerintah desa, sehingga tercipta hubungan yang seimbang antara pemangku kebijakan dan warga. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang jelas, seperti forum musyawarah desa atau laporan pertanggungjawaban terbuka, pemerintah desa dapat menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tata kelola yang baik. Dengan demikian, memperkuat akuntabilitas merupakan upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional serta tanggap terhadap kebutuhan warga (Utami, 2022).

Dengan menempatkan partisipasi warga, keterbukaan kebijakan, dan akuntabilitas sebagai prioritas, hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dapat semakin diperkuat. Kolaborasi yang tercipta antara keduanya akan mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Ketika warga merasa suaranya dihargai dan diberi kesempatan untuk terlibat, mereka cenderung lebih mendukung kebijakan desa serta berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaannya. Pemerintah desa yang responsif terhadap aspirasi warga juga akan lebih mudah menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan dengan situasi lokal. Oleh karena itu, membangun sistem pemerintahan desa

yang terbuka dan partisipatif menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat (Wijaya, 2023).

Kalurahan Guwosari yang terletak di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, merupakan salah satu desa yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang melimpah. Potensi alam seperti lahan pertanian, kawasan hutan, dan objek wisata menjadi peluang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di samping itu, warisan budaya berupa tradisi, seni, dan kerajinan lokal menjadi aset bernilai yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, kalurahan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dalam proses ini, Kalurahan Guwosari dihadapkan pada tantangan dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan warganya. Pemerintah Kalurahan memegang peranan penting dalam mengelola berbagai program pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, maupun infrastruktur. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan Pemerintah Kalurahan dalam menjalin komunikasi yang efektif, membangun koordinasi yang baik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat di setiap tahapan pembangunan.

Penelitian mengenai relasi Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat di Kalurahan Guwosari berkaitan dengan perspektif *governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi, transparansi, dan partisipasi aktif dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Relasi hegemoni yang positif antara pemerintah desa dan masyarakat menunjukkan bahwa

masyarakat berperan sebagai subjek yang aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Selain itu, pengelolaan konflik yang efektif melalui komunikasi terbuka dan keterlibatan mediator lokal mencerminkan kepemimpinan yang kuat dan komitmen untuk menjaga stabilitas sosial. Relasi egaliter yang terjalin antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat juga memperkuat solidaritas sosial dan jaringan komunitas, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, penerapan perspektif *governance* dalam interaksi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi Pemerintah Kalurahan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses pembangunan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kemajuan bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dinamika interaksi antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat lokal. Fokus utama kajian ini mencakup berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan, mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai institusi yang memegang peranan strategis dalam pelaksanaan program pembangunan di Kalurahan Guwosari, Pemerintah Kalurahan dituntut untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi warga. Hal ini penting guna mendorong keterlibatan masyarakat di setiap tahapan pembangunan dan menjamin keberlanjutan program-program yang ada. Oleh karena itu, kajian ini menekankan pentingnya membangun komunikasi yang

terbuka, koordinasi yang terpadu, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Hubungan konflikktual antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat memerlukan pendekatan menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan, yang melibatkan kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Komunikasi yang jelas, transparansi, serta pembinaan hubungan yang baik adalah faktor penting dalam mengelola konflik secara efektif. Sebaliknya, hubungan egaliter antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat menekankan pada prinsip keseimbangan, keadilan, dan demokrasi. Melalui saluran komunikasi yang terbuka, partisipasi dalam forum musyawarah desa, serta pemberdayaan masyarakat, kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan yang menyeluruh. Kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah desa dan masyarakat, melalui berbagai bentuk hubungan, merupakan kunci dalam menciptakan pembangunan desa yang merata, berkelanjutan, dan inklusif, dengan menjadikan prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan sebagai dasar dalam setiap proses pembangunan.

Tantangan yang dihadapi dalam relasi Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat adalah musyawarah yang seharusnya sebagai mekanisme pengambilan keputusan di tingkat Kalurahan seharusnya menjadi wadah yang memungkinkan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan yang konstruktif demi terciptanya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan bersama. Namun, dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang signifikan ketika masyarakat menghadapi keterbatasan partisipasi dalam musyawarah tersebut. Salah satu bentuk

keterbatasan partisipasi ini terjadi ketika masyarakat hanya menunjukkan persetujuannya tanpa memberikan usulan, kritik, atau masukan lain yang dapat memperkaya diskusi dan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Dalam kondisi ini, masyarakat cenderung mengikuti atau menerima apa yang telah disampaikan oleh pemerintah tanpa melakukan proses dialog yang aktif dan kritis. Sikap pasif ini menyebabkan musyawarah kehilangan esensi utamanya sebagai forum demokratis, di mana setiap suara dan gagasan memiliki ruang yang seimbang untuk didengar dan dipertimbangkan.

Ketidakmerataan akses terhadap sumber daya dan informasi juga menjadi tantangan lain dalam hubungan antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat di Kalurahan Guwosari mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk turut serta dalam proses pembangunan, baik itu terkait program-program yang sedang dijalankan maupun rencana pembangunan ke depan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi serta kebijakan pembangunan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dalam hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Kurangnya keterbukaan informasi dari pihak desa menjadi kendala utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Mite, 2023).

Pemerintah di Kalurahan Guwosari telah melakukan berbagai upaya untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat melalui inisiatif yang mendorong peningkatan partisipasi dan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan pembangunan. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah pelaksanaan musyawarah desa secara rutin, yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka

terhadap program pembangunan. Dalam forum ini, Pemerintah Kalurahan menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan menyampaikan informasi yang jelas mengenai kebijakan dan rencana pembangunan. Selain itu, pemerintah juga mengadakan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat, serta melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai agen perubahan guna menjangkau kelompok-kelompok yang kurang terlibat serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses pembangunan. Melalui komunikasi yang efektif dan penyediaan ruang partisipatif yang inklusif, Pemerintah Kalurahan berupaya membangun hubungan yang saling percaya dan harmonis, sehingga program pembangunan dapat dijalankan secara lebih relevan dan berdampak bagi seluruh elemen masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana relasi Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat di Kalurahan Guwosari ?

C. Fokus Penelitian

1. Relasi hegemoni antara Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat di Kalurahan Guwosari.
2. Relasi konfliktual antara Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat di Kalurahan Guwosari.
3. Relasi egaliter antara Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat di Kalurahan Guwosari.

D. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan relasi Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat di Kalurahan Guwosari.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman serta memperkuat hubungan antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat di Kalurahan Guwosari. Temuan awal menunjukkan bahwa terciptanya hubungan yang selaras antara keduanya merupakan faktor krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan kolektif. Dengan mengidentifikasi relasi hegemoni, relasi konflikual, dan relasi egaliter. Penelitian ini menyoroti dinamika interaksi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kedua, penelitian ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan transparansi dalam penyelesaian konflik, yang dapat memperkuat kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan memahami cara-cara untuk mengatasi konflik secara kolaboratif, penelitian ini memberikan panduan bagi pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Ketiga, dengan menekankan relasi egaliter, penelitian ini mendorong pendekatan inklusif yang memastikan suara masyarakat didengar dalam setiap kebijakan. Hal ini tidak hanya memperkuat partisipasi aktif masyarakat tetapi juga menjamin bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Secara keseluruhan, manfaat penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menjadi acuan bagi pengembangan strategi yang lebih baik dalam membangun kemitraan antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kualitas hidup di Kalurahan Guwosari.

F. Literatur Review

1. Artikel yang disusun oleh Slamet Makhsun (2021) berjudul "*Hegemoni dan Relasi Kuasa : Studi Kasus Tahlilan Di Dusun Gunung Kekep*", Ritual tahlilan di Dusun Gunung Kekep mencerminkan dinamika kompleks antara hegemoni, relasi kuasa, dan praktik sosial dalam konteks politik identitas. Terungkap bahwa partai politik sering kali memanfaatkan identitas agama sebagai alat untuk meraih dukungan suara, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang masih kental dengan tradisi keagamaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode naturalistik dan kajian literatur, yang memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang peran tahlilan dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahlilan tidak hanya berfungsi sebagai ritual religius yang memiliki makna spiritual, tetapi juga berperan penting dalam membangun dan memperkuat nilai-nilai sosial di komunitas tersebut. Dalam konteks pemilu, tahlilan sering kali dimanfaatkan sebagai media pengumpulan massa yang efektif untuk kampanye politik. Momen-momen tahlilan menjadi kesempatan bagi partai politik untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat, di mana mereka dapat menyampaikan pesan-pesan politik dan meraih simpati pemilih. Pemuka agama dalam masyarakat Dusun Gunung Kekep memiliki posisi yang sangat strategis. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penentu norma-norma sosial dan hukum adat yang berlaku. Dalam hal ini, pemuka agama dapat memengaruhi sikap dan pilihan politik masyarakat, sehingga ritual tahlilan menjadi arena di mana kekuasaan dan hegemoni saling

berinteraksi. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana praktik keagamaan dapat dimanfaatkan dalam konteks politik, serta implikasinya terhadap struktur sosial dan relasi kuasa di tingkat lokal. Dengan demikian, tahlilan di Dusun Gunung Kekep bukan hanya sekadar ritual keagamaan, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang mencerminkan interaksi antara agama dan politik. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami konteks lokal dalam menganalisis praktik-praktik keagamaan dan dampaknya terhadap dinamika politik, serta bagaimana masyarakat dapat menjadi arena bagi berbagai kepentingan yang saling berhadapan. Temuan ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai peran agama dalam politik dan bagaimana masyarakat dapat menavigasi relasi kuasa yang ada.

2. Artikel yang ditulis oleh Mahatva Yoga Adi Pradana (2020) dengan judul “Relasi Kuasa Politik Tokoh Agama Dalam Hegemoni Pemilukada 2020” membahas relasi kuasa politik yang dijalankan oleh tokoh agama di Kabupaten Malang dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tokoh agama dalam masyarakat kerap menempati posisi sosial yang tinggi, sehingga mereka sering dianggap sebagai bagian dari elit lokal. Status ini memberi mereka kekuasaan yang bersumber dari legitimasi masyarakat. Selain itu, kekuatan politik tokoh agama juga diperkuat oleh jejaring yang mereka bangun, yang umumnya berkaitan erat dengan afiliasi organisasi keagamaan. Meskipun artikel ini berangkat dari survei, penulis mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, warga, serta individu yang mengenal para tokoh tersebut. Di wilayah Kabupaten

Malang, tokoh agama kerap menjadi acuan alternatif dalam menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Otoritas yang mereka miliki juga menjadi modal penting dalam proses pencalonan politik, karena masyarakat cenderung memberikan dukungan. Ini menegaskan peran strategis tokoh agama dalam politik lokal. Mengacu pada teori *Powercube* dari Gaventa, artikel ini menjelaskan bahwa kekuasaan tokoh agama bergerak dalam struktur kekuasaan yang ada, meskipun sering kali tidak tampak secara langsung. Mereka lebih banyak berperan di balik layar sebagai penasihat atau pelaku gerakan tersembunyi yang mampu memengaruhi arah kebijakan. Dengan demikian, tokoh agama semakin dilirik oleh aktor-aktor politik sebagai mitra penting dalam meraih legitimasi dan simpati publik. Kajian ini menyajikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara agama dan politik, serta peran tokoh agama sebagai agen perubahan di tingkat lokal.

3. Artikel karya Anggalih Bayu Muh Kamim (2021) yang berjudul *“Hegemoni dan Ekonomi Politik Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta”* mengulas peran strategis Dana Keistimewaan DIY dalam mendanai lima sektor utama, yaitu tata ruang, pertanahan, kebudayaan, kelembagaan, serta mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Meski memiliki potensi besar, realisasi manfaat dana tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya keterlibatan publik, persoalan kelembagaan, dan dominasi kepentingan elit lokal, sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum optimal. Dalam penelitian ini, Anggalih menggunakan pendekatan hegemoni untuk mengkaji konsolidasi kekuasaan yang terbentuk sejak proses perumusan

hingga implementasi Undang-Undang Keistimewaan. Hasil studi menunjukkan bahwa lemahnya kontrol masyarakat terhadap penggunaan Dana Keistimewaan disebabkan oleh kuatnya dominasi kelompok elit, yang berhasil memperkokoh posisi sosial-politik mereka. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Temuan utama menyatakan bahwa dukungan publik terhadap Undang-Undang Keistimewaan lebih merupakan hasil mobilisasi kekuasaan elit lokal daripada cerminan aspirasi masyarakat. Hegemoni ini juga menghambat tumbuhnya kesadaran kritis di tingkat akar rumput dan membatasi kontribusi intelektual organik dalam mengawasi jalannya pengelolaan dana. Dalam konteks ini, peran intelektual organik masih lemah, baik dalam membentuk pendidikan alternatif maupun membangun gerakan sosial yang solid. Akibatnya, kelas penguasa tetap mampu mempertahankan dominasi mereka melalui pemanfaatan sumber daya serta struktur pemerintahan dalam pengelolaan Dana Keistimewaan di DIY

4. Artikel yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati (2021) dengan judul “Relasi Antar Umat Mayoritas Dan Minoritas : Studi Masyarakat Tionghoa Di Surabaya “ membahas mengenai relasi antara umat mayoritas dan minoritas di Indonesia, khususnya masyarakat etnis Tionghoa di Surabaya, ditemukan beberapa temuan signifikan yang menggambarkan dinamika sosial yang kompleks. Penelitian ini menggunakan metode campuran, termasuk studi kasus, analisis arsip, dan diskusi kelompok terfokus selama kurang lebih satu tahun. Salah satu

temuan utama adalah adanya integrasi linguistik dan sosial yang kuat antara etnis Tionghoa dan masyarakat mayoritas, baik dari segi etnis maupun agama. Bahasa Jawa berperan sebagai jembatan komunikasi yang memfasilitasi interaksi dan pemahaman antara kedua kelompok tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa relasi antara minoritas dan mayoritas bersifat dinamis, di mana masing-masing pihak berusaha mempertahankan identitas budaya mereka sambil tetap terlibat dalam interaksi sosial yang harmonis. Dalam analisisnya, studi ini mengadopsi perspektif politik negara untuk memahami bagaimana perubahan dalam regulasi sosial mempengaruhi hubungan antar kelompok. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas yang telah lama ada di Indonesia telah mendorong masyarakat mayoritas untuk lebih terbuka dalam menerima keberagaman. Hal ini, pada gilirannya, berkontribusi pada kebijakan negara yang lebih akomodatif dalam mengatur relasi antara kelompok minoritas dan mayoritas.

5. Artikel yang ditulis oleh Indera Waspada dan Andin Rusmini (2023) berjudul *“Peran Stakeholder dan Pemerintah dalam Menangani Konflik Pengelolaan Goa Pindul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata”* membahas keterlibatan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan konflik terkait pengelolaan wisata Goa Pindul. Kajian ini merujuk pada Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 sebagai dasar hukum pengelolaan sektor pariwisata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik

purposive sampling dan pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan Perda tersebut memberikan landasan hukum yang jelas bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata, sebagaimana diatur melalui keputusan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata. Penelitian juga mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam penyelesaian konflik meliputi lemahnya koordinasi antar stakeholder, perbedaan kepentingan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Penulis menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat lokal dalam menciptakan sistem pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan efektif. Dengan dukungan regulasi yang kuat serta kolaborasi dari seluruh pihak, potensi konflik dapat diminimalkan, sehingga pengelolaan Goa Pindul dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal. Temuan ini menegaskan bahwa peran aktif pemerintah dalam pembuatan kebijakan serta pelibatan stakeholder merupakan faktor kunci dalam menciptakan iklim pengelolaan wisata yang harmonis dan meningkatkan kualitas layanan wisata di destinasi tersebut.

6. Artikel karya Anggi Koenjaini Putri, Dhanis Aisyah Aurella, Nurul Azizah Salma, dan Ario Bimo Utomo (2023) berjudul "*Relasi Pusat-Daerah Dalam Paradiplomasi Bermotif Nasionalistik: Studi Perbandingan Kasus Skotlandia dan Papua*" mengkaji perbandingan pelaksanaan paradiplomasi antara Skotlandia dan Papua, dengan menitikberatkan pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di masing-masing wilayah. Meskipun berada dalam kondisi sosial-politik

yang berbeda, keduanya memiliki tiga kesamaan utama: adanya isu separatisme, pengakuan sebagai wilayah otonom oleh pemerintah pusat, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan paradiplomasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka sebagai sumber data sekunder, untuk menelusuri secara mendalam dinamika interaksi antara tingkat pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi apakah relasi yang terjalin bersifat kooperatif atau justru konflikual, dengan merujuk pada teori-teori paradiplomasi dari Soldatos dan Crikemans. Temuan menunjukkan bahwa baik Skotlandia maupun Papua menunjukkan pola relasi yang mirip, yang dipengaruhi oleh gerakan nasionalisme di wilayah masing-masing, dengan upaya untuk mempertahankan identitas dan kepentingan lokal di tengah struktur yang dikendalikan pusat. Selain itu, kedua wilayah tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan diplomasi luar negeri secara mandiri, yang membatasi ruang gerak paradiplomasi mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan pusat-daerah dalam konteks nasionalisme dan paradiplomasi, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan pendekatan yang lebih tepat dalam menangani dinamika relasi pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan aspirasi otonomi dan identitas lokal dalam kerangka global.

7. Artikel yang ditulis oleh Yonas Bastian dan Antonius Galih Arga Wiwin Aryanto (2023) dengan judul "*Membangun Komunitas Yang Egaliter: Analisis Sosio-Kultural Tentang Persoalan Onesimus Dalam Filemon 1: 8-22*" menyajikan analisis sosio-kultural mengenai masalah Onesimus

dalam teks Filemon 1:8-22, dengan menggunakan metode historis-kritis. Penelitian ini mengeksplorasi konteks sosial dan budaya sistem perbudakan Romawi pada abad pertama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai status Onesimus sebagai budak yang melarikan diri dari tuannya, Filemon. Dalam sistem hukum Romawi pada masa itu, Onesimus berisiko mendapat hukuman berat sebagai *fugitivus* (budak yang melarikan diri). Namun, dalam suratnya, Paulus mencoba menyelesaikan ketegangan antara budak dan tuan dengan pendekatan yang lebih inklusif dalam komunitas jemaat Kristen. Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus kembali bukan hanya sebagai budak, tetapi sebagai saudara dalam iman Kristus. Dalam komunitas yang dipengaruhi oleh budaya Romawi, Paulus mengajarkan pentingnya saling menerima sebagai saudara seiman, tanpa memandang perbedaan status sosial seperti antara tuan dan budak, orang Yahudi dan Yunani, atau laki-laki dan perempuan. Semua anggota jemaat disatukan dalam iman yang sama kepada Kristus, yang menjadi dasar bagi hubungan yang egaliter di antara mereka. Surat kepada Filemon ini berfungsi sebagai petunjuk pastoral dari Paulus yang menekankan kasih sebagai prinsip utama dalam kehidupan Kristen, serta mengajak komunitas untuk saling mengampuni dan menerima satu sama lain. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana ajaran Paulus dapat diterapkan dalam membangun komunitas yang lebih egaliter, serta relevansinya dalam konteks sosial yang lebih luas.

8. Buku "*DESA: Situs Baru Demokrasi Lokal*" (2023) yang disusun oleh IRE Yogyakarta memberikan analisis mendalam tentang pentingnya relasi

egaliter dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Dalam konteks demokratisasi, penulis menekankan bahwa partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan sangat vital untuk mencapai keadilan gender dan mengurangi dominasi elit dalam proses politik lokal. Relasi egaliter di desa dianggap sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Buku ini menyoroti bahwa partisipasi aktif dari seluruh warga, baik pria maupun wanita, dalam proses pengambilan keputusan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Penulis berpendapat bahwa tanpa kesetaraan dalam partisipasi, keputusan yang dihasilkan cenderung mencerminkan kepentingan elit lokal, yang sering mengabaikan suara masyarakat luas. Walaupun UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum untuk otonomi desa, tantangan besar masih tetap ada. Buku ini mencatat bahwa banyak desa masih terjebak dalam praktik politik tradisional yang dikuasai oleh elit, menciptakan kesenjangan antara harapan akan demokratisasi dan kenyataan di lapangan, di mana kekuasaan cenderung terpusat pada kelompok kecil. IRE Yogyakarta mengusulkan perlunya perubahan struktural dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan relasi egaliter, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menawarkan kajian teoretis tetapi juga solusi praktis untuk menghidupkan kembali nilai-nilai demokratis di tingkat desa. Secara keseluruhan, *"DESA: Situs Baru Demokrasi Lokal"* memberikan wawasan penting mengenai implementasi relasi egaliter dalam demokrasi lokal serta tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkannya, dan menjadi

referensi yang berharga bagi akademisi, pembuat kebijakan, serta aktivis yang berkomitmen pada penguatan demokrasi di Indonesia.

9. Artikel yang ditulis oleh Irma Yulianti Sofyan (2022) dengan judul *“Menilik Egaliter Hak Berpolitik Laki-Laki Dan Perempuan”* membahas pentingnya pemahaman tentang konsep egaliter dalam hak berpolitik, khususnya dalam lingkungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Makassar. Meskipun secara teologis laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah SWT, kenyataannya, partisipasi perempuan dalam politik masih terbatas. Situasi ini diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang sering kali tidak memadai untuk mendukung keterwakilan perempuan dalam jabatan politik secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan konsep egaliter hak berpolitik di PKS, dengan pendekatan hukum tata negara Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif, syar'i, dan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen resmi dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam tentang kondisi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKS Kota Makassar telah memenuhi syarat yuridis terkait kebijakan keterwakilan perempuan dengan menetapkan minimal 30% untuk posisi pengurus partai. Dari 74 pengurus partai, terdapat 45 laki-laki dan 29 perempuan, yang mencerminkan proporsi 60% laki-laki dan 40% perempuan. Meskipun angka ini memenuhi kuota yang ditetapkan, proporsi tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan hak berpolitik antara

laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya terwujud. Ini mencerminkan tantangan lebih besar dalam mencapai kesetaraan gender dalam politik Indonesia, di mana perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Penelitian ini memberikan gambaran jelas tentang kondisi keterwakilan perempuan dalam politik dan pentingnya kebijakan yang lebih mendukung partisipasi perempuan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan partai politik lainnya untuk lebih memperhatikan kesetaraan gender dalam struktur kepengurusan dan pengambilan keputusan politik. Meningkatkan kesadaran akan peran penting perempuan dalam politik tidak hanya akan memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara.

10. Jurnal yang berjudul “Enhancing Public Service Delivery through Egalitarian Relations: A Case Study of Local Government in Indonesia” yang ditulis oleh Anwar, S. & Cahyono, B. pada tahun 2020 membahas pentingnya memperkuat pelayanan publik melalui hubungan egaliter di pemerintah daerah Indonesia. Penelitian ini menekankan bahwa hubungan yang adil dan inklusif antara pemerintah dan masyarakat memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengiriman layanan publik. Fokus penelitian ini adalah pada prinsip kesetaraan dan keadilan sebagai dasar hubungan yang terjalin. Hasil studi menunjukkan bahwa ketika pemerintah dan masyarakat bekerja sama dengan prinsip-prinsip tersebut, pelayanan publik menjadi lebih responsif dan memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat. Studi kasus di Indonesia memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah memengaruhi kualitas layanan publik yang disediakan. Temuan dari penelitian ini menawarkan pandangan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi pelayanan publik untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan utama adalah bahwa kedua penelitian ini berfokus pada pentingnya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik, dengan penekanan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan partisipasi. Perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian yang akan dilakukan di Kalurahan Guwosari, Pajangan, Bantul, yang akan memberikan gambaran lebih spesifik tentang dinamika relasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, ada perbedaan dalam subjek penelitian, di mana studi literatur melibatkan berbagai subjek seperti tokoh agama, tokoh politik, dan masyarakat umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada masyarakat dan pemerintah di Kalurahan Guwosari. Perbedaan juga terdapat pada metode penelitian, di mana studi literatur menggunakan berbagai metode seperti studi kasus, analisis arsip, dan penelitian kualitatif, sementara penelitian di Kalurahan Guwosari menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan lainnya adalah bahwa studi literatur lebih terdiversifikasi dalam fokusnya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada masalah kesenjangan sosial antara masyarakat pendatang dan penduduk asli di Kalurahan

Guwosari, yang memungkinkan analisis lebih mendalam tentang dinamika hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat terkait isu sosial tersebut.

G. Kerangka Konseptual

1. Relasi

Relasi dapat dipahami sebagai hubungan, interaksi, atau keterkaitan antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks hubungan antar manusia, relasi menggambarkan ikatan atau interaksi yang muncul karena adanya kebutuhan, kepentingan, atau tujuan bersama. Relasi dalam masyarakat merujuk pada interaksi timbal balik antara individu atau kelompok dalam sebuah komunitas, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pola interaksi sosial, jaringan sosial, serta hubungan kekuasaan (Santoso & Wibowo, 2022). Masyarakat terbentuk melalui interaksi antar individu yang menghasilkan pola hubungan tertentu, yang dikenal sebagai pola relasi sosial. Pola ini terdiri dari relasi sosial yang bersifat asosiatif, seperti kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi, yang berkontribusi pada keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat (Andriani & Putra, 2023). Selain itu, faktor-faktor seperti nilai, norma sosial, komunikasi, serta kepercayaan dan toleransi memiliki peran penting dalam menciptakan relasi yang harmonis. Relasi yang baik tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga mendukung pembangunan serta penyelesaian konflik secara damai, yang berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang kohesif (Praditya, 2023).

Durkheim, seorang sosiolog Prancis, berpendapat bahwa relasi sosial adalah hubungan yang terbentuk antara individu dalam masyarakat yang membentuk struktur sosial. Ia menekankan bahwa solidaritas sosial, baik mekanik maupun organik, sangat bergantung pada relasi antar individu dalam komunitas. Relasi ini menciptakan norma dan nilai yang mengikat masyarakat. Durkheim membedakan solidaritas mekanik dan organik sebagai bentuk hubungan antar individu dalam masyarakat tradisional dan modern. Norma dan nilai yang muncul dari relasi sosial ini mengikat masyarakat menjadi kesatuan yang utuh, menjaga harmoni dan ketertiban sosial. Integrasi sosial antar individu yang beragam menjadi kunci keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif melalui solidaritas, norma, dan nilai dari interaksi antar individu (Fathoni, 2024).

Kemudian, Max Weber mengemukakan bahwa relasi sosial adalah interaksi yang memiliki makna bagi individu yang terlibat. Ia membedakan antara tindakan sosial yang rasional dan yang tidak rasional, serta menekankan pentingnya pemahaman subjektif dalam membangun relasi. Menurutnya, relasi sosial tidak hanya terbentuk dari tindakan individu, tetapi juga dari konteks sosial yang lebih luas. Tindakan sosial menjadi rasional dan tidak rasional, di mana tindakan rasional berdasarkan tujuan yang dipertimbangkan secara matang, sedangkan tindakan tidak rasional didasarkan pada emosi, kebiasaan, atau norma tanpa pertimbangan rasional yang jelas. Pengertian makna subjektif menjadi kunci dalam memahami bagaimana individu membentuk relasi sosial dalam masyarakat. Konteks sosial yang lebih

luas dalam membentuk relasi sosial, dimana faktor-faktor seperti budaya, nilai, dan struktur kekuasaan memainkan peran penting dalam dinamika hubungan antar individu (Rusmini, 2023).

Berikut adalah relasi yang berkaitan dengan relasi Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat :

a) Relasi Hegemoni

Hegemoni adalah konsep yang merujuk pada dominasi suatu kelompok atau kelas sosial atas kelompok lainnya, yang mencakup tidak hanya dominasi fisik tetapi juga pengaruh ideologis dan budaya yang diterima oleh masyarakat. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani "hegemon," yang berarti pemimpin atau penguasa, dan sering digunakan dalam konteks politik dan sosial untuk menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat dipertahankan melalui konsensus dan penerimaan masyarakat. Salah satu tokoh kunci dalam pengembangan konsep hegemoni adalah Antonio Gramsci, yang menekankan pentingnya ideologi dalam mempertahankan kekuasaan dan bagaimana kelompok dominan dapat membentuk pandangan dunia masyarakat untuk menjaga status quo (Artha, 2021).

Kelompok dominan mengendalikan sumber daya dan kekuasaan melalui berbagai mekanisme, termasuk penguasaan ekonomi, politik, dan budaya. Mereka memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya finansial, infrastruktur, dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang berdampak pada masyarakat

luas. Selain itu, kelompok dominan memanfaatkan institusi seperti media dan pendidikan untuk menyebarkan ideologi mereka, menciptakan legitimasi dan penerimaan di kalangan masyarakat. Ideologi kelompok dominan diterima oleh masyarakat luas melalui proses sosialisasi di berbagai institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan media. Nilai-nilai dan keyakinan yang diusung oleh kelompok dominan disebarluaskan dan diinternalisasi oleh individu-individu dalam masyarakat sehingga menjadi norma sosial. Kelompok dominan sering menggunakan narasi menarik untuk menciptakan kesepakatan sosial, sehingga masyarakat merasa terlibat dalam ideologi tersebut (Rahman, 2023).

Media memainkan peran penting dalam menyebarkan ideologi dominan dan membentuk opini publik dengan menyajikan narasi yang mendukung kepentingan kelompok yang berkuasa. Melalui berbagai platform, media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi (Halimah, 2024). Kelompok terpinggirkan sering mengembangkan bentuk perlawanan terhadap hegemoni yang menindas melalui protes sosial dan penggunaan media alternatif untuk menyuarakan pandangan mereka. Aksi kolektif seperti demonstrasi berusaha menantang narasi kelompok berkuasa dan mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih adil (Sari & Prabowo, 2025). Relasi hegemoni memiliki dampak sosial

signifikan terhadap masyarakat, sering kali menghasilkan ketidakadilan sosial dan ketimpangan mendalam. Ketika kelompok dominan mengendalikan sumber daya dan kekuasaan, mereka cenderung mengabaikan kebutuhan kelompok terpinggirkan, mengakibatkan marginalisasi (Wahyuni & Ahmad, 2023).

b) Relasi Konflikual

Relasi konflikual dapat dipahami sebagai hubungan antara individu atau kelompok yang ditandai dengan adanya ketegangan, perselisihan, dan pertentangan kepentingan. Konflik dalam konteks ini sering kali timbul akibat perbedaan tujuan, nilai, atau harapan yang tidak sejalan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan yang berkepanjangan, yang jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi mengarah pada perpecahan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai relasi konflikual agar konflik dapat dikelola dan diselesaikan dengan efektif (Rahmad, 2021).

Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya relasi konflikual, termasuk perbedaan nilai dan keyakinan, persaingan sumber daya, serta kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Perbedaan nilai dan keyakinan sering kali menciptakan jurang pemisah yang sulit dijembatani, sementara persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas dapat memicu ketegangan. Kesalahpahaman, baik yang

disengaja maupun tidak, dapat memperburuk situasi dan menyebabkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi penyebab konflik agar dapat menemukan solusi yang tepat (Hendrawan, 2023).

Dampak dari relasi konflikual dapat bersifat negatif maupun positif, tergantung pada bagaimana konflik tersebut dikelola. Secara negatif, konflik dapat menyebabkan kerusakan hubungan, stres, dan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, jika dikelola dengan baik, relasi konflikual juga dapat menghasilkan perubahan positif, seperti inovasi dan peningkatan pemahaman antar pihak. Oleh karena itu, penting untuk melihat konflik sebagai peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan, bukan hanya sebagai masalah yang harus dihindari (Putri, 2020).

Dalam menganalisis relasi konflikual, beberapa teori dan pendekatan dapat digunakan, seperti teori konflik dan teori konstruktivisme sosial. Teori konflik menjelaskan bagaimana konflik muncul dan berkembang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut. Sementara itu, teori konstruktivisme sosial menyoroti bagaimana interaksi sosial dan persepsi individu membentuk realitas konflik. Dengan memahami kedua pendekatan ini, kita dapat lebih baik dalam mengidentifikasi dan menangani konflik yang terjadi dalam berbagai konteks sosial (Wahyuni, 2021).

Berbagai strategi dapat diterapkan untuk menyelesaikan relasi konflikual, termasuk negosiasi, mediasi, dan kompromi. Negosiasi melibatkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sementara mediasi melibatkan pihak ketiga yang membantu memfasilitasi dialog. Kompromi adalah pendekatan di mana masing-masing pihak bersedia untuk mengorbankan sebagian dari kepentingan mereka demi mencapai solusi yang dapat diterima. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, relasi konflikual dapat dikelola dengan lebih efektif, sehingga mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul (Kusuma, 2022).

c) Relasi Egaliter

Relasi egaliter dapat dipahami sebagai hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau status sosial. Dalam jenis hubungan ini, setiap individu dihargai dan diakui secara setara, yang memungkinkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Kesetaraan dalam relasi ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang inklusif, tetapi juga mendorong kolaborasi yang lebih baik serta memperkuat keadilan sosial. Dengan demikian, relasi egaliter berkontribusi pada terbentuknya masyarakat yang lebih harmonis dan adil (Mardiana, 2022).

Karakteristik utama dari relasi egaliter mencakup kesetaraan hak, partisipasi aktif, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam relasi ini, setiap pihak memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak ada yang mendominasi suara pihak lain. Partisipasi aktif juga menjadi kunci, di mana setiap individu atau kelompok diharapkan terlibat dalam proses interaksi dan pengambilan keputusan. Penghargaan terhadap perbedaan juga menjadi elemen penting, di mana setiap individu dihormati terlepas dari latar belakang atau pandangan yang berbeda. Dengan ciri-ciri ini, relasi egaliter menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung kolaborasi yang lebih baik.

Relasi egaliter memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi, karena dapat memperbaiki keadilan sosial serta memperkuat kerjasama antar individu atau kelompok. Dalam konteks sosial, relasi yang setara memungkinkan setiap orang berkontribusi dan dihargai, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Di bidang politik, relasi egaliter mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan, memperkuat demokrasi dan akuntabilitas. Di sektor ekonomi, kesetaraan dalam akses sumber daya dan peluang kerja berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan inovasi. Oleh karena itu, relasi egaliter tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan individu tetapi juga

pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan (Hendrawan, 2022).

Ada berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat terciptanya relasi egaliter, seperti budaya dan nilai sosial, struktur organisasi, serta kebijakan dan regulasi. Budaya yang mendukung kesetaraan, seperti penghargaan terhadap keragaman dan inklusivitas, akan memfasilitasi terbentuknya relasi egaliter dalam masyarakat. Struktur organisasi yang mendorong partisipasi aktif dari semua anggota tanpa memandang hierarki dapat memperkuat relasi egaliter di tempat kerja. Kebijakan dan regulasi yang mendukung kesetaraan, seperti undang-undang yang melindungi hak-hak gender, ras, dan kelas sosial, juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang adil dan setara. Oleh karena itu, kombinasi faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan relasi egaliter dalam berbagai konteks.

Relasi egaliter memberikan dampak positif yang signifikan, antara lain peningkatan kualitas hubungan, dorongan terhadap inovasi dan kreativitas, serta kontribusi terhadap keadilan sosial. Hubungan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan cenderung lebih harmonis dan produktif, karena setiap individu merasa dihargai dan diakui. Selain itu, lingkungan yang inklusif dan egaliter mendorong munculnya ide-ide baru dan inovasi, karena semua pihak merasa bebas untuk berkontribusi tanpa takut dihakimi. Lebih jauh lagi, relasi

egaliter berperan penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana hak dan kesempatan tersedia bagi semua orang tanpa diskriminasi. Dengan demikian, relasi egaliter tidak hanya memperbaiki interaksi antar individu tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial secara keseluruhan (Rizki, 2022).

d) Relasi Pemerintah Kalurahan

Hubungan antara Pemerintah Kalurahan dan berbagai pihak yang terlibat memainkan peran krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Relasi ini merujuk pada interaksi antara Pemerintah Kalurahan dengan elemen-elemen masyarakat desa serta lembaga-lembaga desa lainnya. Relasi Pemerintah Kalurahan berfungsi sebagai sarana komunikasi yang menghubungkan pemerintah dengan warganya, yang menunjukkan bahwa relasi ini tidak hanya bersifat formal secara struktural, tetapi juga mencakup dimensi interaksi yang lebih kompleks dan dinamis.

Relasi Pemerintah Kalurahan terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu pemerintah desa itu sendiri, masyarakat desa, serta lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). Pemerintah Kalurahan bertugas menetapkan kebijakan dan menjalankan program pembangunan. Struktur Pemerintah Kalurahan yang tertata dengan baik memungkinkan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Di sisi lain, masyarakat memegang peran penting melalui partisipasi aktif

mereka, yang dapat mendorong efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Lembaga desa juga memiliki kontribusi besar dalam proses pengambilan keputusan bersama di tingkat lokal.

Jenis-jenis relasi dalam Pemerintah Kalurahan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu relasi vertikal, horizontal, dan relasi dengan masyarakat. Relasi vertikal menggambarkan hubungan antara Pemerintah Kalurahan dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, seperti pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat, yang sangat diperlukan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan program pembangunan. Relasi horizontal merujuk pada kerjasama antara desa dengan lembaga desa lainnya atau dengan desa tetangga, yang bertujuan meningkatkan efisiensi layanan publik. Sementara itu, relasi masyarakat berkaitan langsung dengan keterlibatan warga dalam proses pembangunan, di mana peran aktif mereka menjadi penentu keberhasilan pembangunan desa (Nugroho, 2020).

Beragam faktor memengaruhi kualitas relasi antara pemerintah desa dan pihak-pihak terkait, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Dari sisi sosial, hal-hal seperti tingkat pendidikan, budaya lokal, dan norma sosial akan memengaruhi bagaimana masyarakat dan pemerintah desa berinteraksi. Masyarakat yang lebih teredukasi cenderung memiliki komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah.

Secara ekonomi, faktor ketersediaan sumber daya dan kebutuhan masyarakat bisa menjadi pendorong kerja sama atau pemicu ketegangan. Dari sisi politik, dinamika kebijakan lokal dan nasional dapat turut membentuk pola hubungan antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat (Suwandi, 2021).

Dampak dari relasi Pemerintah Kalurahan dapat berupa dampak positif maupun negatif. Jika hubungan yang terjalin kuat dan harmonis, hal ini akan mendukung terciptanya pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan (Saputra, 2020). Sebaliknya, apabila relasi ini diwarnai oleh konflik kepentingan atau ketidakpuasan masyarakat, maka potensi terjadinya hambatan dalam pembangunan pun meningkat. Oleh karena itu, membangun dan menjaga kualitas relasi yang baik menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Dampak dari relasi Pemerintah Kalurahan dapat berupa dampak positif maupun negatif. Jika hubungan yang terjalin kuat dan harmonis, hal ini akan mendukung terciptanya pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan (Saputra, 2020). Sebaliknya, apabila relasi ini diwarnai oleh konflik kepentingan atau ketidakpuasan masyarakat, maka potensi terjadinya hambatan dalam pembangunan pun meningkat. Oleh karena itu, membangun dan menjaga kualitas relasi yang baik

menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

e) Relasi Masyarakat

Dalam masyarakat modern, relasi masyarakat memegang peranan penting dalam membangun dan menjaga kesejahteraan sosial. Relasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai jaringan hubungan antara individu, kelompok, dan organisasi yang melibatkan interaksi, komunikasi, serta pembentukan ikatan sosial. Menurut penelitian oleh Pranoto (2020), relasi masyarakat merupakan aspek fundamental dalam memperkuat kerjasama dan membangun solidaritas di dalam suatu komunitas. Pentingnya relasi masyarakat juga sangat berkaitan dengan kemampuannya dalam memfasilitasi interaksi antar anggota masyarakat, mempromosikan nilai-nilai sosial, dan menjaga harmoni dalam konteks sosial dan komunitas.

Individu, kelompok, dan organisasi merupakan komponen utama dalam struktur relasi masyarakat. Individu sebagai bagian dari komunitas memegang peranan penting dalam membangun relasi sosial yang sehat dan harmonis. Hubungan antar kelompok sosial seperti kelompok umur, profesi, atau etnis turut memperkuat keragaman dan keterikatan dalam masyarakat. Penelitian oleh Hadi (2021) menunjukkan bahwa dimensi interaksi antar kelompok sosial dapat menjadi landasan yang kuat dalam menyatukan masyarakat dalam kerangka kebhinekaan. Sementara itu, peran organisasi

masyarakat seperti LSM, komunitas lokal, atau lembaga sosial lainnya juga sangat berpengaruh dalam membangun relasi yang saling mendukung dan memperkuat kesejahteraan sosial.

Tipe-tipe relasi dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi relasi sosial, relasi formal, dan relasi informal. Relasi sosial mencakup interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari yang diatur oleh norma-norma sosial. Relasi formal merupakan hubungan yang terstruktur dan diatur oleh aturan-aturan yang jelas, seperti dalam konteks organisasi dan lembaga formal. Sementara itu, relasi informal lebih cenderung bersifat spontan dan tidak terikat oleh aturan yang kaku, seperti dalam hubungan persahabatan atau kelompok kecil. Pola interaksi dalam setiap tipe relasi tersebut memberikan kontribusi yang berbeda dalam membentuk dinamika sosial masyarakat.

Faktor-faktor yang memengaruhi relasi masyarakat meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait dalam mempengaruhi dinamika hubungan sosial. Faktor sosial seperti nilai, norma, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat dapat menjadi landasan yang kuat dalam membentuk interaksi antar individu. Dalam konteks ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat juga turut memengaruhi pola interaksi antar individu, seperti dalam hal distribusi sumber daya dan tingkat kesenjangan ekonomi. Sementara faktor politik seperti kebijakan publik dan dinamika kekuasaan juga

berperan dalam membentuk hubungan sosial dan interaksi antar kelompok.

Dampak dari relasi masyarakat dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, baik secara positif maupun negatif. Dampak positif meliputi peningkatan solidaritas, kerjasama, dan partisipasi sosial yang memperkuat ikatan sosial dan membangun kohesi dalam masyarakat. Namun, dampak negatif seperti konflik antar kelompok, diskriminasi, dan ketegangan sosial juga dapat muncul akibat ketidaksetaraan dan perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai relasi masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan.

Relasi masyarakat, sebagai jaringan hubungan antara individu, kelompok, dan organisasi, memainkan peran sentral dalam membangun kesejahteraan sosial dan memperkuat hubungan antaranggota masyarakat. Dengan memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, dan politik, relasi masyarakat menjadi landasan yang kuat dalam memfasilitasi interaksi, nilai-nilai sosial, dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Melalui tipe-tipe relasi seperti relasi sosial, formal, dan informal, serta pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya, masyarakat dapat merespons tantangan kompleks dalam membangun komunitas inklusif, harmonis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kesadaran akan

pentingnya relasi masyarakat tidak hanya meningkatkan solidaritas dan partisipasi sosial, tetapi juga memberikan landasan yang kokoh dalam menciptakan masyarakat yang rukun dan berdampingan dalam keberagaman.

2. Pemerintah Kalurahan

Pemerintah Kalurahan merupakan entitas penyelenggara pemerintahan pada tingkat paling dasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Secara umum, Pemerintah Kalurahan berperan sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kalurahan /desa. Dalam hal ini, Pemerintah Kalurahan bertindak sebagai representasi masyarakat dalam proses pembangunan serta pengelolaan potensi sumber daya yang ada di kalurahan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memuat berbagai perubahan dan penyesuaian terkait pemerintahan desa, termasuk masa jabatan Kepala Desa, kewenangan desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. struktur pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkatnya yang bertugas menjalankan kebijakan pembangunan, melayani masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban di desa. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah desa/ kalurahan wajib menjalankan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Peran strategis Pemerintah Kalurahan dalam pembangunan nasional sangat signifikan, karena desa merupakan satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Hal ini menjadikan pemerintah desa sebagai pihak yang paling mengetahui kebutuhan dan aspirasi warga desa, sehingga diharapkan mampu merancang program pembangunan yang tepat dan bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kalurahan juga berfungsi sebagai jembatan antara warga dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Melalui jalur ini, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, kritik, dan kebutuhan kepada Pemerintah Kalurahan. Hubungan yang baik antara pemerintah kalurahan dan masyarakat diyakini akan menciptakan kolaborasi yang sinergis dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kalurahan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan, melaksanakan pembangunan, serta menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari pemerintahan nasional, peran Pemerintah Kalurahan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 127 tentang hak-hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi, termasuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, serta mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam.

Terdapat empat prinsip utama dalam administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia, yaitu: penetapan kebijakan umum, kepemimpinan, pengawasan, dan koordinasi. Prinsip-prinsip ini berlaku di seluruh tingkat pemerintahan, termasuk pada level kalurahan. Sebagai unit pemerintahan yang paling bawah, pemerintah desa juga menjalankan tiga fungsi inti: memberikan layanan kepada masyarakat, mengelola pembangunan, serta menjalankan fungsi administrasi atau pencatatan (Moedy, 2023).

Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan optimal, dibutuhkan aparatur kalurahan yang kompeten dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Kepala Desa dan jajarannya perlu terus meningkatkan kapasitas serta kemampuan mereka dalam mengelola organisasi pemerintahan, termasuk pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan.

Sebagai institusi pemerintahan paling dasar, pemerintah kalurahan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang otonomi desa, tata kelola pemerintahan desa, dan pembangunan desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam pengambilan kebijakan, pemerintah kalurahan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan wilayah desa. Kebijakan yang tepat dan implementatif akan mendorong partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa. Oleh karena itu, kepemimpinan Kepala Desa yang efektif sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintahan kalurahan. Dalam kerangka *good governance*, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi harus menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan kalurahan. Pemerintah kalurahan dituntut untuk membuka akses informasi seluas-luasnya serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, pemerintah kalurahan bukan hanya sekadar penyelenggara administrasi, melainkan juga mitra aktif masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama (Natalia, 2022).

3. Masyarakat

Kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab "syaraka" yang mengandung arti berpartisipasi atau turut ambil bagian, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "society", yang berasal dari kata Latin "socius" yang berarti teman atau sahabat. Masyarakat dapat dipahami sebagai sekelompok individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu, saling berinteraksi, serta berbagi nilai dan norma yang sama. Durkheim mengartikan masyarakat sebagai jaringan hubungan sosial yang saling berkaitan dan dibentuk oleh individu-individu yang hidup dalam komunitas bersama. Sementara itu, Max Weber melihat masyarakat sebagai kelompok orang yang memiliki hubungan sosial yang tersusun dan terorganisir, dengan penekanan bahwa tindakan sosial mereka dipengaruhi oleh makna yang diberikan dalam setiap interaksi. Parsons, di sisi lain, memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai elemen yang saling

berhubungan, di mana setiap elemen memiliki fungsi tertentu dalam menjaga stabilitas keseluruhan sistem.

Masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis dengan karakteristik yang berbeda, seperti masyarakat tradisional, modern, dan multikultural. Masyarakat tradisional biasanya dikenal karena sifat konservatifnya yang kuat dalam mempertahankan nilai, norma, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Jenis masyarakat ini cenderung memiliki struktur sosial yang bersifat hierarkis, dengan pembagian peran yang tegas di dalam komunitasnya. Sebaliknya, masyarakat modern mengalami perubahan besar sebagai akibat dari proses urbanisasi, industrialisasi, dan pengaruh globalisasi. Perubahan-perubahan tersebut memengaruhi tatanan sosial dan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat modern. Kemajuan teknologi dan keterhubungan global telah mengubah cara individu berkomunikasi, bekerja, dan menjalin relasi sosial. Oleh karena itu, masyarakat modern sering kali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara pelestarian tradisi dan penerimaan terhadap inovasi, serta antara kebutuhan personal dan tuntutan sosial yang terus berkembang di era kontemporer.

Masyarakat memiliki beragam ciri yang menggambarkan kompleksitasnya. Struktur sosial, termasuk kelas sosial, kelompok, dan organisasi, merupakan salah satu aspek utama dalam membentuk masyarakat. Kelas sosial mencerminkan stratifikasi sosial yang ada berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan, pekerjaan, dan status sosial. Selain struktur sosial, budaya juga memainkan peran penting

dalam menentukan identitas masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang diamalkan oleh anggota masyarakat membentuk landasan bagi interaksi sosial yang terjalin. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat, serta norma-norma yang menjadi pedoman perilaku, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kolektif masyarakat yang memengaruhi cara individu berinteraksi sosial.

Faktor-faktor tertentu memiliki peran signifikan dalam menyebabkan perubahan dalam masyarakat modern, di antaranya adalah globalisasi, teknologi, dan urbanisasi (Wulandari, 2020). Globalisasi, sebagai fenomena yang menghubungkan berbagai negara dan budaya secara ekonomi, sosial, dan politik, memiliki dampak yang kompleks terhadap budaya lokal dan interaksi sosial. Hal ini dapat mengakibatkan tercampurnya elemen-elemen budaya lokal dengan budaya global, yang pada satu sisi dapat memperkaya keanekaragaman budaya, namun pada sisi lain juga dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga identitas dan keberlangsungan budaya lokal yang autentik. Interaksi sosial juga menjadi semakin kompleks dengan adanya pengaruh globalisasi yang memperluas wawasan masyarakat terhadap berbagai pemikiran dan praktik dari belahan dunia lain.

Selain globalisasi, kemajuan teknologi juga menjadi faktor utama yang mendobrak cara-cara tradisional dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara individu berhubungan satu sama lain, baik dalam skala lokal maupun global. Teknologi memungkinkan terciptanya ruang virtual di mana individu dapat berinteraksi tanpa

terbatas oleh batasan geografis. Namun, kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif, seperti isolasi sosial dan kurangnya keterlibatan dalam interaksi langsung di kehidupan sehari-hari.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat di Kalurahan Guwosari. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti berusaha menggali informasi secara mendalam terkait pola interaksi, komunikasi, serta keterlibatan warga dalam proses pemerintahan desa. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami sudut pandang masyarakat serta cara mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan desa merupakan unsur krusial dalam membangun transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan antara warga dan aparat desa. Ginting et al. (2024) mengemukakan bahwa tingkat partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan desa dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat serta latar belakang pendidikan. Sementara itu, studi oleh Yuliandari et al. (2022) menyoroti bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti ketersediaan kesempatan, kemauan untuk terlibat, keterbukaan informasi, serta komitmen dari kedua belah pihak—masyarakat dan pemerintah desa. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek struktural

pemerintahan desa, tetapi juga memperhatikan dinamika hubungan sosial yang terbangun di antara keduanya.

2. Unit Analisis

a) Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi sumber utama data dalam studi ini. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih rinci dan relevan dari responden yang memiliki karakteristik khusus sesuai dengan fokus penelitian. Adapun informan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Informan

No.	Nama	Usia	Posisi/Jabatan
1.	Umar Wanto	47 Tahun	Ulu-Ulu
2.	Sukatno	45 Tahun	Bamuskal
3.	Yoga Pradana	34 Tahun	Dukuh
4.	Gumiyah	42 Tahun	Kader Puskesmas
5.	Sujatmiko	43 Tahun	Ketua RW
6.	Jaka Pranomo	40 Tahun	Ketua Blok
7.	Tanto	43 Tahun	Masyarakat
8.	Rusmiati	40 Tahun	Masyarakat
9.	Eka Wahyuni	40 Tahun	Masyarakat
10.	Nanang Syaifudin	27 Tahun	Karang Taruna
11.	Muhammad Ibnu Maulana	24 Tahun	Karang Taruna
12.	Febry Kurniawan	20 Tahun	Karang Taruna
13.	Dicky Saputra	20 Tahun	Karang Taruna

(Sumber : Data Lapangan Peneliti Tahun 2025)

b) Objek Penelitian

Objek penelitian mengacu pada topik utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu Relasi Pemerintah Kalurahan Dengan Masyarakat di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan aspek penting dalam penelitian karena menentukan validitas dan reliabilitas hasil yang diperoleh. Dalam penelitian tentang relasi Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat di Kalurahan Guwosari teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif. Observasi memungkinkan peneliti mengamati langsung interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat, wawancara memberikan wawasan mendalam dari para informan, sementara dokumentasi mendukung dengan bukti tertulis yang dapat diverifikasi. Teknik-teknik ini telah dikembangkan oleh berbagai ahli penelitian sosial. Salah satu tokoh yang berperan dalam mencetuskan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah John Dewey (2011). Dewey menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam memahami fenomena sosial. Ia percaya bahwa penelitian harus bersifat empiris dan berbasis pada pengalaman nyata, sehingga observasi menjadi teknik utama dalam mengumpulkan data secara langsung. Wawancara digunakan untuk memahami perspektif individu secara lebih mendalam, sedangkan dokumentasi berperan dalam menguatkan

temuan penelitian dengan bukti tertulis. Berikut ini adalah penjelasan tentang teknik-teknik pengumpulan data tersebut:

a. Observasi (*Observation*)

Menurut Sugiyono (2017), observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi fokus penelitian guna memperoleh informasi yang sesuai. Dalam penelitian ini, observasi dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat Kalurahan Guwosari terjalin dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui aktivitas resmi maupun interaksi nonformal. Proses penelitian dilakukan dengan mengamati dinamika interaksi antara aparatur desa dan masyarakat dalam berbagai forum, seperti rapat musyawarah dan kemudian mencatat temuan-temuan yang relevan dengan tujuan studi ini.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari berhasil menerapkan pendekatan inklusif dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai forum seperti musyawarah kalurahan dan jaring aspirasi. Sosialisasi program pembangunan dilakukan secara inklusif melalui media komunikasi digital, dan penyelesaian konflik dilakukan dengan cepat melalui mediasi pemerintah setempat, terutama peran dukuh sebagai mediator. Komunikasi efektif antara pemerintah desa dan masyarakat serta keterlibatan

dukuh dan lurah menjadi kunci dalam menjaga hubungan yang harmonis.

b. Wawancara (*Interview*)

Menurut Moleong (2019), wawancara adalah proses interaksi komunikasi antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai suatu fenomena. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara sebagai proses interaksi komunikasi antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai relasi yang terjalin di Kalurahan Guwosari. Pertama, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terbuka agar responden dapat memberikan jawaban yang luas dan mendalam. Selanjutnya, peneliti memilih informan yang dianggap relevan, seperti Ulu-Ulu Kalurahan Guwosari, Duku, Bamuskal, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif agar informan merasa bebas untuk mengungkapkan pandangan dan pengalaman mereka. Peneliti mencatat dan merekam percakapan untuk memastikan data yang diperoleh lengkap dan akurat. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti menganalisis informasi tersebut dengan menggali tema-tema penting yang muncul dari jawaban informan, kemudian menyusun laporan yang memuat temuan dan kesimpulan penelitian. Dengan cara ini, penelitian berhasil memperoleh

pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai relasi sosial di Kalurahan Guwosari berdasarkan pandangan perangkat desa dan masyarakat setempat.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pencarian dan pengkajian dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai kebijakan, program kerja, dan bentuk komunikasi yang terjadi antara pemerintah desa dan masyarakat di Kalurahan Guwosari. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi desa, laporan kegiatan, foto-foto, serta catatan administratif yang dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang relasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses sistematis untuk mengolah, menginterpretasikan, dan memahami data yang telah dikumpulkan guna menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles & Huberman (1994), teknik ini memungkinkan peneliti memahami relasi antara pemerintah desa dan masyarakat secara lebih sistematis. Proses yang berlangsung secara interaktif dan berulang memastikan bahwa kesimpulan yang diambil akurat serta mencerminkan realitas yang ada di lapangan. Teknik analisis data model Miles & Huberman yang terdiri dari tiga

tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan lebih lanjut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk menyederhanakan, memilih, dan memusatkan perhatian pada data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi untuk menyoroti aspek-aspek yang relevan dengan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pada tahap ini, peneliti mengorganisasi data ke dalam beberapa kategori, seperti keterlibatan masyarakat, komunikasi pemerintahan, layanan publik, dan kebijakan desa. Data yang dianggap tidak relevan atau berulang disingkirkan agar proses analisis menjadi lebih terarah dan mendalam terhadap pokok permasalahan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data, di mana data yang telah disaring disusun dalam bentuk yang lebih terstruktur agar mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan pola komunikasi dan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan penyajian yang sistematis, peneliti dapat melihat hubungan antarvariabel secara lebih jelas dan menemukan pola-pola yang muncul dari data lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam teknik analisis data ini adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menemukan makna serta hubungan antara temuan di lapangan dengan teori yang digunakan. Kesimpulan yang diambil didasarkan pada pola yang ditemukan dalam hubungan pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan, peneliti melakukan verifikasi dengan membandingkan hasil analisis dengan sumber data lain atau teori pendukung (Arikunto, 2010).

BAB II

PROFIL KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

A. Sejarah Kalurahan Guwosari

Kalurahan Guwosari terbentuk melalui penggabungan dua wilayah, yakni Selarong dan Iroyudan, sesuai dengan arahan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Oktober 1947. Nama "Guwosari" dipilih sebagai hasil kompromi agar diterima oleh seluruh warga tanpa menghapus identitas lokal, yang erat kaitannya dengan Gua Selarong atau Gua Secang. Penggunaan nama Guwosari menjadi solusi alternatif bagi kawasan yang dahulu dikenal dengan nama Selarong, mengingat dalam konteks sejarah Perang Jawa, Selarong merujuk pada wilayah yang mencakup seluruh area Guwosari saat ini dan desa-desa sekitarnya. Asal-usul dan riwayat Desa Selarong masih diingat jelas oleh Trah Demang Joyosentono, keturunan Pangeran Aryo Selarong, tokoh yang namanya digunakan sebagai nama desa tersebut. Selain itu, terdapat juga garis keturunan dari Pangeran Bumidirjo, saudara tiri dari Pangeran Aryo Selarong.

Sementara itu, asal nama "Iroyudan" belum memiliki kesepakatan yang pasti. Masyarakat umumnya meyakini bahwa nama tersebut berasal dari tokoh Kyai Ageng Wiroyudo, seorang panglima besar pada masa Sultan Hamengkubuwono I serta kakek dari istri permaisuri sang Sultan. Namun, dalam peta-peta kuno yang menggambarkan wilayah saat Perang Jawa, tidak ditemukan nama Iroyudan, sehingga besar kemungkinan

bahwa wilayah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari Selarong hingga akhir perang. Nama Selarong sendiri berasal dari Pangeran Aryo Selarong, anak dari Prabu Hanyokrowati atau Pangeran Sedo Krapyak—raja kedua Kasultanan Mataram dari istri permaisuri pertamanya, Ratu Tulung Ayu. Nama asli dari Pangeran Aryo Selarong belum dapat dipastikan, apakah RM. Wuryah atau RM. Chakra, karena keduanya menggunakan gelar yang sama, dan kemungkinan besar merujuk pada orang yang sama.

Sebagai putra dari permaisuri utama, Pangeran Aryo Selarong sejatinya berhak atas tahta, namun ia menyerahkan hak itu kepada adiknya, RM. Rangsang (kemudian dikenal sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo). Ia kemudian mendedikasikan dirinya untuk kejayaan Mataram melalui bidang keagamaan dan militer, termasuk dalam menaklukkan wilayah Jember dan Pasuruan. Ketika kekuasaan berpindah ke Amangkurat I, ia memilih menentang kepemimpinan tersebut karena dinilai bertentangan dengan nilai agama dan berlaku sewenang-wenang. Pangeran Aryo Selarong pun keluar dari lingkungan keraton dan menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Selarong, di mana ia mendirikan pesantren dan menjadi pemimpin wilayah tersebut, yang kemudian diteruskan oleh keturunannya. Ia wafat pada tahun 1669 setelah dibunuh oleh pasukan rahasia Prabu Amangkurat I di wilayah Bareng, Kuwel, Delanggu. Peristiwa ini tercatat dalam berbagai sumber, seperti *Babad Momana*, laporan Rijklof van Goens kepada Gubernur Jenderal Joan Maetsuicker di Batavia, serta karya sejarawan Belanda, Hermanus Johannes de Graaf. Sebagai bentuk penghormatan, wilayah tempat

tinggalnya dinamakan Selarong dan kepemimpinan diteruskan secara turun-temurun oleh keluarganya, yaitu :

1. Panembahan Aryo Selarong II (Raden Mas Abdullah).
2. Panembahan Aryo Selarong III (Raden Mas Wongsokoro).
3. Kenthol Resoboyo.
4. Kenthol Soboyo.
5. Kenthol Wongsomenggolo.
6. Kenthol Ongkojoyo.
7. Raden Joyosentono (Demang).

Menjelang akhir Perang Jawa tahun 1830, wilayah kekuasaan Desa Selarong diyakini sangat luas, mencakup kawasan Pegunungan Selarong dan wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Iroyudan. Setelah perang usai, terjadi reorganisasi wilayah yang menyebabkan batas Desa Selarong dipersempit menjadi delapan dusun seperti saat ini. Area lain yang kini menjadi bagian dari Kalurahan Guwosari dipisahkan dan berdiri sebagai Desa Iroyudan. Pada masa Perang Jawa, penduduk Selarong, termasuk Iroyudan, merupakan kelompok pendukung utama perjuangan Pangeran Diponegoro. Nama Raden Joyosentono disebutkan sebanyak sembilan kali dalam Babad Dipanegara Manadho, menunjukkan kedekatannya dengan sang pangeran serta tiga panglima utamanya: Ali Basah Abdul Kamil, Ali Basah Senthot Prawirodirjo, dan Ali Basah Abdul Latif (Kerto Pengalasan).

Usai Perang Jawa, Kasultanan Yogyakarta melakukan pembagian administratif, termasuk pembentukan Kabupaten Bantul dan penetapan wilayah di dalamnya. Diduga, pada saat itulah Selarong dan Iroyudan

ditetapkan sebagai desa yang masing-masing dipimpin oleh seorang demang. Raden Joyosentono diangkat sebagai demang Selarong dan diteruskan oleh keturunannya, seperti Demang Atmorejo, Demang Atmosentono, dan Demang Kertosentono. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut dipimpin oleh Kenthol Ongkojoyo, tokoh lokal pendukung setia Pangeran Diponegoro. Ia dan warga Selarong meyakini bahwa suatu hari Pangeran Diponegoro akan kembali mendirikan kerajaan baru yang berpusat di Selarong, mencakup wilayah antara Kali Progo dan Kali Opak. Peran Kenthol Ongkojoyo dalam pembentukan Kabupaten Bantul sangat penting, hingga akhirnya ia dimakamkan di Bantul Karang, pusat pemerintahan awal kabupaten tersebut.

Keyakinan tersebut muncul karena status hukum Pangeran Diponegoro belum ditetapkan sebagai tahanan negara hingga tahun 1839. Tidak seperti yang banyak ditulis dalam buku sejarah, menurut *Babad Dipanegara Manadho*, Pangeran Diponegoro tidak ditangkap, melainkan sedang menunggu realisasi janji Van den Bosch terkait tuntutanannya. Keberangkatannya ke Manado dianggap sebagai upaya menghindari perang lanjutan sambil menanti hasil diplomasi. Namun, karena tidak kunjung kembali, wilayah Selarong dan Iroyudan kemudian melanjutkan fungsi administratifnya masing-masing sebagai kademangan. Semangat perjuangan Pangeran Diponegoro tetap membekas dalam jiwa masyarakat kedua wilayah ini. Status sebagai kademangan berakhir pada tahun 1914, saat Kasultanan Yogyakarta kembali menata wilayah dan sistem penguasaan tanah.

Pada masa tersebut, konsep desa atau kalurahan diperkenalkan, lahan dibagikan kepada warga, dan sistem pajak diubah dari sistem natura atau bagi hasil menjadi sistem uang. Desa Selarong secara resmi dibentuk dengan pusat pemerintahan di rumah Raden Joyosentono di Pedukuhan Gandekan, meliputi delapan pedukuhan: Gandekan, Dukuh, Kentholan Kidul, Kentholan Lor, Kembangputihan, Pringgading, Bungsing, dan Watu Gedug. Sementara itu, Desa Iroyudan berpusat di Pedukuhan Iroyudan, yang mencakup Kadisono, Karangber, Santan, Kalakijo, Kedung, dan Kembang Gede. Kepala desa yang sebelumnya bergelar demang kini digantikan oleh lurah dan tidak lagi berdasarkan garis keturunan. Kemudian, pada tahun 1947, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menginstruksikan penggabungan beberapa desa di wilayah Kasultanan. Pada Oktober tahun tersebut, Desa Selarong dan Desa Iroyudan resmi bergabung menjadi satu kesatuan baru dengan nama Desa Guwosari. Lurah pertama yang menjabat sejak 1946 hingga 1961 adalah Sukrowardi. Setelah itu, jabatan lurah dipegang oleh Ngumar hingga 1988, kemudian oleh Budiman sebagai penjabat sementara antara tahun 1988–1992. Pada tahun 1992, diadakan pemilihan lurah secara langsung, dan terpilihlah M. Daim Raharjo yang menjabat hingga tahun 1995.

B. Kondisi Geografis

Kalurahan Guwosari merupakan bagian dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari 79 kalurahan. Guwosari berada di wilayah administratif Kapanewon Pajangan dengan luas wilayah mencapai 830 hektar dan jumlah penduduk lebih dari 14.000 jiwa. Kalurahan ini memiliki akses yang baik dan terhubung dengan kawasan

sekitar melalui jaringan transportasi darat. Dari sisi topografi, wilayah Guwosari terletak pada ketinggian sekitar 120 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata sebesar 200,30 mm dan suhu rata-rata harian sekitar 26°C. Secara administratif, Kalurahan Guwosari berada di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Batas Wilayah Kalurahan Guwosari

Sebelah Utara	:	Kalurahan Bangunjiwo
Sebelah Timur	:	Kalurahan Ringinharjo
Sebelah Selatan	:	Kalurahan Wijirejo dan Sendangsari
Sebelah Barat	:	Kalurahan Sendangsari

(Sumber : Profil Kalurahan Guwosari Tahun 2023)

Berdasarkan data pada tabel di atas, Kalurahan Guwosari memiliki batas wilayah yang strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa kalurahan di sekelilingnya. Di sebelah utara, Guwosari berbatasan dengan Kalurahan Bangunjiwo, yang dapat terhubung langsung dengan pusat Kabupaten Bantul atau bahkan Kota Yogyakarta, sehingga memberikan kemudahan akses dan konektivitas. Sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Ringinharjo, yang menunjukkan potensi hubungan sosial dan ekonomi yang erat dengan wilayah-wilayah yang lebih padat penduduk. Di sisi selatan, Guwosari berbatasan dengan dua kalurahan sekaligus, yaitu Wijirejo dan Sendangsari, yang menunjukkan bahwa bagian selatan wilayah ini cukup luas dan kompleks. Sementara itu, di sebelah barat, Guwosari kembali berbatasan dengan Kalurahan Sendangsari, yang menunjukkan bahwa wilayah Sendangsari cukup besar atau memiliki bentuk yang mengelilingi sebagian wilayah Guwosari. Keberadaan banyak batas wilayah ini menjadikan Guwosari sebagai wilayah yang

sentral dan potensial dalam pengembangan sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Namun demikian, kondisi ini juga menuntut koordinasi antarwilayah yang baik, terutama dalam hal perencanaan tata ruang, pembangunan, dan pelayanan publik, agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan atau konflik batas wilayah.

Kalurahan Guwosari secara administratif pemerintahan terbagi dalam 15 padukuhan dan 79 RT sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Padukuhan Kalurahan Guwosari

No.	Padukuhan	Jumlah RT	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Kembangputihan	6	73,90	8,90%
2.	Kentolan Lor	6	20,14	2,43%
3.	Kentolan Kidul	4	32,53	3,92%
4.	Gandekan	5	21,53	2,59%
5.	Dukuh	6	40,32	4,86%
6.	Iroyudan	6	63,13	7,61%
7.	Kadisono	4	35,27	4,25%
8.	Kembanggede	4	30,35	3,66%
9.	Karangber	4	14,43	1,74%
10.	Santan	4	14,53	1,75%
11.	Kalakijo	6	32,32	3,89%
12.	Kedung	4	71,40	8,60%
13.	Bungsing	4	79,25	9,55%
14.	Watugedug	6	145,90	17,58%
15.	Pringgading	10	155,00	18,67%
	JUMLAH	79	830,00	100%

(Sumber : Profil Kalurahan Guwosari Tahun 2023)

Berdasarkan data sebaran padukuhan di Kalurahan Guwosari, terdapat 15 padukuhan dengan total luas wilayah mencapai 830 hektar dan total 79 Rukun Tetangga (RT). Padukuhan dengan luas wilayah terbesar adalah Pringgading, seluas 155 hektar atau 18,67% dari total luas

Kalurahan, disusul oleh Watugedug dengan 145,9 hektar (17,58%) dan Bungsing dengan 79,25 hektar (9,55%). Sementara itu, padukuhan dengan luas terkecil adalah Karangber dan Santan yang masing-masing hanya mencakup sekitar 1,74% dan 1,75% dari total wilayah. Meskipun Pringgading merupakan padukuhan dengan jumlah RT terbanyak (10 RT), padukuhan lainnya umumnya memiliki 4 hingga 6 RT, menandakan distribusi kependudukan yang relatif merata meskipun luas wilayah berbeda-beda. Dominasi luas wilayah oleh beberapa padukuhan besar seperti Pringgading dan Watugedug menunjukkan adanya potensi sumber daya atau lahan yang besar di wilayah tersebut, yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian, permukiman, atau pengembangan lainnya. Di sisi lain, padukuhan yang memiliki wilayah kecil namun jumlah RT yang relatif banyak, seperti Gandekan dan Kentolan Lor, kemungkinan memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, distribusi luas dan jumlah RT ini menunjukkan variasi karakteristik antar padukuhan di Kalurahan Guwosari yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.

C. Kondisi Demografis

1. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data administrasi kependudukan tahun 2023, jumlah penduduk Kalurahan Guwosari tercatat sebanyak 13.778 jiwa, yang terdiri dari 6.920 laki-laki dan 6.858 perempuan. Rincian data kependudukan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelompok	Jumlah	
		n	%
1	Laki-laki	6.920	50,22%
2	Perempuan	6.858	49,78%
	JUMLAH	13.778	100,00%
	TOTAL	13.778	100,00%

(Sumber : Profil Kalurahan Guwosari Tahun 2023)

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah total penduduk Kalurahan Guwosari tercatat sebanyak 13.778 jiwa, dengan rincian 6.920 jiwa laki-laki dan 6.858 jiwa perempuan. Persentase penduduk laki-laki mencapai 50,22% dari keseluruhan populasi, sementara penduduk perempuan sebesar 49,78%. Meskipun jumlah laki-laki sedikit lebih banyak, selisihnya tergolong kecil. Data ini mencerminkan kondisi yang cukup seimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kalurahan Guwosari.

2. Data Penduduk Berdasarkan Usia

Data penduduk Kalurahan Guwosari berikut disajikan berdasarkan pengelompokan menurut rentang usia, yaitu ;

Tabel 2.4 Data Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	Dibawah 1 Tahun	64	0,46%	33	0,24%	31	0,22%
2	2-4 Tahun	257	1,86%	139	1,01%	118	0,86%
3	5-9 Tahun	719	5,22%	374	2,71%	345	2,50%
4	10-14 Tahun	882	6,40%	462	3,35%	420	3,05%
5	15-19 Tahun	934	6,78%	473	3,43%	461	3,34%
6	20-24 Tahun	959	6,96%	487	3,53%	472	3,42%
7	25-29 Tahun	988	7,17%	473	3,43%	461	3,34%
8	30-34 Tahun	972	7,05%	471	3,42%	501	3,64%
9	35-39 Tahun	1.010	7,33%	471	3,42%	539	3,91%
10	40-44 Tahun	1.184	8,59%	593	4,30%	591	4,29%
11	45-49 Tahun	1.150	8,34%	615	4,46%	535	3,88%
12	50-54 Tahun	1.002	7,27%	515	3,74%	487	3,53%
13	55-59 Tahun	1.007	7,31%	522	3,79%	485	3,52%
14	60-64 Tahun	760	5,51%	389	2,82%	371	2,69%
15	65-69 Tahun	668	4,85%	344	2,50%	324	2,35%
16	70-74 Tahun	389	2,82%	191	1,39%	198	1,44%
17	Diatas 75 Tahun	834	6,05%	369	2,68%	465	3,37%
18	0-18 Tahun	2.682	19,46%	1.394	10,11%	1.288	9,35%
	JUMLAH	16.461	119,44%	8.315	60,33%	8.146	59,11%
	BELUM MENGISI	-2679	-19,44%	-1.393	-10,11%	-1.286	-9,33%
	TOTAL	13.782	100,00%	6.922	50,22%	6.860	49,78%

(Sumber : Profil Kalurahan Guwosari Tahun 2023)

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa kelompok usia 0-18 tahun merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbesar, menyumbang 19,46% dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa Kalurahan Guwosari memiliki populasi yang relatif muda, dengan proporsi penduduk usia produktif cukup tinggi. Meskipun demikian, terdapat juga perhatian terhadap kelompok usia lanjut dengan proporsi terendah pada kelompok usia 70-74 tahun. Dari aspek gender, meskipun jumlah penduduk laki-laki (50,22%) sedikit lebih tinggi daripada

perempuan (49,78%), perbedaan ini tidak terlalu signifikan. Kemudian dapat diketahui bahwa kelompok usia 40-44 tahun memiliki proporsi penduduk tertinggi setelah kelompok usia 0-18 tahun, sementara kelompok usia 70-74 tahun memiliki proporsi terendah. Implikasi dari struktur usia penduduk ini adalah pentingnya penyesuaian kebijakan pembangunan dan program-program kesehatan serta pendidikan yang mendukung perkembangan masyarakat Kalurahan Guwosari sesuai dengan karakteristik demografi yang ada.

3. Data Penduduk Berdasarkan Agama

Berikut merupakan data penduduk Kalurahan Guwosari yang diklasifikasikan menurut agama yang dianut, yaitu :

Tabel 2.5 Data Penduduk Berdasarkan Agama

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	N	%	N	%
1	Islam	13.142	95,36%	6.601	47,90%	6.541	47,46%
2	Kristen	207	1,50%	111	0,81%	96	0,70%
3	Khatolik	322	2,34%	155	1,12%	167	1,21%
4	Hindu	2	0,01%	1	0,01%	1	0,01%
5	Budha	5	0,04%	4	0,03%	1	0,01%
6	Konghucu	3	0,2%	1	0,01%	2	0,01%
7	Kepercayaan terhadap TYME/Lainnya	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
	JUMLAH	13.682	99,27%	6.874	49,88%	6.808	49,40%
	BELUM MENGISI	100	0,73%	48	0,35%	52	0,38%
	TOTAL	13.782	100,00%	6.922	50,22%	6.860	49,78%

(Sumber : Profil Kalurahan Guwosari Tahun 2023)

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kalurahan Guwosari menganut agama Islam, dengan persentase mencapai 95,36%. Kemudian disusul oleh penganut

agama Kristen sebanyak 1,50% dan agama Katolik sebanyak 2,34%. Meskipun demikian, terdapat pula minoritas yang menganut agama Hindu, Budha, Konghucu, serta kepercayaan terhadap TYME/Lainnya dengan persentase yang sangat kecil. Distribusi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam setiap agama cenderung seimbang, meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam persentase antara laki-laki dan perempuan di beberapa agama. Data mengenai distribusi agama di Kalurahan Guwosari ini memberikan gambaran yang penting dalam menganalisis keragaman agama dan toleransi antaragama. Informasi ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi aspek sosial, budaya, serta potensi konflik agama yang relevan dengan struktur demografi dan agama di Kalurahan Guwosari, membantu dalam merencanakan kebijakan yang inklusif dan memperkuat harmoni antaragama dalam masyarakat.

4. Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Berikut ini adalah data penduduk Kalurahan Guwosari yang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu:

Tabel 2.6 Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Kelompok	Jumlah Jiwa
1	TKK	450
2	SD/Sederajat	2.873
3	SLTP/ Sederajat	2.137
4	SLTA/ Sederajat	3.292
5	D-1	53
6	D-2	50
7	D-3	241
8	S-1	628
9	S-2	53
10	S-3	5
	JUMLAH	9.782

(Sumber : Profil Kalurahan Guwosari Tahun 2023)

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk memiliki pendidikan setara Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dengan jumlah 2.873 jiwa, diikuti oleh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dengan jumlah 2.137 jiwa. Selanjutnya, terdapat jumlah penduduk yang memiliki pendidikan tinggi seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebanyak 3.292 jiwa dan Sarjana Sains (S-1) sebanyak 628 jiwa. Meskipun jumlah penduduk dengan pendidikan tinggi seperti S-2 dan S-3 relatif kecil, hal ini menunjukkan adanya keragaman tingkat pendidikan di Kalurahan Guwosari. Data ini memberikan gambaran yang penting untuk melihat tingkat pendidikan dan kualifikasi sumber daya manusia di Kalurahan Guwosari, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

5. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Berikut ini merupakan data penduduk Kalurahan Guwosari yang diklasifikasikan berdasarkan jenis pekerjaan, yaitu :

Tabel 2.7 Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum/Tidak Bekerja	2547	18,48%	1.294	9,39%	1.253	9,09%
2	Mengurus R. Tangga	1.332	9,66%	204	1,48%	1.128	8,18%
3	Pelajar/Mahasiswa	2.256	16,37%	1.125	8,16%	1.131	8,20%
4	Pensiunan	143	1,04%	96	0,70%	47	0,34%
5	PNS	281	2,04%	164	1,19%	117	0,85%
6	TNI	25	0,18%	21	0,15%	4	0,03%
7	POLRI	50	0,36%	42	0,30%	8	0,06%
8	Perdagangan	75	0,54%	38	0,28%	37	0,27%

9	Petani/Pekebun	476	3,45%	219	1,59%	257	1,86%
10	Peternak	14	0,10%	11	0,08%	3	0,02%
11	Nelayan/Perikanan	4	0,03%	2	0,01%	2	0,01%
12	Industri	2	0,01%	1	0,01%	1	0,01%
13	Transportasi	5	0,04%	4	0,03%	1	0,01%
14	Karyawan Swasta	1.261	9,15%	738	5,35%	523	3,79%
15	Karyawan BUMN	12	0,09%	11	0,08%	1	0,01%
16	Karyawan BUMD	9	0,07%	6	0,04%	3	0,02%
17	Karyawan Honore	23	0,17%	17	0,12%	6	0,04%
18	Buruh Harian Lepas	3.187	23,12%	1.834	13,30%	1.353	9,82%
19	Buruh Tani/Perkebunan	469	3,40%	250	1,81%	219	1,59%
20	Buruh Nelayan	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
21	Buruh Peternakan	3	0,02%	3	0,02%	0	0,00%
22	Pembantu R. Tangga	36	0,26%	15	0,11%	21	0,15%
23	Tukang Batu	82	0,59%	36	0,26%	46	0,33%
24	Tukang Kayu	27	0,20%	17	0,12%	10	0,07%
25	Tukang Las	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
26	Tukang Jahit	9	0,07%	1	0,01%	8	0,06%
27	Penata Rias	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
28	Mekanik	11	0,08%	6	0,04%	5	0,04%
29	Seniman	10	0,07%	7	0,05%	3	0,02%
30	Tabib	4	0,03%	0	0,00%	4	0,03%
31	Paraji	22	0,16%	12	0,09%	10	0,07%
32	Pendeta	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
33	Wartawan	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
34	Dosen	11	0,08%	6	0,04%	5	0,04%
35	Guru	97	0,70%	34	0,25%	63	0,46%
36	Pengacara	3	0,02%	3	0,02%	0	0,00%
37	Konsultan	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
38	Dokter	4	0,03%	3	0,02%	1	0,01%
39	Bidan	8	0,06%	1	0,01%	7	0,05%
40	Perawat	24	0,17%	5	0,04%	19	0,14%
41	Apoteker	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
42	Pelaut	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
43	Peneliti	2	0,01%	2	0,01%	0	0,00%
44	Sopir	11	0,08%	11	0,08%	0	0,00%
45	Pedagang	29	0,21%	9	0,07%	20	0,15%
46	Perangkat Desa	24	0,17%	20	0,015%	4	0,03%
47	Kepala Desa	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%

48	Wiraswasta	1.147	8,32%	633	4,59%	514	3,73%
49	Lainnya	29	0,21%	11	0,08%	18	0,13%
	JUMLAH	13.773	99,91%	6.918	50,18%	6.855	49,73%
	BELUM MENGISI	12	0,09%	5	0,04%	7	0,05%
	TOTAL	13.785	100,00%	6.923	50,22%	6.862	49,78%

(Sumber : Profil Kalurahan Guwosari Tahun 2023)

Berdasarkan data klasifikasi penduduk Kalurahan Guwosari berdasarkan jenis pekerjaan, total jumlah penduduk adalah 13.785 jiwa, terdiri dari 6.923 laki-laki (50,22%) dan 6.862 perempuan (49,78%). Kelompok penduduk terbesar adalah buruh harian lepas, berjumlah 3.187 jiwa (23,12%), disusul oleh penduduk yang belum atau tidak bekerja sebanyak 2.547 jiwa (18,48%), dan pelajar/mahasiswa sebanyak 2.256 jiwa (16,37%). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia non-produktif atau bekerja di sektor informal dan tidak tetap. Penduduk yang mengurus rumah tangga juga cukup signifikan, sebanyak 1.332 jiwa (9,66%), didominasi oleh perempuan. Sementara itu, pekerjaan formal seperti pegawai negeri sipil (PNS) hanya berjumlah 281 jiwa (2,04%), dan karyawan swasta sebanyak 1.261 jiwa (9,15%). Jumlah wiraswasta mencapai 1.147 jiwa (8,32%), menunjukkan adanya peran sektor informal dan kewirausahaan di wilayah ini. Pekerjaan di sektor pertanian dan perkebunan melibatkan cukup banyak penduduk, seperti petani/pekebun (476 jiwa) dan buruh tani/perkebunan (469 jiwa). Profesi lainnya seperti TNI, POLRI, guru, tenaga kesehatan, dan profesi profesional lainnya memiliki jumlah yang relatif kecil. Sektor transportasi, jasa, dan industri juga hanya menyerap sebagian kecil tenaga kerja. Sebanyak 12 jiwa (0,09%) belum mengisi data jenis pekerjaan, yang berarti pencatatan data penduduk sudah cukup lengkap. Secara umum,

struktur pekerjaan di Kalurahan Guwosari didominasi oleh sektor informal dan pekerjaan tidak tetap, dengan keterwakilan profesi formal dan profesional yang masih terbatas. Hal ini dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya manusia ke depan.

D. Pemerintah Kalurahan Guwosari

a. Visi dan Misi Kalurahan Guwosari

Visi :

Terwujudnya Pemerintah Kalurahan Guwosari yang demokratis untuk menjadikan masyarakat Guwosari yang religius, sehat, cerdas, mandiri, dan berbudaya berbasis aset dan potensi Kalurahan.

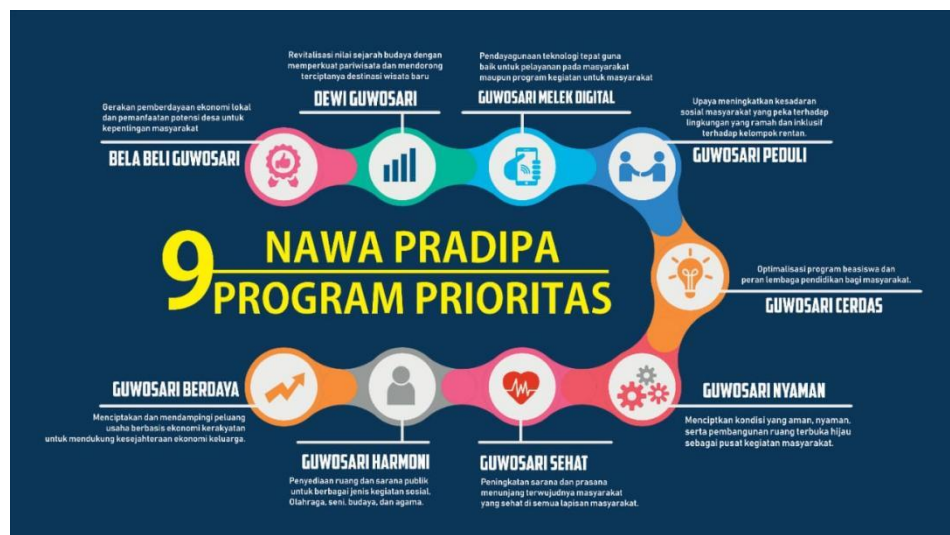
Misi :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yang profesional melalui tata kelola yang responsif dan transparan.
- 2) Menentukan kebijakan yang akan mendorong pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat Guwosari.
- 3) Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama pemerintah dan non pemerintah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata.
- 4) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya.
- 5) Mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya.

- 6) Menggali dan memberdayakan aset dan potensi Kalurahan untuk menciptakan peluang wisata dan usaha.
- 7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelompok difabel dan rentan marginal.
- 8) Mewujudkan semangat partisipasi dan kebersamaan, gotong royong, rukun serta rasa handarbeni untuk kemajuan Kalurahan Guwosari.
- 9) Mewujudkan Kalurahan siaga bencana dengan penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat kebencanaan.

Dalam melaksanakan visi misi tersebut Pemerintah Kalurahan Guwosari mempunyai pola pendekatan program melalui NAWA PRADIPA (Sembilan Program Cahaya atau Prioritas Guwosari yang tercantum pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1 Sembilan Program Cahaya atau Prioritas Guwosari



(Sumber : Web Site Kalurahan Guwosari Tahun 2025)

NAWA PRADIPA (Sembilan Program Cahaya atau Prioritas Guwosari)

1. BELA BELI GUWOSARI

Gerakan pemberdayaan ekonomi lokal dan pemanfaatan potensi desa untuk kepentingan masyarakat.

2. DEWI GUWOSARI

Revitalisasi nilai sejarah budaya dengan memperkuat pariwisata dan mendorong terciptanya destinasi wisata baru.

3. GUWOSARI MELEK DIGITAL

Pendayagunaan teknologi tepat guna baik untuk pelayanan pada masyarakat maupun program kegiatan untuk masyarakat.

4. GUWOSARI PEDULI

Upaya meningkatkan kesadaran sosial masyarakat yang peka terhadap lingkungan yang ramah dan inklusif terhadap kelompok rentan.

5. GUWOSARI CERDAS

Optimalisasi program beasiswa dan peran lembaga pendidikan bagi masyarakat.

6. GUWOSARI NYAMAN

Menciptakan kondisi yang aman, nyaman, serta pembangunan ruang terbuka hijau sebagai pusat kegiatan masyarakat.

7. GUWOSARI SEHAT

Peningkatan sarana dan prasarana menunjang terwujudnya masyarakat yang sehat di semua lapisan masyarakat.

8. GUWOSARI HARMONI

Penyediaan ruang dan sarana publik untuk berbagai jenis kegiatan sosial, olahraga, seni budaya, dan agama.

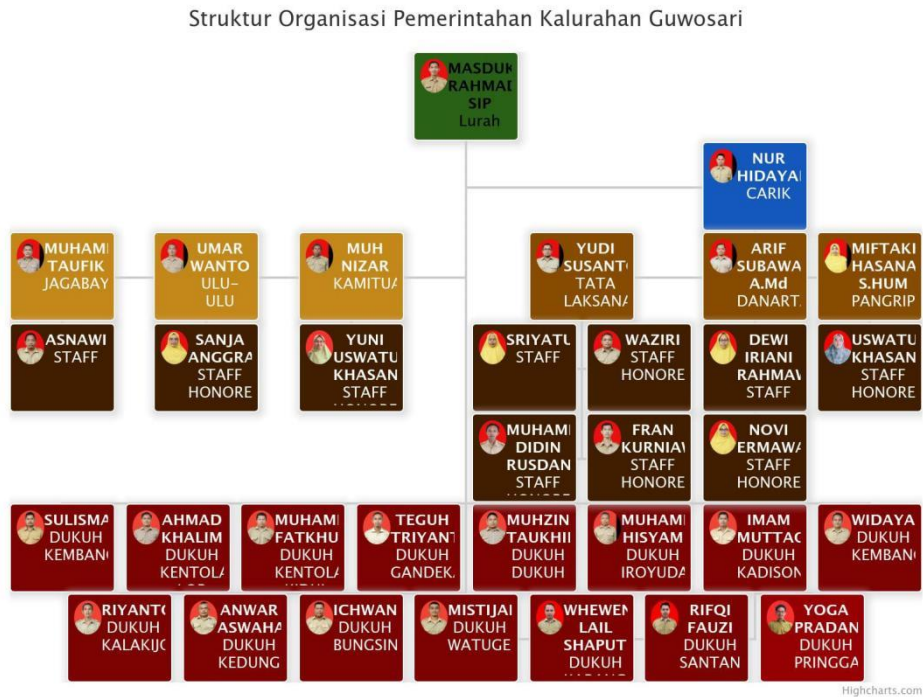
9. GUWOSARI BERDAYA

Menciptakan dan mendampingi peluang usaha berbasis ekonomi kerakyatan untuk mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga.

b. Struktur Pemerintah Kalurahan

Struktur pemerintah kalurahan Guwosari dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Guwosari



(Sumber : Web Site Kalurahan Guwosari Tahun 2025)

Tabel 2.8 Organisasi Pemerintahan Kalurahan Guwosari

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	MASDUKI RAHMAD, SIP	LAKI-LAKI	LURAH	DIPLOMA IV/STRATA I
2	NUR HIDAYAT	LAKI-LAKI	CARIK	DIPLOMA IV/STRATA I
3	MUHAMMAD TAUFIK	LAKI-LAKI	JAGABAYA	SLTA/SEDERAJAT
4	UMAR WANTO	LAKI-LAKI	ULU-ULU	SLTA/SEDERAJAT
5	MUH NIZAR	LAKI-LAKI	KAMITUA	AKADEMI/DIPLOMA III
6	MIFTAKHUL HASANAH S.HUM	PEREMPUAN	PANGRIPTA	DIPLOMA IV/STRATA I
7	ARIF SUBAWANTO, A.Md	LAKI-LAKI	DANARTA	AKADEMI/DIPLOMA III
8	YUDI SUSANTO	LAKI-LAKI	TATA LAKSANA	DIPLOMA IV/STRATA I
9	JUMARI	LAKI-LAKI	STAF	SLTA/SEDERAJAT
10	ASNAWI	LAKI-LAKI	STAF	SLTA/SEDERAJAT
11	WAZIRI	LAKI-LAKI	STAF HONORER	AKADEMI/DIPLOMA III
12	SRIYATUN	PEREMPUAN	STAF	SLTA/SEDERAJAT
13	MUHAMMAD DIDIN RUSDAN	LAKI-LAKI	STAF HONORER	SLTA/SEDERAJAT
14	SANJA ANGGRAINI	PEREMPUAN	STAF HONORER	SLTA/SEDERAJAT
15	FRAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	STAF HONORER	SLTA/SEDERAJAT
16	DEWI IRIANI RAHMAWATI	PEREMPUAN	STAF	DIPLOMA IV/STRATA I
17	NOVI ERMAWATI	PEREMPUAN	STAF HONORER	DIPLOMA IV/STRATA I
18	YUNI USWATUN KHASANAH	PEREMPUAN	STAF HONORER	DIPLOMA IV/STRATA I
19	USWATUN KHASANAH	PEREMPUAN	STAF HONORER	DIPLOMA IV/STRATA I
20	SULISMAN	LAKI-LAKI	DUKUH KEMBANG PUTIHAN	SLTA/SEDERAJAT
21	AHMAD KHALIM	LAKI-LAKI	DUKUH KENTOLAN LOR	SLTA/SEDERAJAT
22	MUHAMMAD FATKHURROHMAN	LAKI-LAKI	DUKUH KENTOLAN KIDUL	SLTA/SEDERAJAT
23	TEGUH TRIYANTO	LAKI-LAKI	DUKUH GANDEKAN	SLTA/SEDERAJAT
24	MUHZIN TAUKHID	LAKI-LAKI	DUKUH DUKUH	SLTA/SEDERAJAT
25	MUHAMMAD HISYAM	LAKI-LAKI	DUKUH IROYUDAN	SLTA/SEDERAJAT
26	IMAM MUTTAQIN	LAKI-LAKI	DUKUH KADISONO	SLTA/SEDERAJAT
27	WIDIYANTO	LAKI-LAKI	DUKUH KEMBANGGEDE	SLTA/SEDERAJAT
28	WHEWEN LAIL SHAPUTRA	LAKI-LAKI	DUKUH KARANGBER	DIPLOMA IV/STRATA I
29	RIFQI FAUZI	LAKI-LAKI	DUKUH SANTAN	SLTA/SEDERAJAT
30	RIYANTO	LAKI-LAKI	DUKUH KALAKIJO	SLTA/SEDERAJAT
31	ANWAR ASWAHADI	LAKI-LAKI	DUKUH KEDUNG	SLTA/SEDERAJAT
32	ICHWAN	LAKI-LAKI	DUKUH BUNGSING	SLTA/SEDERAJAT
33	MISTIJAN	LAKI-LAKI	DUKUH WATUGEDUG	SLTA/SEDERAJAT
34	YOGA PRADANA	LAKI-LAKI	DUKUH PRINGGADING	DIPLOMA IV/STRATA I

(Sumber : Web Site Kalurahan Guwosari Tahun 2025)

Berdasarkan data tabel di atas memuat data perangkat dan staf kelurahan yang terdiri dari 34 orang, mencakup informasi nama, jenis kelamin, jabatan, dan pendidikan terakhir. Mayoritas pegawai berjenis kelamin laki-laki, dengan jumlah 24 orang, sedangkan perempuan berjumlah 10 orang. Jabatan yang tercantum beragam, mulai dari lurah, carik, jagabaya, ulu-ulu, kamituwa, dan berbagai staf serta dukuh dari masing-masing wilayah padukuhan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, sebagian besar pegawai memiliki pendidikan terakhir setingkat SLTA/ sederajat. Hal ini terlihat terutama pada posisi dukuh dan

staf honorer. Namun, ada juga yang telah menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang diploma dan strata I (S1), terutama pada jabatan struktural seperti lurah, carik, pangripta, dan danarta. Struktur organisasi ini menunjukkan kombinasi antara pengalaman lapangan dan latar belakang akademik. Namun, dominasi lulusan SLTA/ sederajat bisa menjadi perhatian jika dikaitkan dengan kebutuhan administrasi dan pelayanan publik yang semakin kompleks, yang idealnya ditunjang dengan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan formal atau pelatihan tambahan. Jumlah staf honorer perempuan juga cukup signifikan, yang mencerminkan keterlibatan perempuan dalam peran pendukung di pemerintahan kelurahan ini.

BAB III

RELASI PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN MASYARAKAT

DI KALURAHAN GUWOSARI

A. Relasi Hegemoni Pemerintah Kalurahan Dengan Masyarakat Di Kalurahan Guwosari

Relasi hegemoni antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat di Kalurahan Guwosari menunjukkan adanya interaksi yang dinamis dan saling memengaruhi dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pemerintah Kalurahan memegang peran utama dalam merancang kebijakan dan program, sementara masyarakat berperan sebagai mitra yang menyampaikan aspirasi, masukan, dan kritik. Relasi ini tidak semata-mata ditentukan oleh struktur kekuasaan formal, melainkan juga ditopang oleh keterlibatan aktif warga dalam membentuk kebijakan yang inklusif dan responsif. Melalui forum-forum seperti musyawarah kalurahan, musyawarah dusun, dan jaring aspirasi masyarakat, Pemerintah Kalurahan berupaya membangun komunikasi yang terbuka dan transparan agar suara warga dapat diakomodasi dalam proses pembangunan.

Keterlibatan masyarakat di Kalurahan Guwosari dalam proses perumusan kebijakan menjadi elemen penting dalam menciptakan relasi yang harmonis antara masyarakat dan Pemerintah Kalurahan. Warga tidak hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai mitra aktif yang berkontribusi dalam merancang program sesuai kebutuhan lokal. Pelibatan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, pemuda, dan organisasi

sosial membantu memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kepentingan bersama. Evaluasi kebijakan secara partisipatif juga memainkan peran krusial dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan. Relasi hegemoni yang berkembang bukan hanya berfokus pada dominasi kekuasaan, melainkan diarahkan pada kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama dalam interaksi antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat. Pemerintah Kalurahan telah menunjukkan komitmen dalam melibatkan masyarakat di berbagai tahap pengambilan keputusan melalui forum seperti musyawarah kalurahan, musyawarah dusun (musdus), dan jaring aspirasi masyarakat (jaring asmara). Dalam pengamatan langsung, tampak bahwa setiap kebijakan yang dirancang terlebih dahulu dibahas melalui musyawarah bersama dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta organisasi kemasyarakatan.

Pemerintah Kalurahan juga menjalankan sosialisasi program pembangunan secara inklusif dan terbuka. Penggunaan teknologi digital seperti website kalurahan dan grup WhatsApp memudahkan warga untuk mengakses informasi. Selain itu, penyampaian informasi juga dilakukan secara langsung oleh dukuh dan RT, termasuk melalui forum-forum seperti pertemuan PKK dan Lembaga Ketahanan Desa. Dengan pendekatan ini, distribusi informasi menjadi lebih merata, termasuk bagi warga yang tidak memiliki akses ke teknologi.

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti mencatat bahwa evaluasi terhadap kebijakan kalurahan merupakan bagian dari upaya untuk menjamin

efektivitas dan keberlanjutan program. Evaluasi dilakukan secara partisipatif dan berbasis data, contohnya pada program pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia. Pemerintah Kalurahan meninjau keberhasilan program melalui indikator kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta menyesuaikan kebijakan berdasarkan masukan warga yang disampaikan melalui forum musyawarah dan jaring asmara. Evaluasi ini juga mencakup analisis terhadap indikator kinerja, seperti pertumbuhan usaha mikro sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan. Dengan pendekatan evaluasi yang menyeluruh, Pemerintah Kalurahan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan berdampak positif bagi pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Kalurahan Guwosari.

Melalui hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa untuk membangun relasi yang sehat dan berkelanjutan antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat, diperlukan kesadaran dan kolaborasi dari kedua belah pihak. Relasi dibangun di atas prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pengambilan keputusan bersama. Pemerintah Kalurahan diharapkan mampu menjalankan prinsip demokrasi lokal dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, guna menciptakan hubungan yang inklusif dan harmonis, seperti yang disampaikan oleh Umar Wanto, selaku Ulu-Ulu Kalurahan Guwosari, yakni :

“Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, kalau kita membicarakan pengambilan keputusan itu bermacam macam, ada keputusan berupa kebijakan atau keputusan dalam rangka rencana kerja pemerintah. Mekanisme kita yang pertama secara resmi kita membuka aduan di media sosial ataupun secara langsung tetapi, secara resmi yang istilahnya kita lakukan tahapan itu biasanya kita melakukan musyawarah padukuhan sehingga sebelum terjadi kegiatan selanjutnya itu yang paling penting adalah bagaimana musyawarah padukuhan itu dilaksanakan. Sehingga disitu nanti akan diputuskan permasalahan apa saja yang harus ditangani ditingkat padukuhan. Yang kedua ada jaring asmara, jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh bamuskal. Kemudian hasilnya dibagian

perencanaan dirangkum selanjutnya nanti menjadi bahan musyawarah kalurahan. Selanjutnya akan dipilih bagian mana yang paling prioritas, masyarakat terlibat dari proses awal sampai penyusunan kegiatan yang diprioritaskan, kemudian kita rekap dan kita lakukan perankingan, karena anggaran kalurahan itu juga terbatas”. (Wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Pernyataan di atas menggarisbawahi pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat Pemerintahan Kalurahan. Keputusan yang diambil dalam Pemerintahan Kalurahan memiliki peran krusial untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kalurahan menggunakan berbagai mekanisme untuk melibatkan warga, seperti musyawarah padukuhan dan jaring asmara. Secara formal, Pemerintah Kalurahan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan melalui media sosial atau secara langsung. Selanjutnya, melalui musyawarah padukuhan, wakil dari setiap padukuhan berkumpul untuk membahas masalah yang ada dan mencari solusi bersama. Musyawarah ini menjadi wadah penting dalam menetapkan agenda kerja pemerintah kalurahan serta menyelesaikan berbagai isu yang muncul di tingkat padukuhan. Selain musyawarah padukuhan, pemerintah kalurahan juga membentuk jaring asmara, atau jaring aspirasi masyarakat, yang dijalankan oleh Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal). Lewat jaring asmara, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka kepada Pemerintah Kalurahan. Hasil dari jaring asmara akan dirangkum dan dijadikan bahan dalam musyawarah tingkat kalurahan, yang selanjutnya digunakan untuk menentukan prioritas kegiatan berdasarkan aspirasi yang terkumpul. Pengambilan keputusan di tingkat pemerintah kalurahan tidak hanya berhenti pada musyawarah dan penentuan kegiatan prioritas, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta

penyusunan rencana kegiatan secara menyeluruh. Masyarakat berperan dalam setiap tahap perencanaan, mulai dari perencanaan awal hingga penyusunan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Setelah itu, kegiatan-kegiatan tersebut akan dirangkum dan diprioritaskan berdasarkan urgensi serta ketersediaan anggaran. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahap pengambilan keputusan di Pemerintahan Kalurahan penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Hal ini juga terkonfirmasi oleh Pak Sukatno selaku Anggota Bamuskal di Kalurahan Guwosari yang mengatakan bahwa :

“Musyawarah warga terkait musdus (musyawarah dusun) dilaksanakan ketika akan ada masdus atau jaring aspirasi. Musdus dilakukan di padukuhan jika jaring asmara dilakukan oleh bamuskal. Disitu nanti dibahas ketika musdus itu perencanaan pembangunan di tingkat padukuhan dan nanti biasanya yang diajukan oleh masyarakat, kemudian akan disampaikan ke pemerintah. Ataupun ada dana bantuan dari kabupaten, akan di lakukan pelaporan di musdus. Untuk jaring aspirasi masyarakat nantinya untuk menggali potensi dari warga informasi dari warga terkait apa permasalahan yang ada di masing masing wilayah”. (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang musyawarah warga terkait musdus (musyawarah dusun) merupakan forum diskusi penting dalam perencanaan pembangunan di tingkat padukuhan. Musdus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi di wilayah mereka, termasuk dalam pembahasan rencana pembangunan. Selain menjadi forum perencanaan pembangunan, musdus juga berfungsi sebagai jaring aspirasi masyarakat untuk memahami potensi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat guna menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan peranannya yang penting dalam membangun partisipasi

masyarakat, musyawarah warga terkait musdus memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa atau padukuhan. Melalui musdus, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Selanjutnya, menurut Ibu Gumiyah, kader puskesmas di Kalurahan Guwosari, keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan adalah hasil dari keputusan bersama yang melibatkan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan dalam kutipan berikut ini:

“Semua program yang ada di kalurahan itu menyangkut ke masyarakat. Sebelum ada keputusan pasti diadakan musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah dilakukan rutin setiap bulan tergantung program yang akan dilaksanakan. Jadi, pasti ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Beberapa masyarakat akan diundang untuk menjadi perwakilan kemudian menghadiri rapat tersebut di kantor kalurahan. Kemudian juga, ada program dari pemerintah yaitu musyawarah dusun (musdus), nanti pemerintah akan menghadiri pada musyawarah dusun tersebut. Musyawarah Dusun pasti diadakan setiap tahunnya, musdus dilakukan setiap satu tahun 2x, yang pertama musyawarah dusun dan yang satunya pra musdus, jadi untuk yang pra musdus nantinya khusus diliungkup satu dusun itu tokoh masyarakatnya yang ada di dusun tersebut kemudian nanti yang musdusnya itu yang resmi dari kalurahannya, ada yang menghadiri. Dalam musdus ini setiap unsur masyarakat ada yang mewakili, ada lkk, lpmk, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, pendidikan, kesehatan, seluruh rt, bamuskal yang ada di dusun, bahkan ada juga perwakilan dari difabel setiap unsur masyarakat ada perwakilannya, supaya nanti tersampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat dari paling bawah”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang pentingnya musyawarah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kalurahan. Musyawarah merupakan forum diskusi dan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak terkait, terutama masyarakat setempat. Sebelum keputusan akhir diambil, musyawarah diadakan secara rutin setiap bulan, tergantung pada program atau

kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan dan pembangunan di kalurahan. Selain musyawarah di tingkat kalurahan, ada juga program musyawarah dusun (musdus) yang diselenggarakan oleh pemerintah. Musdus merupakan forum diskusi yang melibatkan perwakilan dari setiap unsur masyarakat di dusun, seperti Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, unsur pendidikan, kesehatan, serta perwakilan dari berbagai organisasi dan lembaga di dusun tersebut. Bahkan, ada juga perwakilan dari difabel untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi dari setiap lapisan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Musdus diadakan setiap tahun, dengan dua kali pertemuan dalam setahun. Pertemuan pertama merupakan pra musdus, di mana tokoh masyarakat dari dusun tersebut menjadi perwakilan. Sedangkan pertemuan kedua merupakan musdus resmi yang dihadiri oleh perwakilan dari kalurahan. Tujuan dari musdus adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh unsur masyarakat untuk menyampaikan gagasan, masukan, dan kebutuhan mereka agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat dusun. Dalam musdus, setiap unsur masyarakat memiliki perwakilannya sendiri, dan setiap suara didengarkan dengan seksama. Keterlibatan seluruh pihak dalam proses musyawarah ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, musdus juga menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama

antarwarga dalam upaya memajukan dusun dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya mekanisme musyawarah yang terstruktur dan partisipatif seperti ini, diharapkan bahwa proses pengambilan keputusan akan lebih transparan, inklusif, dan akuntabel. Masyarakat merasa memiliki peran yang aktif dalam pembangunan di lingkungan mereka, sehingga implementasi kebijakan dapat lebih berhasil dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Hal ini juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antarwarga, yang merupakan pondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Hal ini juga terkonfirmasi oleh Pak Sukatno selaku Anggota Bamuskal di Kalurahan Guwosari yang mengatakan bahwa :

“Banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, ketika ada musyawarah baik itu musdus atau jaring aspirasi terdapat perwakilan dari tokoh masyarakat, RT RW, ketua blok,dll. Jika ada keluhan usulan atau ada masalah diwilayah biasanya didalam forum musyawarah akan disampaikan baik itu melalui jaring asmara maupun rapat LPMKal, atau yang lebih sempit lagi rapat melalui masing masing padukuhan”. (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi dan permasalahan melalui berbagai forum musyawarah, seperti musdus atau jaring aspirasi. Dalam setiap musyawarah, terdapat perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, RT RW, ketua blok, dan lain sebagainya. Mereka berperan sebagai mediator untuk menyampaikan keluhan, usulan, atau masalah yang ada di wilayah mereka. Jika terdapat keluhan, usulan, atau permasalahan di wilayah, biasanya akan diungkapkan dalam forum musyawarah melalui mekanisme jaring aspirasi atau rapat LPMKal (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan). Jika skala forum lebih kecil, permasalahan juga dapat

disampaikan dalam rapat di tingkat padukuhan secara lebih langsung. Melalui forum-forum musyawarah ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam merumuskan solusi bagi permasalahan yang dihadapi dan untuk meningkatkan kualitas hidup di wilayah mereka. Dengan adanya perwakilan dari berbagai elemen masyarakat dan mekanisme penyampaian aspirasi yang terstruktur, forum musyawarah seperti musdus dan jaringan aspirasi menjadi sarana penting dalam memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan lembaga terkait.

Berkaitan dengan partisipasi karang taruna dalam musyawarah yang melibatkan pengambilan keputusan, diterangkan lebih lanjut oleh Ibnu selaku anggota karang taruna, yakni :

“Pengambilan keputusan, jika dalam rapat musyawarah dusun ada pak dukuh, ada yang memimpin rapat, biasanya terkait keputusan tetap ditanyakan dari berbagai pihak. Misalnya dari pihak rt setuju atau tidak, kemudian dari pihak ibu ibu setuju atau tidak, dari pihak lpmk setuju atau tidak, kemudian nanti dari pihak pemuda pasti juga akan ditanyaapakah setuju atau tidak terkait keputusan yang diambil”. Pernyataan ini diperkuat oleh Diki, Nanang, dan Febri selaku anggota karang taruna. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Berdasarkan pernyataan diatas, pengambilan keputusan dalam rapat musyawarah dusun merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak dalam komunitas dusun untuk mencapai keputusan yang disepakati bersama. Ketika musyawarah, kehadiran pak dukuh dan pemimpin rapat sangat penting untuk memandu diskusi dan memastikan proses pengambilan keputusan berjalan lancar. Dalam setiap rapat musyawarah dusun, biasanya keputusan akhir tidak hanya ditentukan oleh pak dukuh atau pemimpin rapat saja, tetapi juga melibatkan berbagai pihak lainnya. Salah satu contoh yang disebutkan adalah pertanyaan kepada pihak RT, apakah mereka setuju atau tidak dengan

keputusan yang akan diambil. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat dan persetujuan dari perwakilan RT sangat diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pendapat dari pihak ibu-ibu juga turut diminta, menunjukkan inklusi dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, dalam proses musyawarah. Selanjutnya, keterlibatan pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) juga dicontohkan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Pihak LPMK biasanya memiliki peran khusus dalam pengorganisasian dan pembangunan masyarakat, sehingga pendapat dan persetujuan dari mereka juga dianggap penting untuk mencapai keputusan yang lebih berkelanjutan. Pihak pemuda juga menjadi salah satu kelompok yang memiliki andil dalam proses musyawarah dusun. Pendapat dari pemuda sering kali mencerminkan pandangan generasi muda dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan atau keputusan yang akan diambil. Dengan melibatkan pihak pemuda, maka aspek pandangan dari berbagai generasi dalam masyarakat dapat terwakili secara adil. Proses pengambilan keputusan dalam rapat musyawarah dusun tidak hanya sekadar kewenangan pak dukuh atau pemimpin rapat, tetapi melibatkan beragam pihak yang mewakili berbagai aspek masyarakat. Dengan mendengarkan dan memperhatikan pendapat dari berbagai pihak, diharapkan keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan bersama dan memperkuat kerjasama dalam membangun komunitas dusun yang lebih baik.

Kemudian pernyataan dari Ibu Gumiyah selaku kader puskesmas di Kalurahan Guwosari mengatakan bahwa yang berperan dalam mengambil keputusan terkait kegiatan sosial di masyarakat di Kalurahan Guwosari dijelaskan dalam kutipan dibawah ini :

“Kegiatan sosial masyarakat khususnya posyandu dan PKK itu nanti kebanyakan dari pengurus kader dan PKK, kalurahan sudah ada program kegiatan yang telah ditetapkan untuk posyandu dan PKK, kemudian kader akan menambahkan atau memberikan usulan. Misalnya program PMT untuk balita atau lansia, nah itu nanti kalurahan yang mengadakan programnya. Kita sebagai kader melaksanakan program tersebut. Kader atau bahkan masyarakat juga dapat memberikan usulan kepada pemerintah mengenai program kegiatan sosial masyarakat”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Dalam pernyataan di atas, peran serta masyarakat khususnya pengurus kader dan PKK, dalam kegiatan sosial seperti posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Menyelenggarakan kegiatan sosial seperti posyandu dan PKK merupakan bagian penting dari upaya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Kegiatan posyandu dan PKK umumnya didukung oleh pengurus kader dan anggota PKK yang telah ditetapkan dalam program-program yang sudah ada di tingkat kalurahan. Program-program ini biasanya mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan balita, lansia, dan anggota keluarga lainnya. Sebagai contoh, program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk balita atau lansia adalah salah satu program yang sering dilaksanakan dalam posyandu sebagai upaya untuk memastikan gizi yang cukup bagi kelompok rentan tersebut. Pentingnya peran kader dalam menyelenggarakan program-program ini juga disoroti. Kader diarahkan untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan secara berkala dan berkesinambungan. Mereka juga dapat memberikan usulan atau tambahan program yang dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari kader sangat diperlukan dalam menjaga kelancaran kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan. Kegiatan sosial masyarakat,

tidak hanya instansi di tingkat kalurahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program tersebut. Sebagai contoh disebutkan bahwa kalurahan merupakan pihak yang mengadakan program posyandu dan PKK, namun kaderlah yang bertugas melaksanakan program tersebut. Dengan demikian, kerjasama antara pihak kalurahan, kader, dan masyarakat sangat penting untuk menjamin terlaksananya program-program kegiatan sosial dengan baik dan efektif. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa kader atau bahkan masyarakat memiliki ruang untuk memberikan usulan kepada pemerintah terkait program kegiatan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosial sangat dihargai dan diakui oleh pihak berwenang. Dengan memberikan usulan, masyarakat dapat turut berperan dalam menciptakan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, jika ada masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah desa maka masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa. Hal ini disampaikan oleh Pak Umar Wanto selaku Ulu-Ulu di Kalurahan Guwosari, yakni :

“Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa baik itu yang menjadi peraturan lurah atau peraturan kalurahan itu melalui beberapa fase. Fasenya itu adalah penyusunan, draf, kemudian *publik hearing* dan harapannya ketika *publik hearing* ada masukan dari masyarakat. Tentu saja ketika nanti dalam *publik hearing* ataupun ketika itu diumumkan untuk menjadi rancangan peraturan kalurahan atau peraturan lurah tentu saja sudah ada masukan, disitulah kita memberi ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan ketika sudah diundangkan dan ternyata tidak relevan sesuai dengan aspirasi masyarakat atau kurang pas bisa dilakukan proses untuk revisi atau membatalkan peraturan itu, tentu saja dengan mekanisme yang tertera. Sejauh ini belum pernah ada penolakan kebijakan pemerintah desa, karena kita melakukan kerja sama dengan masyarakat. Jadi, terkait dengan rencana kebijakan itu sudah kita bagikan antar wilayah melalui masing-masing

dukuh kemudian disampaikan kepada masyarakat, serta lembaga ketahanan desa (LKD) yaitu ketua RT, PKK, dll. sehingga harapannya ketika ini sudah menjadi sebuah kebijakan masyarakat sudah tahu dan masyarakat bisa memahami kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kalurahan”. (Wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Pernyataan di atas memberikan gambaran tentang proses penyusunan kebijakan oleh Pemerintah Kalurahan. Proses tersebut melalui beberapa fase yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan mendukung kepentingan serta aspirasi masyarakat itu sendiri. Fase pertama yang disebutkan adalah penyusunan kebijakan, dimana ide atau konsep kebijakan digagas dan dirumuskan oleh pihak terkait di tingkat desa. Selanjutnya, kebijakan tersebut disusun dalam bentuk draf untuk kemudian dilakukan *publik hearing*, suatu forum dimana kebijakan yang diusulkan diumumkan kepada masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat didorong untuk memberikan masukan, kritik, atau saran terkait kebijakan yang diajukan. Partisipasi masyarakat dalam *publik hearing* menjadi penting karena masukan dari masyarakat dapat memperkaya kebijakan tersebut dan mencerminkan kebutuhan nyata dari lapangan. Selain itu, pemberian ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses publik hearing juga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan. Dengan adanya mekanisme untuk menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih representatif dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Apabila setelah kebijakan diundangkan ternyata tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat atau kurang tepat, proses revisi atau pembatalan kebijakan tersebut dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa membuka kesempatan untuk memperbaiki kebijakan yang tidak selaras dengan

kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa telah melakukan kerja sama yang baik dengan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Rencana kebijakan telah dibagikan antar wilayah dan disampaikan kepada masyarakat melalui masing-masing dukuh, serta lembaga ketahanan desa seperti Ketua RT, PKK, dan lainnya. Melalui kolaborasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kalurahan. Proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah desa yang melibatkan tahap penyusunan, dengar pendapat publik, dan partisipasi masyarakat bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua golongan dalam masyarakat kalurahan.

Selanjutnya, pernyataan dari Pak Umar Wanto selaku Ulu-Ulu di Kalurahan Guwosari bahwa yang paling berperan dalam menyampaikan atau memperkuat kebijakan pemerintah kalurahan kepada masyarakat disampaikan pada kutipan dibawah ini :

“Yang paling berperan dalam menyampaikan atau memperkuat kebijakan pemerintah desa adalah komponen pemerintahan, komponen pemerintahan ada dua yaitu pak lurah beserta jajaran pamong ada bamuskal (badan permusyawaratan kalurahan). Dua komponen itulah yang menyampaikan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, jadi pak lurah tidak hanya di lingkup kalurahan, disini terdapat 15 padukuhan, masing masing memiliki kepala dusun kemudian dibantu oleh patner kerja, misalnya pak RT, disitu juga ada kader posyandu, ada pokgiat LPMKal padukuhan kita share kita berikan informasi kepada mereka sehingga mereka akan menyampaikan kepada masyarakat. Sehingga tahapan tahapan mekanisme yang kita laksanakan baik dalam penyusunan, sosialisasi tentu saja dapat tersosialisasikan. Dengan jalur seperti itu kita mengundang LKD atau LKK untuk membantu memberikan pengertian, karena yang menjadi ujung tombak adalah teman-teman kita di kewilayahan, pak RT, bamuskal, kemudian dari

LKK dari tingkat padukuhan”. (Wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Pernyataan di atas menguraikan peran yang dimainkan oleh komponen pemerintahan dalam menyampaikan dan memperkuat kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan. Terdapat dua komponen utama dari Pemerintahan Kalurahan yang berperan penting, yaitu pak lurah beserta jajaran pamong dan badan permusyawaratan kalurahan (bamuskal). Kedua komponen ini bertugas untuk menyampaikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kalurahan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan baik. Pak lurah dan jajaran pamong tidak hanya beroperasi di tingkat kalurahan, melainkan juga melibatkan 15 padukuhan yang ada di dalamnya. Setiap padukuhan memiliki kepala dusun yang bertanggung jawab atas wilayahnya masing-masing, dan dibantu oleh partner kerja seperti pak RT, kader posyandu, dan anggota lainnya termasuk dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) di padukuhan. Mereka berperan sebagai penyampai informasi terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat setempat. Dalam proses penyampaian kebijakan, tahapan mekanisme yang dilaksanakan meliputi penyusunan, sosialisasi, dan implementasi kebijakan. Dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat dalam tahapan tersebut, diharapkan kebijakan yang dikeluarkan dapat efektif tersosialisasikan dan diterapkan dengan baik. Adapun upaya dalam menyampaikan kebijakan mencakup mengundang Lembaga Ketahanan Desa (LKD) atau Lembaga Ketahanan Keluarga (LKK) untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Teman-teman di wilayah seperti pak RT dari bamuskal dan anggota LKK seperti Karang Taruna, Pusat Kesejahteraan Sosial

(PUSKESOS), PKK, dll, merupakan ujung tombak dalam memastikan bahwa kebijakan dari pemerintah desa disosialisasikan dengan baik dan dipahami oleh masyarakat. Dengan sistem kerja yang melibatkan berbagai komponen pemerintahan, kader masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan, diharapkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kalurahan dapat terimplementasikan secara efektif dan mendukung kemajuan serta kesejahteraan masyarakat kalurahan secara keseluruhan.

Hal ini juga terkonfirmasi oleh Pak Yoga selaku Dukuh di Kalurahan Guwosari yang mengatakan bahwa :

“Pihak utama dalam menjaga relasi antara pemerintah desa dan masyarakat adalah koordinator kewilayahan dalam hal ini adalah dukuh di masing-masing wilayah bekerjasama dengan lembaga yang ada ditingkat padukuhan, contohnya adalah RT, kader, LPMK dan juga karang taruna unit”. (Wawancara pada tanggal 03 Februari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang peran utama koordinator kewilayahan, yang dalam hal ini adalah dukuh di masing-masing wilayah, dalam menjaga relasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat. Koordinator kewilayahan atau kepala dusun memiliki tanggung jawab untuk memastikan komunikasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah kalurahan dan masyarakat di tingkat padukuhan. Dukuh sebagai koordinator kewilayahan berperan sebagai penghubung utama antara pemerintah kalurahan dan masyarakat di wilayahnya. Mereka bekerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi yang ada di tingkat padukuhan, seperti Ketua RT, kader masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), dan Karang Taruna unit, untuk menjaga arus informasi yang lancar dan memastikan kebijakan pemerintah kalurahan tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Kerjasama antara dukuh dan lembaga-lembaga di tingkat

padukuhan menjadi penting dalam menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah kalurahan dan masyarakat. Keterlibatan RT, kader, LPMK, dan Karang Taruna unit di dalam proses komunikasi dan implementasi kebijakan memastikan bahwa pesan-pesan dari pemerintah kalurahan disampaikan dengan jelas dan dipahami oleh masyarakat setempat. Selain sebagai penghubung antara pemerintah kalurahan dan masyarakat, koordinator kewilayahan juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara berbagai pihak. Mereka membantu membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di tingkat padukuhan.

Selanjutnya, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait kebijakan kalurahan melalui berbagai macam sumber, hal tersebut diterangkan lebih lanjut oleh Ibu Gumiyah selaku kader puskesmas di Kalurahan Guwosari, yakni :

“Dikalurahan guwosari sekarang sudah ada desa.id atau website kalurahan untuk mengakases semua program atau pendanaan kalurahan. Bahkan anak muda pun langsung dapat dengan mudah mengaksesnya. Jika secara langsung, pak dukuh menyampaikan informasi langsung kepada masyarakatnya, atau dapat juga melalui grup whatsapp”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Hal ini juga terkonfirmasi oleh Pak Tanto dan Ibu Rusmiati selaku masyarakat di Kalurahan Guwosari yang mengatakan bahwa :

“Melalui grup whatsapp yang di share oleh pak dukuh, bisa juga melalui media sosial atau website kalurahan. Informasi dari pak dukuh, kemudian pak Rt, lalu menyebar ke masyarakat luas. Jika informasi dari kalurahan bisa melalui broadcase whatsapp kalurahan”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Hal ini juga terkonfirmasi oleh Bu Eka Wahyuni selaku masyarakat di Kalurahan Guwosari mengatakan bahwa :

“Informasi dari kalurahan akan disampaikan melalui pak dukuh, kemudian akan dishare ke grup whatsapp. Kemudian jika ada pertemuan di pkk, pasti akan dishare lagi di pkk jika oarang tua tidak ada wa. Dari pak rt akan disampaikan ke warganya”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kalurahan Guwosari untuk meningkatkan aksesibilitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform digital. Saat ini, kalurahan Guwosari telah memiliki desa.id atau website kalurahan sebagai sarana untuk mengakses berbagai informasi terkait program dan pendanaan yang disediakan oleh pemerintah kalurahan. Bahkan, generasi muda juga dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut melalui platform tersebut. Selain melalui website kalurahan, informasi juga disampaikan secara langsung oleh pak dukuh kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui grup WhatsApp. Pak dukuh memainkan peran penting sebagai penyampai informasi utama kepada masyarakat, dan dengan adanya grup WhatsApp, informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas. Proses penyebaran informasi di desa Guwosari juga melibatkan pak RT yang akan menyebarluaskan informasi yang diterima dari pak dukuh kepada warga di lingkungannya. Dalam kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), informasi juga akan disampaikan dan dibagikan kepada peserta pertemuan, terutama jika ada orang tua yang tidak memiliki WhatsApp. Hal ini menunjukkan inklusi dalam penyebaran informasi agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengaksesnya. Selain grup WhatsApp, media sosial dan website kalurahan juga menjadi sarana penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Informasi dari pemerintah desa akan disampaikan melalui pak dukuh dan dishare ke grup WhatsApp, serta dapat disebarluaskan melalui platform media sosial atau website kalurahan.

Jika ada pertemuan di PKK, informasi juga akan dishare di sana untuk memastikan seluruh anggota terinformasikan. Pendekatan komunikasi yang inklusif dan multiplatform seperti yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Guwosari memastikan bahwa informasi terkait program dan kegiatan desa tersampaikan dengan efektif kepada seluruh masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti website, media sosial, WhatsApp, dan pertemuan langsung, diharapkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan implementasi kebijakan Kalurahan dapat semakin meningkat.

Selanjutnya pernyataan dari Pak Umar Wanto selaku Ulu-Ulu di Kalurahan Guwosari yang mengatakan bahwa cara pemerintah desa memastikan bahwa kebijakan yang dibuat diterima secara luas oleh masyarakat dijelaskan dalam kutipan dibawah ini :

“Setelah sosialisasikan kita juga melihat dampaknya mungkin dengan cara 1 tahun kedepan apakah ketika kebijakan itu sudah dilaksanakan bagaimana hasilnya. Segala bentuk plus minus keberhasilan atau kurang berhasil itu akan menjadi bahan evaluasi untuk kami”. (Wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Pernyataan di atas menggambarkan pendekatan yang diambil oleh pemerintah desa untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang telah diterapkan melalui analisis dampak jangka panjang. Pak Umar Wanto, sebagai Ulu-Ulu di Kalurahan Guwosari, menyoroti pentingnya memantau dan mengevaluasi efek kebijakan setelah periode waktu tertentu, khususnya dalam hal ini, dalam waktu 1 tahun setelah kebijakan diterapkan. Pemerintah desa mengakui bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban sekarang, tetapi juga mencakup aspek jangka panjang terhadap hasil-hasil kebijakan tersebut. Dengan mengamati dampak

yang timbul dan menilai keberhasilan atau kekurangan kebijakan dalam rentang waktu setahun, pemerintah desa dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan dan membuat keputusan yang lebih tepat terkait perbaikan atau penyesuaian ke depan. Segala bentuk keberhasilan atau kekurangan dari implementasi kebijakan akan menjadi landasan evaluasi yang penting bagi pemerintah desa. Dengan mengidentifikasi serta menganalisis plus dan minus dari kebijakan yang telah diterapkan, pemerintah desa dapat melakukan refleksi yang mendalam terhadap upaya pembangunan yang dilakukan, serta merumuskan tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah desa merupakan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdampak saat ini, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat. Dengan mengambil pendekatan evaluasi yang berbasis bukti dan data, pemerintah desa Guvosari menunjukkan komitmen mereka untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas yang tinggi.

Berdasarkan dari berbagai pernyataan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat di Kalurahan Guvosari sangat dipengaruhi oleh partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa memiliki peran dominan dalam menyusun kebijakan dan program-program pembangunan, namun pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi landasan utama untuk menciptakan hubungan yang sehat dan inklusif. Melalui mekanisme musyawarah, jaring asmara, pertemuan musdus, dan partisipasi berbagai unsur masyarakat, pemerintah desa berusaha untuk membangun

hubungan yang harmonis dan mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Proses musyawarah kalurahan dan musdu merupakan wadah penting untuk mendengar suara masyarakat secara langsung dan merumuskan kebijakan yang lebih berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Jaring asmara juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan masukan mereka terkait dengan program pembangunan desa. Selain itu, evaluasi keberhasilan kebijakan dalam jangka panjang juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan mendapatkan dukungan luas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemerintah desa harus dapat menerima masukan dan kritik dari masyarakat serta membuat perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat melalui partisipasi dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di Kalurahan Guwosari. Relasi yang harmonis dan inklusif antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting untuk memastikan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan sangat vital untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Kesenambungan komunikasi, partisipasi aktif, dan evaluasi yang berkelanjutan adalah kunci dalam membangun hubungan yang seimbang dan berkelanjutan antara pemerintah desa dan masyarakat di Kalurahan Guwosari.

**Gambar 3.1 Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan
di Kalurahan Guwosari**



(Sumber : Sid Kalurahan Guwosari 2024)

Berdasarkan informasi dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa Musyawarah Kalurahan di Kalurahan Guwosari berperan sebagai wadah yang krusial dalam mempererat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Kehadiran berbagai unsur masyarakat menunjukkan adanya ruang partisipatif yang terbuka. Dinamika hubungan ini mencerminkan pola hegemoni yang bersifat persuasif, di mana Pemerintah Kalurahan berupaya membangun legitimasi melalui mekanisme musyawarah, jaring asmara, pertemuan musdus, serta forum-forum aspirasi lainnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Evaluasi berkelanjutan atas kebijakan yang dijalankan pun menjadi penting untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan di Kalurahan Guwosari. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menunjukkan suasana rapat, tetapi juga merepresentasikan praktik demokrasi desa yang berlandaskan kerja sama dan komunikasi yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat.

B. Relasi Konflikual Pemerintah Kalurahan Dengan Masyarakat Di Kalurahan Guwosari

Relasi konflikual antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat di Kalurahan Guwosari merupakan persoalan yang sering muncul dalam dinamika kehidupan masyarakat desa. Konflik dapat timbul akibat perbedaan pendapat dan kesalahpahaman informasi. Namun, pentingnya penyelesaian konflik dengan cepat dan efektif menunjukkan responsifnya pemerintah desa dalam menjaga stabilitas sosial. Peran mediator dari berbagai unsur masyarakat, seperti dukuh, ketua RT RW, kader, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat, memberikan gambaran tentang pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menemukan solusi bersama. Komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat di Kalurahan Guwosari menjadi kunci dalam memelihara hubungan harmonis. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat memungkinkan terjalinnya kepercayaan yang kuat antara kedua belah pihak. Dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, termasuk melalui musyawarah, klarifikasi informasi, dan partisipasi aktif, diharapkan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terus terjaga dengan baik.

Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa konflik yang muncul seperti perbedaan pendapat dan kesalahpahaman informasi, namun konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cepat melalui pihak pemerintah setempat. Hal ini menunjukkan respons cepat dan proaktif dari Pemerintah Kalurahan dalam menjaga stabilitas sosial. Di lingkup padukuhan, peran dukuh sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sangat penting, dimana konflik yang terjadi di padukuhan seringkali diselesaikan melalui kesepakatan

yang dipimpin oleh dukuh. Peneliti mengamati bahwa penyelesaian konflik melibatkan berbagai pihak, termasuk ketua RT RW, kader, tokoh masyarakat, bahkan pemuda setempat, yang menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam mencari solusi bersama. Kerlibatan berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelesaian konflik tidak hanya memperkaya perspektif yang ada, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil, sehingga berkontribusi pada penguatan solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

Peneliti menemukan bahwa komunikasi yang efektif antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat merupakan faktor utama dalam memelihara hubungan yang harmonis. Keterbukaan dalam berbagi informasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat membantu membangun kepercayaan yang solid antara kedua pihak. Ini sangat penting untuk mencegah munculnya konflik yang lebih besar, karena masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan dalam mengelola konflik di Kalurahan Guwosari sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang transparan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif, diharapkan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik dan menciptakan suasana yang harmonis di Kalurahan Guwosari.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, berkaitan dengan konflik yang pernah terjadi antara pemerintah desa dan masyarakat, diterangkan lebih lanjut oleh Ibu Gumiyah selaku kader puskesmas di Kalurahan Guwosari, yakni :

“Masing-masing padukuhan memiliki konflik yang berbeda-beda, misalnya di Padukuhan Pringgading terdapat salah satu konflik kecil seperti dibagian wilayah perumahan terkadang kurang menyatu dengan wilayah penduduk asli. Masyarakat juga terkadang mendapatkan informasi yang kurang valid, misalnya dalam informasi mengenai bantuan. Kesalahpahaman informasi dapat memunculkan sedikit konflik. Namun kesalahpahaman tersebut dapat langsung diatasi oleh pihak pemerintah setempat agar tidak menjadi konflik yang berlarut larut”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Berdasarkan pernyataan di atas, realita konflik yang mungkin terjadi di masing-masing padukuhan, dengan contoh konkret dari konflik kecil yang terjadi di Padukuhan Pringgading. Terjadi konflik kecil antara wilayah perumahan yang terkadang kurang menyatu dengan wilayah penduduk asli. Ketidaksesuaian antara kedua wilayah ini dapat memberikan ruang bagi munculnya ketegangan sosial di antara warga yang tinggal di sana. Selain itu, disebutkan bahwa salah satu sumber konflik adalah informasi yang kurang valid yang diterima oleh masyarakat di Padukuhan Pringgading, terutama terkait dengan informasi mengenai bantuan. Kesalahpahaman yang muncul akibat informasi yang tidak akurat bisa menjadi pemicu terjadinya konflik di antara masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa kekeliruan informasi tersebut bisa segera diatasi oleh pihak pemerintah setempat agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks. Pada saat konflik atau kesalahpahaman terjadi, intervensi yang cepat dan tepat dari pihak pemerintah setempat merupakan kunci untuk mencegah konflik agar tidak berlarut-larut. Dengan melakukan klarifikasi, edukasi, dan dialog aktif dengan berbagai pihak yang terlibat, pemerintah dapat meredakan ketegangan dan memperbaiki pemahaman yang keliru di antara warga masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah setempat dalam menangani konflik dan kesalahpahaman yang muncul di tingkat padukuhan. Dengan memiliki

kemampuan untuk mengatasi perbedaan dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara warga, pemerintah setempat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai di masyarakat. Melalui pendekatan proaktif dan preventif dalam menangani konflik, pemerintah setempat dapat menciptakan kondisi yang dapat mengurangi risiko terjadinya ketegangan sosial dan memperkuat kebersamaan di antara warga padukuhan.

Sementara itu, Ibu Eka Wahyuni selaku masyarakat di Kalurahan

Guwosari juga mengatakan bahwa :

“Pernah terjadi konflik di Padukuhan Kentolan Lor, tetapi langsung ada kesepakatan yang saling disetujui. Misalnya, perbedaan pendapat pengurus intern organisasi masyarakat tetapi pasti langsung ada penyelesaiannya. Yang akan menengahi konflik tersebut itu pak dukuh. Yang akan mengambil keputusan itu tetap pak dukuh. Konflik yang terjadi biasanya hanya konflik konflik kecil saja, tidak menyebabkan konflik yang besar”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Pernyataan di atas memberikan gambaran tentang penanganan konflik yang terjadi di Padukuhan Kentolan Lor, yang sering kali dapat diselesaikan dengan cepat melalui kesepakatan yang disetujui bersama. Konflik yang terjadi seringkali berupa perbedaan pendapat di antara pengurus intern organisasi masyarakat, namun berkat kerjasama dan mediasi, konflik tersebut dapat diatasi dengan efektif. Pak dukuh memainkan peran yang sentral dalam menengahi konflik yang muncul. Beliau tidak hanya berperan sebagai mediator dalam menyatukan berbagai pandangan yang berbeda, tetapi juga sebagai pemimpin yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan terkait penyelesaian konflik. Dengan demikian, keberadaan pak dukuh sebagai otoritas lokal di Padukuhan Kentolan Lor memberikan stabilitas serta kepastian dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Keberhasilan dalam menangani konflik pada tingkat padukuhan tersebut dapat dilihat dari fakta

bahwa konflik yang terjadi cenderung bersifat kecil dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat mampu menyelesaikan ketegangan sosial dengan cara yang damai dan efisien, serta memiliki mekanisme yang terstruktur untuk menangani perbedaan pendapat dan konflik yang mungkin muncul. Dalam penyelesaian konflik, pentingnya peran kepemimpinan yang kuat dan otoritas yang diakui oleh masyarakat seperti pak dukuh sangat mempengaruhi proses penyelesaian konflik. Dengan adanya kepercayaan dan kepatuhan terhadap keputusan pak dukuh, konflik dapat diatasi dengan efektif dan tidak membahayakan stabilitas dan kerukunan di masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian konflik di Padukuhan Kentolan Lor adalah contoh yang baik dari bagaimana kerjasama, komunikasi yang baik, dan kepemimpinan yang efektif dapat membantu menjaga kedamaian dan memperkuat kebersamaan dalam sebuah komunitas. Adanya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif di tingkat padukuhan tentu sangat penting dalam membangun harmoni sosial dan kesejahteraan bersama di masyarakat desa.

Selain itu, Pak Tanto dan Ibu Rusmiati selaku masyarakat di Kalurahan Guwosari juga mengatakan bahwa :

“Hanya konflik kecil misalkan konflik perbedaan pendapat, untuk konflik yang menimbulkan kekacauan yang berkelanjutan tidak ada”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut konflik yang bersifat kecil, seperti perbedaan pendapat, tidak akan menimbulkan kekacauan yang berkelanjutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa konflik dalam skala kecil cenderung memiliki dampak yang terbatas dan dapat diselesaikan dengan relatif mudah, tanpa mengakibatkan situasi yang *chaotis* atau berkepanjangan. Namun, konflik

yang lebih kompleks dan tidak terselesaikan dengan baik memiliki potensi untuk menimbulkan kekacauan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya penanganan konflik serta strategi yang tepat agar dapat mencegah eskalasi konflik yang merugikan kedua belah pihak.

Kemudian, pernyataan oleh Pak Umar Wanto selaku Ulu-Ulu di Kalurahan Guwosari mengatakan bahwa terjadi perbedaan pendapat saat musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat, lebih lanjutnya dinyatakan pada kutipan dibawah ini :

“Pada saat musyawarah, setelah kita umumkan informasi kepada masyarakat, disitu terjadi adu argumen yang tentu saja kita hargai setiap pendapat-pendapat mereka, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, juga yang menitikberatkan kepentingan masing masing itu juga terjadi. Kemudian solusinya adalah kita melakukan perankingan atau kita analisa mana yang lebih didahulukan”. (Wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Dalam pernyataan tersebut, dijelaskan mengenai proses musyawarah dan pengambilan keputusan yang melibatkan pemberian informasi kepada masyarakat, diskusi, serta pemilihan solusi berdasarkan prioritas atau analisis kepentingan yang terlibat. Musyawarah adalah salah satu metode pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Penyampaian informasi kepada masyarakat merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai isu yang dibahas. Setelah informasi diberikan, diikuti dengan diskusi, di mana setiap individu atau kelompok menyampaikan pendapat atau argumen mereka terkait masalah yang sedang dihadapi. Dalam diskusi ini, penting untuk menciptakan ruang yang aman bagi semua pihak untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa rasa takut atau tekanan. Semua pendapat, baik yang sejalan maupun yang berbeda, harus dihargai dan diperlakukan secara adil.

Keberagaman sudut pandang dan masukan yang ada diharapkan dapat memperkaya diskusi dan membantu menemukan solusi terbaik. Selain itu, pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat dalam musyawarah. Adanya perbedaan kepentingan antar pihak adalah hal yang wajar dalam setiap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam merumuskan solusi atau keputusan akhir, perlu dilakukan penilaian atau analisis terhadap berbagai argumen dan kebutuhan yang diajukan oleh setiap pihak. Proses analisis ini bertujuan untuk menetapkan prioritas dan merumuskan solusi yang dapat mengakomodasi sebanyak mungkin kepentingan yang terlibat, serta menghasilkan hasil akhir yang optimal. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat mencerminkan beragam perspektif dan kepentingan, sehingga diterima oleh sebagian besar pihak yang terlibat. Pengambilan keputusan secara kolektif atau partisipatif melalui musyawarah, diskusi, penilaian kepentingan, dan perankingan solusi merupakan langkah-langkah penting untuk mencapai kesepakatan bersama yang tercapai melalui diskusi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Musyawarah diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih holistik, inklusif, dan berkelanjutan untuk kepentingan bersama.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Ibnu selaku anggota karang taruna yang mengatakan bahwa :

“Sejauh ini belum pernah ada konflik antara karang taruna dengan pemerintah desa. Dari pihak kalurahan selalu ada skala prioritas, misalnya di Padukuhan Dukuh akan mengadakan lomba voly, dan dalam kegiatan yang akan diselenggarakan cukup banyak keterlibatan pemerintah desa untuk menyokong acara tersebut. Nah, semisal akan ada kegiatan lain di waktu yang bersamaan maka pemerintah akan menentukan skala prioritasnya. Kegiatan yang didahulukan tentunya kegiatan yang telah diprioritaskan dilihat dari kegiatan apa yang akan

dilaksanakan”. Pernyataan ini diperkuat oleh Diki, Nanang, dan Febri selaku anggota karang taruna. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Dalam pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa hingga saat ini belum terjadi konflik antara Karang Taruna dengan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama dan hubungan yang harmonis antara Karang Taruna, sebagai organisasi kepemudaan di tingkat desa, dengan pemerintah desa dalam mengelola berbagai kegiatan dan acara di lingkungan tersebut. Pernyataan tersebut juga menggarisbawahi pentingnya skala prioritas dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan yang akan diselenggarakan di tingkat padukuhan atau dukuh. Misalnya, dalam contoh yang disebutkan di Padukuhan Dukuh akan diadakan lomba voli, di mana keterlibatan pemerintah desa sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran acara tersebut. Namun, dalam situasi di mana terdapat kegiatan lain yang dijadwalkan pada waktu yang bersamaan, pemerintah desa perlu menentukan skala prioritasnya. Proses penentuan skala prioritas ini melibatkan pemilihan kegiatan yang akan didahulukan berdasarkan pertimbangan yang matang. Hal ini biasanya melibatkan evaluasi terhadap urgensi, dampak, dan manfaat dari masing-masing kegiatan yang direncanakan. Kegiatan yang telah diprioritaskan akan mendapatkan perhatian lebih tinggi dan dukungan yang optimal dari pemerintah desa. Pentingnya penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan merupakan strategi penting dalam pengelolaan agenda kegiatan di tingkat desa. Dengan adanya penetapan prioritas, akan membantu dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya, waktu, dan tenaga yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, prioritas yang jelas juga dapat menghindari tumpang tindihnya jadwal kegiatan dan

memastikan efektivitas pelaksanaan acara yang direncanakan. Kerjasama yang baik antara karang taruna dan pemerintah desa dalam menentukan skala prioritas aktivitas dan kegiatan di tingkat desa juga mencerminkan komitmen untuk saling mendukung serta menjaga harmoni dan koordinasi dalam menjalankan program-program yang menguntungkan bagi masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan demikian, koordinasi yang baik antara organisasi kepemudaan dan pemerintah desa menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan potensi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kemudian, Ibu Gumiyah yang menjabat sebagai kader puskesmas di Kalurahan Guwosari menyampaikan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat sejauh ini berjalan dengan baik, seperti yang diungkapkan dalam kutipan berikut:

“Alhamdulillah cukup baik, jadi tidak ada kendala yang dihadapi selama ini”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Gumiyah, yang merupakan kader Puskesmas di Kalurahan Guwosari, menyatakan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat di wilayah tersebut selama ini cukup baik. Mengindikasikan bahwa tidak terdapat kendala atau hambatan yang signifikan dalam hubungan dan komunikasi antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat di Kalurahan Guwosari. Pernyataan ini mencerminkan adanya kerjasama yang harmonis dan saling pengertian antara pemerintah desa sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa, serta kelompok masyarakat, termasuk di antaranya organisasi seperti Puskesmas yang terlibat dalam upaya pemberdayaan sosial masyarakat. Keberadaan komunikasi yang baik dan tidak

terhambat memungkinkan terjalinnya kolaborasi yang efektif dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program atau kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya kesepahaman dan keterbukaan dalam berkomunikasi antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat, berbagai masalah atau kebutuhan masyarakat dapat didiskusikan secara terbuka dan dapat diidentifikasi solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan riil yang ada. Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat dapat berjalan lancar dan efektif, tanpa adanya kendala atau hambatan yang menghambat proses kerja sama tersebut.

Selanjutnya, pernyataan oleh Ibu Gumiyah selaku kader puskesmas di Kalurahan Guwosari yang mengatakan bahwa semua unsur terlibat dalam menyelesaikan konflik, lebih lanjutnya dinyatakan pada kutipan dibawah ini :

“Yang menyelesaikan konflik itu tergantung konflik tersebut mengenai hal apa. Misalkan jika konflik tersebut mengenai bantuan, biasanya nanti ke pak RT terlebih dahulu, kemudian pak RT akan mengklarifikasi. Kadang juga dapat melalui kadernya atau ke pak dukuh atau bahkan kadang langsung ke kalurahan. Sebisa mungkin kita menjelaskan apa yang membuat konflik tersebut dapat terjadi serta mendapatkan titik temunya supaya konflik tidak berlarut larut. Sehingga dapat dikatakan semua unsur terlibat dalam menyelesaikan konflik”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang pendekatan dan proses penyelesaian konflik berdasarkan sifat dan sumber konflik yang terjadi. Dalam konflik yang berkaitan dengan bantuan, pembagian sumber daya, atau permasalahan sejenisnya, seringkali langkah pertama yang diambil adalah melibatkan pihak-pihak terdekat, seperti pak RT, kader, pak dukuh, atau pihak kalurahan dalam penyelesaian konflik tersebut. Pentingnya mengetahui akar permasalahan dari konflik yang terjadi, seperti yang disebutkan dalam

pernyataan, merupakan langkah awal yang krusial dalam upaya penyelesaiannya. Dengan memahami akar penyebab konflik, pihak yang terlibat dapat mengidentifikasi titik temu atau kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam kasus konflik mengenai bantuan, misalnya, klarifikasi dari pak RT atau pihak terkait lainnya dapat membantu dalam memperjelas dan memahami perspektif masing-masing pihak yang terlibat. Proses penyelesaian konflik yang melibatkan berbagai pihak terkait seperti pak RT, kader, pak dukuh, atau pihak kalurahan juga menunjukkan pentingnya kolaborasi dan partisipasi seluruh unsur dalam mencari solusi bersama. Dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait, peluang untuk menemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi lebih besar. Setiap pihak yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab dalam memfasilitasi proses penyelesaian konflik agar tidak berlarut-larut dan mengarah pada kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, upaya untuk mendapatkan titik temu dalam penyelesaian konflik juga memerlukan komunikasi yang efektif, empati, dan keinginan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan mendekati konflik secara kolaboratif dan proaktif, potensi untuk mengatasi perbedaan dan konflik dapat dimaksimalkan, sehingga dapat menciptakan hubungan harmonis antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan memahami sumber konflik, mencari titik temu, dan melibatkan berbagai pihak dalam proses penyelesaian, diharapkan konflik dapat diselesaikan secara efektif dan konstruktif, sehingga tidak berlarut-larut dan mampu menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung di lingkungan masyarakat tersebut.

Selanjutnya, pernyataan oleh Pak Sukatno selaku Anggota Bamuskal di Kalurahan Guwosari yang mengatakan bahwa :

“Bamuskal menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jika ada konflik maka bamuskal yang akan menjadi penengahnya”.
(Wawancara pada tanggal 22 Mei 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang peran penting Bamuskal sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam penyelesaian konflik. Bamuskal berperan sebagai penghubung antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah, sehingga memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika terjadi konflik di tingkat kalurahan atau dusun, Bamuskal memiliki peran sebagai penengah untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat, Bamuskal bertindak sebagai mediator yang netral dan adil dalam menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik yang timbul di masyarakat. Dengan demikian, peran Bamuskal dalam memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pemerintah, serta dalam menyelesaikan konflik yang mungkin muncul di tingkat kalurahan atau dusun. Melalui peranannya sebagai jembatan komunikasi dan penengah, Bamuskal membantu membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah.

Dari berbagai hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak yang terkait. Keberhasilan dalam menangani konflik sangat bergantung pada adanya komunikasi yang efektif, keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran desa, serta pemeliharaan hubungan

yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Upaya proaktif dalam mengatasi dan mencegah konflik, seperti melalui musyawarah, klarifikasi informasi, dan partisipasi seluruh pihak terkait, dapat membantu meredakan ketegangan serta meningkatkan pemahaman antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, peran kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang transparan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan akan menghasilkan penyelesaian konflik yang berkelanjutan serta mendukung terciptanya hubungan yang harmonis di Kalurahan Guwosari. Kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait menjadi fondasi utama dalam menyelesaikan konflik dan membangun stabilitas serta kebersamaan di masyarakat desa.

Gambar 3.2 Pelaksanaan Pertemuan Rutin Warga Padukuhan di Kalurahan Guwosari



(Sumber : Sid Kalurahan Guwosari 2024)

Berdasarkan data dari gambar di atas, diketahui bahwa kegiatan yang sedang berlangsung merupakan sebuah forum musyawarah dusun di

Kalurahan Guwosari yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat. Kegiatan semacam ini mencerminkan adanya ruang partisipatif yang dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, terutama dalam hal penyelesaian konflik yang mungkin terjadi di tingkat padukuhan maupun kalurahan. Relasi konflikual antara pemerintah desa dan masyarakat sering kali dipicu oleh kurangnya transparansi serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah warga seperti yang terlihat pada gambar dapat menjadi strategi efektif untuk meredam ketegangan, mengklarifikasi informasi yang keliru, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Kehadiran warga dalam jumlah besar juga menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu lokal serta adanya potensi besar untuk menjalin dialog terbuka. Dengan kepemimpinan yang kuat dan komunikasi yang efektif, forum ini dapat difungsikan sebagai jembatan dalam menyelesaikan konflik secara damai dan demokratis. Oleh karena itu, kolaborasi dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan stabil antara pemerintah desa dan masyarakat di Kalurahan Guwosari.

C. Relasi Egaliter Pemerintah Kalurahan Dengan Masyarakat Di Kalurahan Guwosari

Relasi Egaliter antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat menjadi dasar yang penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Di Kalurahan Guwosari, hubungan ini tercermin dalam pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, Pemerintah Kalurahan tidak hanya berperan sebagai pengelola,

tetapi juga sebagai mitra yang mendengarkan dan merespons kebutuhan serta aspirasi warganya. Hal ini menciptakan saling percaya dan menghormati, yang pada gilirannya memperkuat solidaritas sosial. Pemerintah Kalurahan Guwosari telah mengaplikasikan berbagai metode komunikasi dan partisipasi yang inklusif, mulai dari musyawarah rutin hingga forum diskusi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dengan melibatkan tokoh adat, pemuda, dan perwakilan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah desa berusaha memastikan bahwa setiap suara didengar dan dipertimbangkan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat jaringan komunitas yang saling mendukung, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari telah mengimplementasikan berbagai metode pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Peneliti melihat bahwa Pemerintah Kalurahan telah aktif terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat, seperti mendukung program-program yang diinisiasi oleh pemuda melalui pemberian dukungan finansial untuk penyelenggaraan acara. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kalurahan dalam mendukung inisiatif kemasyarakatan yang bertujuan untuk memperkuat jaringan komunitas dan memajukan desa secara keseluruhan. peneliti juga mencatat bahwa Pemerintah Kalurahan telah melibatkan tokoh adat seperti pak dukuh dan pak lurah dalam menyampaikan informasi, memfasilitasi interaksi masyarakat dengan Pemerintah Kalurahan, serta memperkuat solidaritas dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan pemuda dan masyarakat dari berbagai generasi untuk secara efektif berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Keikutsertaan dukuh dan lurah dalam menyampaikan informasi dan memberikan dukungan menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat secara keseluruhan.

Dari hasil observasi, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari telah berhasil mengimplementasikan pendekatan inklusif dan partisipatif dalam menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat. Melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan dukungan terhadap inisiatif pemuda, Pemerintah Kalurahan menunjukkan komitmen yang kuat untuk memajukan desa dan memperkuat jaringan komunitas. Selain itu, peran tokoh adat seperti dukuh dan lurah dalam menyampaikan informasi dan memfasilitasi interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Kalurahan sangat penting dalam memperkuat solidaritas serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai generasi, tetapi juga menciptakan hubungan saling menguntungkan antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan desa yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, upaya menjaga relasi egaliter antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat memerlukan komitmen dan kolaborasi yang baik dari kedua belah pihak. Pentingnya membangun hubungan yang harmonis, saling menghormati, serta saling mendukung antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat merupakan

kunci utama dalam menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua pihak terkait. Peran aktif masyarakat dalam menjaga akuntabilitas Pemerintah Kalurahan dan partisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berkaitan dengan hal ini, diterangkan lebih lanjut oleh Pak Umar Wanto selaku Ulu-Ulu di Kalurahan Guwosari, yaitu :

“Dasar hukumnya adalah khirarki pekerjaan kita yaitu melayani, artinya setiap pamong kalurahan yang ada di pemerintah kalurahan itu mempunyai kewajiban pokok yaitu melayani masyarakat tentang apa saja yang menjadi persoalan di masyarakat, tentu saja nanti yang akan melayani adalah tupoksi masing masing, jadi kalau di bidang kesejahteraan siapa, dibidang ekonomi siapa, kesehatan siapa, atau masalah sosial siapa. Itu nanti sudah ada tupoksi masing masing”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang dasar hukum dan prinsip kerja dalam pelayanan publik, khususnya dalam tugas pamong kalurahan di Pemerintah Kalurahan. Ditekankan bahwa dasar hukum tersebut adalah khirarki pekerjaan yang menjadi prinsip panduan dalam menjalankan tugas pelayanan. Salah satu kewajiban pokok dari pamong kalurahan adalah melayani masyarakat dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Pelayanan masyarakat yang menjadi inti dari tanggung jawab pamong kalurahan melibatkan berbagai aspek, seperti bidang kesejahteraan, ekonomi, kesehatan, dan masalah sosial. Setiap pamong kalurahan memiliki tupoksi atau tugas pokok dan fungsi yang spesifik sesuai dengan bidang atau sektor yang menjadi wewenangnya. Misalnya, dalam bidang kesejahteraan akan ada pamong yang bertugas untuk menangani program-program kesejahteraan masyarakat, sedangkan dalam bidang ekonomi akan ada pamong yang fokus pada pembangunan ekonomi

masyarakat. Pentingnya memahami dan menjalankan tupoksi masing-masing pamong kalurahan adalah agar pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan penugasan yang jelas dan pembagian tugas yang sesuai, setiap pamong kalurahan dapat fokus dalam menangani persoalan yang menjadi ranah kerjanya, sehingga hasil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat maksimal dan tepat sasaran. Dalam pelayanan publik, prinsip melayani masyarakat harus senantiasa dijunjung tinggi oleh setiap pamong kalurahan. Kehadiran dan kualitas pelayanan yang baik menjadi landasan utama dalam membangun hubungan harmonis antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat. Dengan pelayanan yang responsif, transparan, dan profesional, diharapkan setiap persoalan atau kebutuhan masyarakat dapat diatasi dengan baik dan memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat. Pentingnya pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi tugas utama pamong kalurahan dalam menjalankan tupoksinya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Dengan menjunjung tinggi prinsip pelayanan, diharapkan hubungan antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dapat terjaga dengan baik, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, pernyataan dari Pak Umar Wanto selaku Ulu-Ulu di Kalurahan Guwosari mengatakan bahwa kegiatan atau forum diskusi antara Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat dilaksanakan di tingkat kewilayahan. Lebih lanjutnya dijelaskan dalam kutipan dibawah ini :

“Musyawarah dilaksanakan di tingkat kewilayahan, baik itu ditingkat RT padukuhan, biasanya kita menerima undangan jadi ketika masyarakat menginginkan kehadiran pemerintah kita sudah sampaikan, silahkan kalau ada yang mau mengundang pemerintah kalurahan boleh, semua dilingkup RT pun kita siap untuk datang memberikan informasi menerima keluhan menerima aduan atau permasalahan, sehingga

kegiatan kegiatan pertemuan rutin itu mereka sudah punya jadwal rata rata paling lama itu 35 hari sekali”. (Wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan mengenai pelaksanaan musyawarah di tingkat kewilayahan, mulai dari tingkat RT hingga padukuhan, serta keterlibatan pemerintah dalam merespons undangan dari masyarakat untuk menghadiri pertemuan musyawarah. Terdapat komunikasi yang terbuka antara masyarakat dengan pemerintah, di mana pemerintah siap hadir untuk memberikan informasi, menerima keluhan, aduan, atau masalah yang dihadapi masyarakat. Pentingnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan musyawarah di tingkat kewilayahan tercermin melalui penerimaan undangan yang disampaikan kepada pemerintah. Ketika masyarakat menginginkan kehadiran pemerintah dalam pertemuan musyawarah, pemerintah kalurahan memberikan respons positif dengan menyatakan kesiapan untuk hadir. Ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menyediakan informasi yang dibutuhkan. Selama pelaksanaan musyawarah rutin di tingkat RT dan padukuhan, terjalin interaksi yang intens antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah siap memberikan informasi, menerima keluhan, serta menanggapi aduan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam setiap pertemuan tersebut. Dengan demikian, proses musyawarah menjadi wadah untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga berbagai isu dan masalah dapat diungkapkan dan ditindaklanjuti secara bersama-sama. Pentingnya penetapan jadwal rutin pertemuan musyawarah, dengan interval sekitar 35 hari sekali, juga menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keteraturan dan keberlanjutan dalam interaksi antara

pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya jadwal yang teratur, diharapkan setiap pertemuan musyawarah dapat memberikan ruang untuk masyarakat dan pemerintah berdiskusi, memecahkan masalah, serta merumuskan langkah-langkah pembangunan yang diinginkan bersama. Secara keseluruhan, pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam menjalankan kegiatan musyawarah di tingkat kewilayahan. Dengan kerjasama yang baik dan komunikasi yang terbuka, diharapkan setiap pertemuan musyawarah dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menjawab berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan tepat dan efektif.

Berkaitan dengan musyawarah pengambilan keputusan, Pak Yoga selaku Dukuh di Kalurahan Guwosari mengatakan bahwa :

“Pengambil keputusan dipadukukan dilakukan melalui musyawarah padukuhan dengan unsur Dukuh, RT, kader, LPMK, pemuda, beserta tokoh masyarakat padukuhan”. (Wawancara pada tanggal 03 Februari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan di tingkat padukuhan yang dilakukan melalui musyawarah padukuhan. Dalam musyawarah padukuhan, terlibat berbagai unsur seperti Dukuh, RT (Rukun Tetangga), kader, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), pemuda, serta tokoh masyarakat padukuhan. Setiap unsur turut serta dalam musyawarah untuk memberikan masukan, pendapat, dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan demi kepentingan bersama. Musyawarah padukuhan menjadi wadah bagi berbagai unsur yang terlibat di tingkat padukuhan untuk bersama-sama membahas isu-isu penting, merumuskan solusi, serta membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di padukuhan tersebut. Dalam proses musyawarah, setiap unsur yang terlibat

memiliki peran dan kontribusi masing-masing sesuai dengan kompetensi dan kepentingan yang diwakilinya. Keterlibatan Dukuh, RT, kader, LPMK, pemuda, dan tokoh masyarakat padukuhan dalam musyawarah padukuhan mencerminkan keberagaman representasi dan perspektif yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Melalui diskusi, dialog, dan evaluasi bersama, diharapkan setiap keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat di padukuhan dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Dalam Pemerintah Kalurahan, musyawarah padukuhan menjadi sarana demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat padukuhan. Dengan melibatkan berbagai unsur yang representatif dari masyarakat padukuhan, diharapkan keputusan-keputusan yang dihasilkan dapat lebih akomodatif, inklusif, dan berpihak kepada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, melalui musyawarah padukuhan, potensi untuk tercapainya kesepakatan bersama, pemecahan masalah secara partisipatif, serta penguatan solidaritas dan hubungan antarwarga di padukuhan menjadi lebih terbuka dan terjalin dengan baik. Dengan demikian, musyawarah padukuhan menjadi salah satu mekanisme penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan desa.

Selanjutnya, pernyataan dari Pak Umar Wanto selaku Ulu-Ulu di Kalurahan Guwosari mengatakan bahwa ada berbagai musyawarah yang

dilakukan dilingkungan masyarakat. Lebih lanjutnya dijelaskan dalam kutipan dibawah ini :

“Musyawarah padukuhan minimal dilaksanakan 1 tahun 1x, itu yang kami adakan kemudian yang artinya biaya dari kami. Jika di tingkat padukuhan, disebut sebagai lapanan, dilaksanakan per 35 hari itu namanya musyawarah padukuhan, misalnya ada pertemuan rutin tingkat padukuhan, pertemuan ditingkat rt, pkk, dll. sehingga tahapan pertemuan kita informasikan lagi ketika kita memberikan sosialisasi sebelum kita melaksanakan musyawarah padukuhan itu tahapannya sudah kita sosialisasikan, sehingga harapannya dimasing masing lembaga desa atau kalurahan nanti disitu mereka sudah membicarakan tentang apa yang akan dilaksanakan, tentu saja ditahun berikutnya, atau mungkin sesuatu hal yang urgent”. (Wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan mengenai frekuensi pelaksanaan musyawarah padukuhan serta tahapan persiapan dan pelaksanaannya. Musyawarah padukuhan minimal dilaksanakan sekali dalam setahun, yang merupakan kegiatan yang dibiayai oleh pihak terkait. Selain itu, perbedaan antara musyawarah padukuhan dan pertemuan rutin lainnya dijelaskan, di mana musyawarah padukuhan dilaksanakan setiap 35 hari dan merupakan tahapan penting dalam proses pengambilan keputusan di tingkat padukuhan. Kegiatan musyawarah padukuhan merupakan forum penting dalam konteks tata kelola pemerintahan desa serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif. Dengan adanya keberlangsungan musyawarah padukuhan setiap tahun, diharapkan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam merumuskan kebijakan dan program yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Pembiayaan untuk pelaksanaan musyawarah padukuhan menjadi tanggung jawab dari pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Selain itu, perbedaan antara musyawarah padukuhan dan pertemuan rutin lainnya juga dijelaskan, di mana pertemuan lapanan (kesetujuan) atau pertemuan rutin di tingkat RT, PKK, dan sebagainya

dilaksanakan lebih sering, yaitu setiap 35 hari. Meskipun begitu, musyawarah padukuhan memiliki karakteristik yang berbeda, di mana keputusan penting dan strategis lebih cenderung diambil dalam musyawarah padukuhan, yang melibatkan berbagai unsur seperti Dukuh, RT, kader, LPMK, pemuda, dan tokoh masyarakat padukuhan. Tahapan persiapan dan pelaksanaan musyawarah padukuhan sangat penting dalam memastikan kelancaran dan hasil yang optimal dari kegiatan tersebut. Sosialisasi tahapan-tahapan musyawarah sebelum pelaksanaannya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh lembaga desa atau kalurahan yang terlibat agar bisa mempersiapkan diri dengan baik. Harapannya, dengan adanya sosialisasi ini, setiap lembaga dapat membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya atau mengatasi hal-hal yang mendesak. Secara keseluruhan, pernyataan tersebut menyoroti pentingnya musyawarah padukuhan sebagai wadah untuk pengambilan keputusan strategis di tingkat padukuhan, peran penting tahapan sosialisasi dan persiapan dalam pelaksanaan musyawarah, serta bagaimana setiap lembaga dalam desa atau kalurahan dapat terlibat dan membahas isu-isu yang relevan demi terciptanya keputusan yang terencana dan terukur.

Berkaitan dengan musyawarah atau pertemuan antara Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat, Bu Eka Wahyuni selaku masyarakat di Kalurahan Guwosari mengatakan bahwa :

“Pertemuan antara pemerintah desa/kalurahan dengan masyarakat dilakukan melalui perwalikan, warga akan diundang untuk menghadiri rapat tapi hanya perwakilan saja. Tiap padukuhan pasti ada perwakilannya kemudian nanti datang ke kalurahan. Kalau dari kalurahan datang ke dusun dusun itu jika ada sosialisasi, misalnya sosialisasi pemilu. Biasanya yang akan datang untuk menjadi perwakilan itu pak dukuh, pak RT RW, atau pelaku UMKM”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang pelaksanaan pertemuan antara Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat melalui perwalikan, di mana warga diundang untuk menghadiri rapat namun hanya perwakilan yang diwakilkan. Dalam konteks ini, setiap padukuhan pasti memiliki perwakilannya yang diutus untuk hadir dalam rapat di tingkat kalurahan. Ketika ada kegiatan atau sosialisasi dari pemerintah desa atau kalurahan, perwakilan dari setiap padukuhan akan diundang untuk hadir. Pelaksanaan rapat melalui perwalikan merupakan mekanisme yang umum digunakan dalam proses komunikasi antara Pemerintah Kalurahan atau kalurahan dengan masyarakat. Dengan menerapkan sistem perwakilan, diharapkan pesan-pesan atau informasi yang disampaikan dalam rapat dapat tersebar dengan efisien dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Perwakilan yang diutus biasanya berasal dari tokoh masyarakat setempat, seperti pak dukuh, pak RT/RW, atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehadiran perwakilan dari setiap padukuhan dalam rapat di tingkat kalurahan atau dalam kegiatan sosialisasi seperti pemilu menunjukkan partisipasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau penerimaan informasi penting. Melalui perwakilan tersebut, setiap padukuhan dapat memiliki suara dan mengungkapkan pendapat atau kebutuhan yang menjadi perwakilannya. Hal ini juga membantu dalam mempercepat penyebaran informasi dan memastikan bahwa setiap padukuhan terlibat dalam proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Peran pak dukuh, pak RT/RW, atau pelaku UMKM sebagai perwakilan dalam pertemuan atau kegiatan sosialisasi menunjukkan pentingnya kerjasama antara Pemerintah Kalurahan dengan elemen masyarakat yang terlibat secara langsung dalam kehidupan sosial dan

ekonomi di tingkat padukuhan. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari perwakilan masyarakat, diharapkan setiap informasi atau kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh seluruh komunitas di tingkat padukuhan.

Berkaitan dengan hal yang dapat membangun hubungan yang egaliter dengan masyarakat, Pak Yoga selaku Dukuh di Kalurahan Guwosari mengatakan bahwa :

“Membagi tugas sesuai bidang dan memastikan informasi terdistribusi dengan baik”. (Wawancara pada tanggal 03 Februari 2025).

Berdasarkan pernyataan diatas, mengenai pembagian tugas sesuai bidang dan memastikan informasi terdistribusi dengan baik mencerminkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip yang dapat membangun hubungan yang egaliter dengan masyarakat. Dalam konteks ini, pembagian tugas sesuai bidang menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa setiap individu atau lembaga memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. Dengan adanya pembagian tugas yang terstruktur dan sesuai bidang, setiap orang atau lembaga dapat fokus pada area kerjanya sehingga efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dapat tercapai. Hal ini juga membantu dalam memastikan bahwa pembagian tanggung jawab dilakukan secara adil dan sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang dimiliki, sehingga setiap kontribusi dapat memberikan nilai tambah yang positif dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Selain itu, memastikan informasi terdistribusi dengan baik merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang relevan dan penting terkait kebijakan, program, atau kegiatan

yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan. Informasi yang terdistribusi dengan baik juga membantu dalam membangun kepercayaan dan rasa saling pengertian antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, prinsip-prinsip pembagian tugas sesuai bidang dan memastikan distribusi informasi yang baik, merupakan langkah-langkah yang dapat mendukung terciptanya hubungan yang egaliter antara Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat. Dengan merespons kebutuhan masyarakat melalui pembagian tugas yang efisien dan penyampaian informasi yang transparan, diharapkan dapat tercipta kedekatan, keterbukaan, dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya bersama untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemudian pernyataan dari Ibu Gumiyah selaku kader puskesmas di Kalurahan Guwosari mengatakan bahwa cara Pemerintah Kalurahan merespon usulan yang disampaikan oleh masyarakat dijelaskan dalam kutipan dibawah ini :

“Biasanya, usulan masyarakat itu ketika musdus. Misalkan ada usulan yang cukup banyak, usulan tersebut akan tetap ditampung, ditulis oleh pihak kalurahan. Kemudian akan diprioritaskan yang paling dibutuhkan di dusun tersebut. Jika ada dana yang mencukupi maka dapat langsung diselenggarakan, jika tidak maka dari kalurahan nantinya akan menentukan di tempatkan dipendanaan apa”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang proses penampungan dan prioritasasi usulan dari masyarakat yang disampaikan pada saat Musyawarah Dusun (MUSDUS). Ketika terdapat banyak usulan dari masyarakat, pihak kalurahan bertanggung jawab untuk mencatat usulan-usulan tersebut. Setelah itu, usulan-usulan yang tercatat akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi di dusun tersebut. Jika terdapat dana yang mencukupi, maka kegiatan atau program yang diusulkan dapat langsung diselenggarakan.

Namun, jika terdapat kekurangan dana, maka pihak kalurahan akan menentukan opsi pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Proses penampungan dan prioritas usulan dari masyarakat yang disampaikan pada Musdus merupakan bagian dari mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam menyampaikan usulan-usulan yang dianggap penting, Pemerintah Kalurahan dapat memahami lebih mendalam kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta dapat merespons secara tepat sesuai dengan prioritas dan kapasitas anggaran yang tersedia. Prioritisasi usulan-usulan akan membantu pihak kalurahan dalam mengidentifikasi kegiatan atau program mana yang paling mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan, diharapkan prioritas yang ditetapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi sebanyak mungkin warga dusun yang membutuhkan. Selain itu, pengalokasian dana secara bijaksana dan transparan juga menjadi kunci dalam menjamin keberlanjutan dan efektivitas dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Ketika terjadi keterbatasan dana untuk melaksanakan seluruh usulan yang masuk, maka langkah yang diambil pihak kalurahan untuk menentukan opsi pendanaan yang tepat akan membantu dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. Melalui proses evaluasi dan perencanaan yang matang, pihak kalurahan dapat menetapkan prioritas dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala kepentingan dan kebutuhan yang ada di tingkat dusun. Dengan cara ini, diharapkan setiap usulan masyarakat dapat diakomodasi sebaik mungkin, sekaligus

menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selanjutnya, karang taruna juga berperan dalam membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah dilingkup masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu selaku anggota karang taruna, yakni :

“Peran pemuda juga dilibatkan. Semisal kalau dari pemerintah desa guwosari itu biasanya ada semacam musdus. Nah, biasanya lewat musyawarah dusun terus disana pemuda juga dapat undangan, kan itu ada pengurus dusun juga, ada dukuh, ada rt, nah pemuda juga dapat undangan untuk menghadiri rapat tersebut. Teknisnya, disitu disalamnya biasanya dari pemerintah kalurahan ada semacam formulir untuk jaring aspirasi. Nah, pemuda bisa mengisi apa yang akan diusulkan. Misalnya, kegiatan pemuda butuh ini. Biasanya dalam musdus ini perwakilan dari pemuda yang akan hadir itu ketua dan beberapa anggota lainnya. Pernyataan ini diperkuat oleh Diki, Nanang, dan Febri selaku anggota karang taruna”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang peran penting pemuda dalam partisipasi dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan di tingkat kalurahan, khususnya dalam konteks ketika terdapat kegiatan seperti Musyawarah Dusun (MUSDUS). Dalam proses MUSDUS yang biasanya diinisiasi oleh Pemerintah Kalurahan Guwosari, pemuda juga turut dilibatkan dengan undangan untuk menghadiri rapat tersebut. Pemuda diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam musyawarah dusun dan memberikan aspirasi atau usulan melalui formulir jaring aspirasi yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan. Peran pemuda dalam MUSDUS tidak hanya sebagai peserta yang hadir, tetapi juga sebagai aktor yang aktif dalam membuat usulan atau aspirasi yang dianggap penting atau dibutuhkan oleh kalangan pemuda. Melalui formulir jaring aspirasi, pemuda dapat mengisikan apa yang mereka usulkan, seperti kegiatan atau program yang dibutuhkan oleh pemuda di lingkungan tersebut. Dengan demikian, pemuda memiliki wadah untuk menyampaikan

ide, usulan, dan kebutuhan mereka kepada Pemerintah Kalurahan melalui jalur partisipatif ini. Kehadiran perwakilan pemuda, yang biasanya diwakili oleh ketua pemuda dan beberapa anggota lainnya, di dalam Musdus menunjukkan perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan terhadap pemuda sebagai bagian penting dari masyarakat. Dengan memfasilitasi partisipasi dan suara pemuda dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan kepentingan dan aspirasi pemuda dapat terdengar dan dipertimbangkan secara serius dalam perumusan kebijakan atau program yang melibatkan pemuda sebagai salah satu kelompok yang dilayani.

Kemudian, pernyataan dari Pak Umar Wanto selaku Ulu-Ulu di Kalurahan Guwosari mengatakan bahwa cara untuk Pemerintah Kalurahan menangani kelompok masyarakat yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan dijelaskan dalam kutipan dibawah ini :

“Mekanismenya tadi karena kita sudah punya forum dimasing masing padukuhan bisa dilaksanakan melalui itu juga, kita memberikan ruang kepada masyarakat melalaui mekanisme pertemuan rutin dikewilayahan dan ketika ada yang keberatan pun kita siap untuk didatangi atau diundang, jadi kalau pamong itu sifatnya melayani, apa yang kurang dan apa yang sudah baik. Kita selalu siap melaksanakan apa yang menjadi masukan dari masyarakat, kita mau ngga mau harus siap. Aduan masyarakat tetap kita terima jika memang menjadi satu hal yang lebih baik itu kita akan mengubah kebijakan dan mekanismenya yang sudah ada”. (Wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat padukuhan melalui forum komunikasi yang sudah ada di setiap padukuhan. Dalam mekanisme tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan masukan atau aspirasi melalui pertemuan rutin di kewilayahan atau melalui undangan kepada pihak terkait jika ada ketidakpuasan atau keberatan. Peranan pamong, sebagai perwakilan atau pemimpin di tingkat padukuhan, adalah untuk melayani

masyarakat dengan baik, mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki, serta menerima masukan dan aduan dari masyarakat secara terbuka. Dalam pelayanan publik dan pembangunan lokal, pemahaman atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan mekanisme yang sesuai dengan kepentingan bersama. Dengan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat melalui mekanisme forum yang sudah ada, Pemerintah Kalurahan berupaya menjaga komunikasi yang terbuka dan inklusif serta memastikan bahwa suara masyarakat didengarkan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Pentingnya sikap pelayanan dari pihak pamong tercermin dalam kesiapan untuk menerima masukan, saran, atau aduan dari masyarakat. Dengan sikap yang responsif dan tanggap terhadap masukan dari masyarakat, Pemerintah Kalurahan memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kebijakan yang ada berdasarkan kebutuhan riil dan harapan masyarakat. Apabila masukan atau aduan dari masyarakat dianggap dapat memberikan hasil yang lebih baik, maka Pemerintah Kalurahan pun bersedia untuk melakukan perubahan pada kebijakan dan mekanisme yang sudah ada untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sikap terbuka, responsif, dan inklusif terhadap masukan masyarakat seperti yang dijelaskan dalam pernyataan tersebut merupakan landasan penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat di tingkat padukuhan. Dengan terus melibatkan masyarakat, menerima masukan, dan merespons aspirasi dengan tindakan yang nyata, diharapkan tercipta kerjasama yang baik dan berkelanjutan dalam proses pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai mitra penting dalam meraih kemajuan bersama.

Berkaitan dengan memberikan kritik atau masukan terhadap kebijakan Pemerintah Kalurahan Pak Umar Wanto selaku Ulu-Ulu di Kalurahan Guwosari mengatakan bahwa :

“Semua masyarakat boleh memberikan kritik maupun masukan, kita ada hotline nya istilahnya ada di sosmednya juga bisa, lapor mas lurah juga ada, jadi kita sering mendapat aduan, aduan itu tidak hanya masalah yang ada dimasyarakat atau isu isu masyarakat, tetapi juga dari pamong kalurahan atau staff kalurahan yang kurang baik nanti juga dapat dilaporkan, baik itu bisa langsung ke pak lurah bisa langsung ke bamuskal ataupun langsung ke forum. Dan juga ada kotak saran yang disediakan di depan kantor kalurahan. Kita menggunakan banyak jalur, jika menyampaikan secara langsung kurang enak atau kurang nyaman bisa dengan melalui lapor pak lurah”. (Wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Pernyataan tersebut menguraikan mekanisme yang telah dirancang oleh pemerintah desa atau kalurahan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik, saran, maupun aduan terkait pelayanan publik, persoalan sosial, atau kinerja aparatur desa. Pemerintah menyediakan berbagai sarana komunikasi seperti hotline, media sosial, pelaporan langsung kepada lurah, Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal), forum diskusi, hingga kotak saran yang ditempatkan di depan kantor kalurahan guna mempermudah masyarakat menyampaikan pendapat mereka. Melalui jalur-jalur ini, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kalurahan, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan dan program publik. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengemukakan keluhan atau kritik, baik mengenai kondisi lingkungan sekitar maupun terhadap kinerja pamong atau staf kalurahan yang dinilai belum optimal. Dengan tersedianya saluran komunikasi yang mudah diakses, suara masyarakat dapat tersampaikan secara terbuka dan konstruktif. Selain sebagai alat penyampaian pendapat,

mekanisme ini juga mendukung keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Kehadiran berbagai saluran komunikasi ini turut memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap jalannya Pemerintah Kalurahan serta membangun relasi yang lebih inklusif dan partisipatif antara Pemerintah Kalurahan dan warganya.

Mengenai kritik atau masukan kepada pemerintah, hal ini juga dikonfirmasi oleh Pak Tanto dan Ibu Rusmiati selaku masyarakat di Kalurahan Guwosari yang menyatakan bahwa :

“Pihak kalurahan ada link atau website untuk menyampaikan keluhan dari masyarakat. Kita sebagai masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan melalui pak RT atau pak dukuh, kemudian akan disampaikan ke kalurahan”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang ketersediaan suatu link atau website yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau aduan. Masyarakat diberikan akses untuk menyampaikan keluhan melalui platform online yang disediakan oleh pihak kalurahan, sehingga memudahkan proses komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Menggunakan link atau website untuk menyampaikan keluhan merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pelayanan publik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, atau aduan secara cepat, mudah, dan transparan. Dengan adanya sarana online ini, masyarakat memiliki akses yang lebih luas dan fleksibel untuk berkomunikasi dengan pihak kalurahan tanpa harus secara langsung datang ke kantor atau melalui perantara seperti pak RT atau pak dukuh. Selain itu, jika masyarakat memilih untuk menyampaikan keluhan melalui pak RT atau pak dukuh, maka peran mereka sebagai perantara akan mempermudah proses pengiriman keluhan atau aduan ke pihak kalurahan terkait. Pak RT atau

pak dukuh sebagai representasi dari masyarakat di tingkat dusun atau padukuhan dapat membantu dalam menyampaikan informasi dengan akurat dan lazimkan kepada pihak yang berwenang di kalurahan untuk ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan cara ini, mekanisme penyampaian keluhan dan aduan dari masyarakat kepada Pemerintah Kalurahan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan terkelola dengan baik. Dukungan berbagai jalur komunikasi seperti link atau website, pak RT, atau pak dukuh memastikan bahwa setiap masukan, keluhan, atau aduan dari masyarakat dapat diproses dan ditindaklanjuti dengan responsif dan transparan oleh pihak berwenang. Dengan demikian, penyediaan cara-cara yang beragam untuk menyampaikan keluhan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah kalurahan dan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, Bu Eka Wahyuni selaku masyarakat di Kalurahan Guwosari juga mengatakan bahwa :

“Menyampaikan pendapat atau usulan untuk kalurahan bisa berbagai cara. Kalau dipanggil untuk menghadiri pertemuan, usulan yang diberikan dapat berupa usulan tertulis, karena kadang orang kalau mau memberikan usulan itu takut. Kalau rapat bapak-bapak biasanya menyampaikan usulan secara langsung, tapi kalau ibu ibu biasanya tertulis. Yang berani mengungkapkan ya mengungkapkan secara langsung., kalau yang engga berani bisa lewat surat tertulis itu tadi lebih enak”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang beragam cara yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau usulan kepada Pemerintah Kalurahan. Masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan usulan secara tertulis atau lisan, tergantung preferensi dan kenyamanan masing-masing individu. Ketika dipanggil untuk menghadiri pertemuan,

usulan yang diberikan dapat berupa usulan tertulis, karena beberapa orang mungkin merasa lebih nyaman atau percaya diri dalam menyampaikan usulan secara tertulis. Pada umumnya, ketika rapat dihadiri oleh bapak-bapak, mereka cenderung menyampaikan usulan secara langsung. Di sisi lain, para ibu biasanya lebih memilih untuk menyampaikan usulan mereka secara tertulis, mungkin karena alasan kenyamanan atau keberanian yang berbeda antara kelompok-kelompok tersebut. Meski demikian, ada juga yang berani untuk mengungkapkan usulan secara langsung, tidak tergantung pada jenis kelamin atau preferensi yang berbeda. Ketersediaan opsi untuk menyampaikan usulan baik secara lisan maupun tertulis memberikan fleksibilitas kepada masyarakat dalam memberikan kontribusi dan masukan kepada Pemerintah Kalurahan. Menggunakan surat tertulis sebagai sarana untuk menyampaikan usulan juga memberikan keuntungan dalam hal lebih terorganisir dan rinci, serta memungkinkan masyarakat yang mungkin merasa kurang nyaman untuk berbicara di depan umum untuk tetap dapat berpartisipasi secara efektif. Melalui pendekatan yang inklusif seperti inilah, Pemerintah Kalurahan dapat memastikan bahwa setiap suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Membuka berbagai cara untuk menyampaikan usulan juga mencerminkan prinsip partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan lokal. Dengan demikian, beragam metode ini memungkinkan seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kemudian pernyataan oleh Pak Yoga selaku Dukuh di Kalurahan Guwosari mengungkapkan cara untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat yang dijelaskan dalam kutipan dibawah ini :

“Menjaring informasi melalui forum non formal, contoh: saat gotong royong, ronda, senam dll”. (Wawancara pada tanggal 03 Februari 2025).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan diatas mengenai cara-cara untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat melalui forum non formal. Penggunaan forum-forum non formal seperti saat gotong royong, ronda, senam, dan sejenisnya sebagai sarana untuk menjaring informasi, aspirasi, serta masukan dari masyarakat. Penggunaan forum-forum non formal sebagai wadah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat menyiratkan keberpihakan pada pendekatan partisipatif dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Sebagai contoh, saat gotong royong, kegiatan tersebut selain sebagai upaya bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan juga dapat dimanfaatkan sebagai momen untuk berinteraksi dengan masyarakat, mendengarkan keluhan, saran, atau aspirasi yang mereka miliki. Selain gotong royong, kegiatan ronda atau patroli malam turut menjadi forum non formal yang strategis untuk mendengarkan suara masyarakat terkait dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut. Selama kegiatan ronda, para petugas dan warga dapat saling berinteraksi, berdiskusi, dan menuangkan masukan atau keluhan terkait keamanan di lingkungan mereka. Sementara itu, kegiatan senam atau olahraga bersama juga dapat menjadi momen yang tepat untuk mengumpulkan informasi dan masukan dari masyarakat. Dalam suasana yang santai dan penuh kerjasama, masyarakat lebih cenderung terbuka dalam menyampaikan berbagai hal yang mereka

rasakan dan butuhkan di lingkungan mereka. Dengan memanfaatkan forum non formal seperti gotong royong, ronda, senam, dan kegiatan lainnya, pemerintah desa dapat menciptakan suasana yang inklusif dan ramah bagi masyarakat, sehingga memungkinkan peningkatan partisipasi, keterlibatan, serta komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat secara lebih langsung dan dekat. Dengan demikian, mekanisme ini mendukung terciptanya kerjasama yang kuat dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan lokal yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, pernyataan dari Ibu Gumiyah selaku kader puskesmas di Kalurahan Guwosari mengatakan bahwa pihak Pemerintah Kalurahan yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat adalah dukuh, lebih lanjutnya dinyatakan pada kutipan dibawah ini :

“Pak dukuh, selain pak dukuh, dari pak lurah sendiri. Misalkan ada informasi mengenai sesuatu hal maka pak lurah akan langsung memberikan informasi kepada masyarakat, kemudian masyarakat akan ke kalurahan. Banyak interaksi yang dilakukan bersama sama, bisa juga melalui pak dukuh”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang peran penting yang dimainkan oleh tokoh adat seperti pak dukuh dan pak lurah dalam menyampaikan informasi dan memfasilitasi interaksi antara masyarakat dengan Pemerintah Kalurahan. Kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia, tokoh seperti pak dukuh dan pak lurah memegang peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat desa. Pak dukuh merupakan pemimpin dari suatu dukuh atau wilayah kecil dalam sebuah desa. Beliau biasanya dipercaya oleh masyarakat setempat dan memiliki kedudukan yang dihormati dalam sistem adat setempat. Sementara itu, pak lurah adalah

pemimpin dari kalurahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pemerintah Kalurahan. Kedua tokoh ini bekerja sama untuk memberikan informasi dan bantuan kepada masyarakat desa. Ketika terdapat informasi mengenai suatu hal penting, baik itu kebijakan pemerintah, program pembangunan, maupun masalah sosial di desa, pak lurah akan langsung memberikan informasi tersebut kepada masyarakat melalui pak dukuh. Pak dukuh kemudian akan menyampaikan informasi tersebut kepada warganya dan memfasilitasi berbagai kegiatan atau pertemuan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan atau menjalankan program-program desa. Interaksi antara masyarakat desa, pak dukuh, dan pak lurah sangatlah penting dalam membangun komunitas yang solid dan saling mendukung. Melalui keterlibatan tokoh masyarakat desa dapat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara warga desa. Melalui kerja sama yang erat antara pak dukuh dan pak lurah, berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dapat diatasi dengan lebih efektif. Masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan pelayanan publik, sehingga dapat turut serta dalam pembangunan desa secara aktif. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dengan adanya dukuh dan lurah, keberlangsungan dan kemajuan desa dapat terus terjaga. Masyarakat desa merasa didengarkan dan diperhatikan oleh pemerintah desa melalui peran aktif tokoh adat tersebut. Ini menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat, serta memperkuat solidaritas dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat

pedesaan yang heterogen. Dengan demikian, peran pak dukuh dan pak lurah dalam menyampaikan informasi dan memfasilitasi interaksi antara masyarakat desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam membangun desa yang maju, berdaya, dan berbudaya. Melalui kerja sama yang sinergis antara tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat desa.

Selanjutnya, Pemerintah Kalurahan ikut terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat yang diselenggarakan oleh karang taruna. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu selaku anggota karang taruna, yakni :

“Ada keterlibatan pemerintah dalam kegiatan pemuda. Kalau pemuda biasanya ada program apa, misalnya kemarin ada program pentas seni ketoprak akhir tahun, pasti butuh dana yang banyak. Nah, salah satunya yang kita ajukan proposal itu ke pemerintah kalurahan guwosari dan itu langsung cair. Pernyataan ini diperkuat oleh Diki, Nanang, dan Febri selaku anggota karang taruna”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang keterlibatan Pemerintah Kalurahan dalam mendukung kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemuda di suatu wilayah. Pemerintah Kalurahan memiliki peran penting dalam memberikan dukungan baik secara finansial maupun non-finansial untuk memfasilitasi kegiatan dan inisiatif yang dilakukan oleh pemuda dalam memajukan desa dan memperkuat komunitas lokal. Pemuda seringkali menjadi salah satu kelompok yang aktif dalam menginisiasi dan mengorganisir berbagai kegiatan sosial, budaya, atau olahraga di lingkungan mereka. Contoh konkrit dari pernyataan di atas adalah adanya program pentas seni ketoprak akhir tahun yang diadakan oleh pemuda. Program seperti ini memerlukan dana yang cukup besar untuk penyelenggaraannya, termasuk untuk biaya kostum,

properti, tempat acara, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pemuda mengajukan proposal ke Pemerintah Kalurahan Guwosari untuk meminta dukungan dana dalam penyelenggaraan program pentas seni ketoprak tersebut. Proposal tersebut berhasil disetujui oleh pemerintah desa, dan dana yang diminta pun langsung dicairkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan memberikan perhatian dan dukungan yang besar terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemuda sebagai upaya untuk mengembangkan potensi lokal dan memperkuat jaringan komunitas di desa. Dukungan finansial dari Pemerintah Kalurahan tidak hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan dana dalam penyelenggaraan program-program pemuda, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi positif pemuda dalam membangun desa. Melalui dukungan ini, diharapkan pemuda semakin termotivasi untuk aktif berperan serta dalam pembangunan desa dan memperkaya kehidupan sosial dan budaya di lingkungan mereka. Selain dukungan finansial, keterlibatan Pemerintah Kalurahan juga dapat berupa bantuan teknis, fasilitas, atau pembinaan bagi pemuda agar dapat berkembang secara holistik. Misalnya, Pemerintah Kalurahan dapat memberikan pelatihan keterampilan, workshop, atau mentoring kepada pemuda untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam berbagai bidang. Kerjasama antara pemuda dan pemerintah desa dalam pelaksanaan berbagai kegiatan juga menciptakan sinergi yang positif dalam upaya pengembangan potensi lokal dan memperkuat hubungan antarwarga. Pemuda merupakan agen perubahan yang memiliki energi, ide-ide segar, dan semangat dalam memajukan desa. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah desa, potensi pemuda dapat

lebih optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan desa secara keseluruhan.

Berkaitan dengan pendekatan dalam membangun hubungan dengan masyarakat Pak Umar Wanto selaku Ulu-Ulu di Kalurahan Guwosari mengatakan bahwa :

“Metode pendekatan itu memang kita menggunakan banyak metode, artinya kita melayani dari generasi ke generasi, kalau generasi gen z ya mereka cukup dari rumah saja, memberikan kritik saran atau masukan kalau generasi yang sebelumnya dapat melalui mekanisme pertemuan pertemuan rutin di tingkat kewilayahan, baik rt maupun padukuhan. Kemudian metode yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan kita juga melakukan metode penilaian oleh masyarakat namanya program review, jadi setahun sekali kita mengadakan program review, program review adalah program yang sudah dilaksanakan di Jepang, kita adopsi. Artinya bahwa beberapa program yang dianggap perlu di review itu kita laksanakan reviewnya. Caranya kita melakukan acak mengundang masyarakat menilai, biasanya kita mengundang 60 orang untuk menjadi perwakilan. Kemudian kita juga mengundang praktisi dari perguruan tinggi, dinas terkait, dll, kita juga mengundang aktifis untuk menjadi tim fasilitator. Selanjutnya kegiatan yang dipandang yang akan direview itu kita presentasikan didepan mereka. Kemudian mereka melakukan penilaian yang sudah ada list nya. Biasanya dilanjutkan dengan catatan dihentikan atau ditambah biayanya atau dikurangi jika terlalu boros. Kemudian nanti hasilnya itu akan menjadi rekomendasi kami dalam proses pelaksanaan tahun berikutnya”. (Wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang berbagai metode pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Kalurahan dalam melayani masyarakat, terutama dalam konteks melibatkan berbagai generasi, mulai dari generasi Gen Z hingga generasi sebelumnya. Pendekatan yang dilakukan mencakup cara pelayanan yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan berbeda dari setiap generasi, untuk memastikan partisipasi dan kontribusi yang maksimal dari seluruh lapisan masyarakat desa. Salah satu metode pendekatan yang dijelaskan adalah pelayanan kepada generasi Gen Z, yang cenderung lebih nyaman berinteraksi dan memberikan masukan dari rumah atau melalui

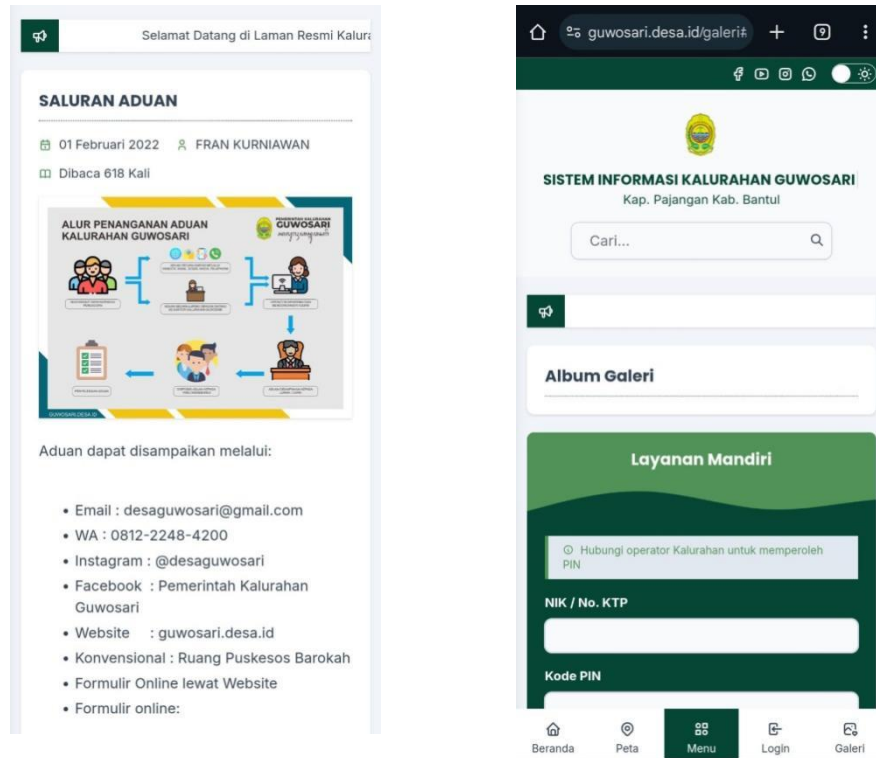
platform daring. Generasi ini memiliki kecenderungan untuk memberikan kritik, saran, atau masukan melalui media sosial atau aplikasi komunikasi digital, sehingga Pemerintah Kalurahan perlu memperhatikan kanal komunikasi yang sesuai untuk dapat berinteraksi dengan mereka secara efektif. Di sisi lain, untuk generasi sebelumnya, pemerintah kalurahan menggunakan metode pertemuan rutin di tingkat kewilayahan, seperti pertemuan di tingkat RT maupun dukuh. Pertemuan ini menjadi ajang untuk mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan masukan dari masyarakat secara langsung, serta untuk menyampaikan informasi terkait program-program Pemerintah Kalurahan. Melalui mekanisme ini, peran serta masyarakat dalam pembangunan desa dapat lebih terjaga dan transparan. Selain metode pertemuan rutin, pemerintah kalurahan juga menerapkan metode penilaian program yang dikenal sebagai program review. Program review dilakukan setahun sekali dan merupakan adaptasi dari program serupa yang telah dilakukan di Jepang. Pada program review, Pemerintah Kalurahan melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas, praktisi dari perguruan tinggi, serta pihak terkait lainnya. Proses program review dimulai dengan undangan kepada masyarakat untuk menjadi perwakilan dalam acara tersebut. Secara acak, sekitar 60 orang diundang untuk menilai dan memberikan masukan terhadap program-program yang akan direview. Selain itu, praktisi dari perguruan tinggi, dinas terkait, dan aktivis juga diundang untuk menjadi tim fasilitator dalam acara tersebut, sehingga perspektif yang beragam dapat masuk dalam proses evaluasi. Selama acara program review, Pemerintah Kalurahan mempresentasikan program-program yang akan dinilai kepada peserta yang

hadir. Peserta kemudian memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah disiapkan sebelumnya. Hasil penilaian tersebut akan dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi terkait perbaikan, penambahan biaya, atau pengurangan anggaran untuk program-program yang telah dievaluasi. Rekomendasi dari hasil program review akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun rencana pelaksanaan program di tahun berikutnya. Dengan adanya metode penilaian yang partisipatif dan transparan seperti program review, diharapkan kualitas program-program Pemerintah Kalurahan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dan perencanaan program menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai hasil wawancara yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa terciptanya hubungan yang adil, seimbang, dan demokratis antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat merupakan faktor kunci dalam mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan desa. Melalui komunikasi yang transparan, keterlibatan dalam forum musyawarah, pemberdayaan masyarakat, serta peran aktif dalam proses pengambilan keputusan, kedua pihak dapat menjalin kerja sama yang solid guna mewujudkan tujuan bersama dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan pendekatan yang partisipatif dan inklusif, Pemerintah Kalurahan Guwosari mampu menjamin bahwa aspirasi serta kebutuhan warga menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan. Oleh karena itu, kolaborasi yang terus-menerus antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam kerangka

hubungan yang setara menjadi fondasi penting untuk menciptakan pembangunan desa yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Gambar 3.3 Saluran Aduan Masyarakat di Kalurahan Guwosari



(Sumber : Sid Kalurahan Guwosari 2024)

Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Guwosari telah membangun mekanisme saluran pengaduan yang terorganisir guna menampung aspirasi serta keluhan dari masyarakat. Proses penanganan aduan dimulai dari masyarakat yang menyampaikan aduan melalui berbagai media, seperti website, email, WhatsApp, media sosial, atau datang langsung ke kantor kalurahan. Aduan yang diterima akan diproses oleh operator, kemudian diteruskan kepada lurah atau carik untuk mendapatkan disposisi. Selanjutnya, aduan didisposisikan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti, dan hasilnya akan dievaluasi. Hal ini mencerminkan adanya komunikasi dua arah antara

Pemerintah Kalurahan dan masyarakat, serta menunjukkan komitmen pemerintah Kalurahan Guwosari dalam membangun hubungan yang inklusif, adil, dan demokratis. Dengan berbagai saluran yang terbuka dan aksesibel, masyarakat diberikan ruang partisipasi aktif dalam pembangunan desa untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Gambar 3.4 Kegiatan Sosialisasi di Kalurahan Guwosari



(Sumber : Sid Kalurahan Guwosari 2024)

Berdasarkan data dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa dalam upaya memfasilitasi relasi egaliter antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat, sosialisasi menjadi salah satu metode yang efektif di Kalurahan Guwosari. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Melalui interaksi yang terbuka dan partisipatif, Pemerintah Kalurahan menyampaikan informasi penting mengenai program-program yang direncanakan dan mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Selain itu, forum ini juga memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan aspirasi mereka secara langsung, yang pada gilirannya memperkuat hubungan antara Pemerintah Kalurahan dan warganya. Hasil dari sosialisasi ini diharapkan dapat menciptakan rasa saling

percaya dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan desa, sehingga tercapai kesejahteraan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Relasi Pemerintah Kalurahan dengan Masyarakat di Kalurahan Guwosari, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat memiliki peranan strategis dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Tiga bentuk relasi yang telah dianalisis secara mendalam yakni relasi hegemoni, relasi konflikual, dan relasi egaliter menunjukkan ragam dinamika dalam pola interaksi yang terjalin antara pemerintah Kalurahan dan masyarakat.

1. Berdasarkan penelitian mengenai relasi hegemoni Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat di Kalurahan Guwosari, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua entitas tersebut didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta mekanisme evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. Pemerintah Kalurahan memiliki peran utama dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan, namun pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, masukan, dan kritik menjadi elemen krusial dalam menciptakan hubungan yang sehat dan inklusif. Melalui berbagai forum seperti musyawarah kalurahan, musyawarah dusun, serta jaring aspirasi masyarakat, Pemerintah Kalurahan berupaya untuk membangun komunikasi yang terbuka dan transparan agar suara dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam proses pembangunan. Proses musyawarah dan evaluasi kebijakan yang

melibatkan berbagai unsur masyarakat merupakan langkah penting untuk mendengar suara masyarakat secara langsung, merumuskan kebijakan yang lebih berorientasi pada kebutuhan riil, serta memastikan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, kolaborasi yang harmonis antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat, ditopang oleh partisipasi dan evaluasi yang berkelanjutan, menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat di Kalurahan Guwosari.

2. Relasi konflikktual antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat di Kalurahan Guwosari dapat dikelola dengan baik melalui pendekatan kolaboratif dan komunikasi yang efektif. Nampak dari berbagai pernyataan yang diperoleh peneliti, konflik yang muncul umumnya bersifat kecil dan dapat diselesaikan dengan cepat berkat peran aktif mediator seperti dukuh, ketua RT, dan kader masyarakat dalam proses penyelesaian. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat menjadi kunci dalam mencegah eskalasi konflik, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam mencari solusi bersama. Dengan demikian, keberhasilan dalam menangani konflik sangat bergantung pada kepemimpinan yang kuat, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat, yang pada akhirnya mendukung terciptanya hubungan harmonis dan stabilitas sosial di Kalurahan Guwosari.
3. Relasi egaliter antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat di Kalurahan Guwosari telah menunjukkan dampak positif dalam

mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan desa. Hal ini terlihat dari tersedianya saluran komunikasi yang transparan, keikutsertaan masyarakat dalam forum musyawarah, serta peran aktif mereka dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kalurahan mampu membangun relasi yang harmonis dan saling mendukung melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh adat dan generasi muda. Pendekatan ini memungkinkan Pemerintah Kalurahan untuk merespons secara efektif aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain meningkatkan mutu pelayanan publik, upaya tersebut juga memperkuat ikatan sosial serta jaringan komunitas, yang pada akhirnya menciptakan kondisi yang mendukung bagi pertumbuhan dan kesejahteraan bersama.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan perlu terus mendorong dan memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui berbagai forum musyawarah dan mekanisme komunikasi terbuka yang sudah ada. Dengan demikian, seluruh aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan menghasilkan kebijakan yang lebih relevan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Penguatan peran mediator seperti dukuh, ketua RT, dan kader masyarakat, sangat penting dilakukan agar penyelesaian konflik yang muncul dapat berjalan efektif dan cepat. Melalui pelatihan dan pendampingan, mediator dapat menjadi ujung tombak dalam menjaga

stabilitas sosial dan menjaga keharmonisan hubungan antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat.

3. Transparansi dalam penyampaian informasi terkait kebijakan dan program pemerintah harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat, memastikan mereka merasa dihargai dan didengar, serta memperkuat komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa.
4. Pemerintah Kalurahan dapat mengembangkan dan memperkuat jaringan komunitas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemuda dan tokoh adat. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya akan meningkatkan solidaritas sosial dan keterlibatan masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan kesejahteraan bersama secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R., & Putra, D. (2023). Peran keterampilan sosial dalam interaksi sosial. *Jurnal Budaya dan Komunikasi Daerah*, 1(3), 125-140.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Artha, I. G. P. (2021). Analisis Pemikiran Antonio Gramsci tentang Hegemoni Menurut Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 6(1), 1-12.
- Bastian, Y., & Aryanto, A. G. A. W. (2023). Membangun komunitas yang egaliter: Analisis sosio-kultural tentang persoalan Onesimus dalam Filemon 1: 8-22. *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)*, 9(3), 730-742.
- Dewey, J. (2011). *Democracy and education*. Simon & Brown.
- Durkheim, É. (1893). *Pembagian kerja dalam masyarakat* (G. Simpson, Penerj.). Free Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1893)
- Fathoni, T. (2024). Konsep Solidaritas Sosial dalam Masyarakat Modern perspektif Émile Durkheim. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 6(2), 129-147.
- Fuad, M. R. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. *Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1(1), 435-440. <https://doi.org/10.59562/semnasdies.v1i1.435>
- Ginting, R., Siregar, H., & Putri, A. (2024). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa: Faktor penentu dan tantangannya. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 45-60.
- Hadi, A. (2021). Interaksi sosial antar kelompok dalam masyarakat beragam. *Jurnal Kebhinekaan*, 10(1), 45-60.
- Halimah, S. (2024). Peran Media dalam Pembentukan Hegemoni Sosial di Era Digital. *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 45-60.
- Hendrawan, A. (2022). Peran Relasi Egaliter dalam Masyarakat Modern: Perspektif Sosial, Politik, dan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(3), 67-80.
- Hendrawan, A. (2023). Penyebab dan Dampak Relasi Konflikual dalam Organisasi. *Jurnal Manajemen*, 15(2), 45-60.
- Hidayati, N. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui program desa. *Jurnal pembangunan sosial*, 15 (2), 78-89.
- Jati, W. R. (2021). Relasi antar umat mayoritas dan minoritas: studi masyarakat tionghoa di surabaya. *Harmoni*, 20(2), 276-292.

- Kamim, M. B. A. (2021). Hegemoni dan Ekonomi Politik Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Politica*, 12(2), 121-141.
- Kusuma, R. (2022). Strategi Penyelesaian Konflik: Pendekatan Praktis dan Teoritis. *Jurnal Psikologi Sosial*, 10(1), 23-35.
- Makhsun, S. (2021). Hegemoni Dan Relasi Kuasa: Studi Kasus Tahlilan Di Dusun Gunung Kekep. *Komunitas*, 12(2), 97-119.
- Mardiana, R. (2022). Kesetaraan dalam Relasi Sosial: Teori dan Praktik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(1), 45-60.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mite, M. E. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pong Ruan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur. Skripsi Universitas Nusa Cendana. Diakses dari http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=16453
- Moedy, E. R. S., Widyantari, N. L. P., Wikrama, A. N. A. W. B., & Kasna, I. K. (2023). Optimalisasi tugas pokok dan fungsi pustakawan dan tenaga administrasi perpustakaan sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik margarana. *Jurnal ilmiah cakrawarti*, 6(2).
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Natalia, A. (2022). Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(1), 15-26.
- Nugroho, F. (2020). "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Kajian Desa*, 4(2), 55-67.
- Nwar, S., & Cahyono, B. (2020). Enhancing Public Service Delivery through Egalitarian Relations: A Case Study of Local Government in Indonesia. *Journal of Public Administration*, 15(2), 87-102.
- Panjaitan, M., & Pandiangan, E. P. (2020). Analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sosial Politik Universitas HKBP Nommensen*, 3(2), 45–55. Diakses dari <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik/article/download/738/670/4690>
- Praditya, A. (2023). Relasi Sosial dalam Masyarakat yang Dinamis. Kompasiana. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/alfonsopradya/63f810fd59008b0bef1b2734/relasi-sosial-dalam-masyarakat-yang-dinamis>.
- Pranoto, R. (2020). Peran relasi sosial dalam kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 8(3), 78-89.

- Prasetyo, B. (2022). Stabilitas sosial dan ekonomi di desa. *Jurnal ekonomi dan kebijakan publik*, 10 (3), 112-125.
- Putri, A. K., Aurella, D. A., Salma, N. A., & Utomo, A. B. (2023). Relasi Pusat-Daerah dalam Paradiplomasi Bermotif Nasionalistik: Studi Perbandingan Kasus Skotlandia dan Papua. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 403-427.
- Putri, L. (2020). Dampak Relasi Konflikual dalam Kehidupan Sosial. *Jurnal Sosiologi*, 8(3), 78-90.
- Putri, S. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa: Peran Pemerintah Desa yang Responsif. *Jurnal Masyarakat dan Kebijakan Pemerintahan*, 8(3), 112-125.
- Rahmad, F. (2021). Definisi dan Karakteristik Relasi Konflikual. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(4), 12-25.
- Rahman, A. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan Desa*, 5(1), 45-60.
- Rahman, F. (2024). Optimalisasi fungsi pemerintah desa. *Jurnal kebijakan publik*, 9 (1), 30-42.
- Rahman, M. (2023). Sosialisasi Ideologi Dominan Melalui Media: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(1), 23-35.
- Rizki, M. (2022). Dampak Relasi Egaliter dalam Masyarakat Modern: Kualitas Hubungan, Inovasi, dan Keadilan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 88-102.
- Rusmini, A. (2023). Peran Masyarakat Sosial dalam Agama Perspektif Max Weber dan Relevansinya Kemajuan Masyarakat. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(2).
- Santoso, A., & Wibowo, T. (2022). Dinamika Hubungan Antar Individu dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(3), 123-140.
- Saputra, A. (2020). "Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah Desa". *Jurnal Partisipasi Publik*, 9(4), 65-78.
- Sari, A. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Wilayah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12 (1), 45-60.
- Sari, D. (2022). Hegemoni Budaya dalam Pendidikan: Analisis Kritis Terhadap Kurikulum Nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(3), 78-90.
- Sinaga, A. G. (2021). Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tanjung Morawa A. Repositori Universitas Medan Area. Diakses dari <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/22925/1/188520052%20-%20Arli%20Gideon%20Sinaga%20-%20Fulltext.pdf>
- Siregar, B. (2022). Kerjasama Pemerintah Desa dan Masyarakat: Strategi Mengatasi Konflik dalam Pembangunan. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 15(1), 30-41.

- Suganda, B. (2021). Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 112-125.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, R. (2021). "Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Relasi Pemerintah Desa". *Jurnal Ilmu Politik*, 18(2), 110-125.
- Utami, R. (2022). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Keuangan. *Jurnal Pemerintahan Lokal*, 7(1), 78-92.
- Utomo, C. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 75-88.
- Wahyuni, N. (2021). Teori Konflik dan Konstruktivisme Sosial dalam Analisis Relasi Konflikual. *Jurnal Teori Sosial*, 7(1), 15-30.
- Wahyuni, R., & Ahmad, F. (2023). Dampak Hegemoni Terhadap Ketidakadilan Sosial di Masyarakat Modern. *Jurnal Sosiologi*, 12(4), 99-112.
- Waspada, I., & Rusmini, A. (2023). PERAN STAKEHOLDER DAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KONFLIK PENGELOLAAN GOA PINDUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 11-20.
- Weber, M. (1922). *Ekonomi dan masyarakat: Kerangka kerja bagi sosiologi pemahaman* (G. Roth & C. Wittich, Ed.). Free Press.
- Welasari, & Ardieansyah. (2020). Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Makeruh Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Wedana: Kajian Pemerintahan Daerah dan Desa*, 6(1), 12–20. Diakses dari <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/download/1673/1033>
- Wibowo, A. (2020). Hubungan Pemerintah Desa dan Masyarakat: Kunci Sukses Pembangunan. *Jurnal Pembangunan Desa*, 5(2), 45-56.
- Wijaya, T. (2023). Relasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(3), 134-149.
- Wulandari, P. (2020). Dinamika Perubahan Sosial di Era Teknologi. *Jurnal Komunikasi Nasional*, 48(4), 321-335.
- Yuliandari, D., Santoso, B., & Prasetyo, H. (2022). Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. *Sovereignty: Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 120-135.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

LAMPIRAN

Interview Guide (Panduan Wawancara)

Nama Informan :

Usia :

Jabatan/Pekerjaan :

Tanggal Wawancara :

Kasi Kesejahteraan (Ulu-Ulu)

1. Apa yang menjadi dasar utama pemerintah desa dalam membangun hubungan dengan masyarakat di kalurahan guwosari ?
2. Apa yang dilakukan pemerintah desa jika masyarakat tidak setuju dengan suatu kebijakan ?
3. Siapa saja yang paling berperan dalam menyampaikan atau memperkuat kebijakan pemerintah desa kepada masyarakat ?
4. Siapa kelompok masyarakat yang paling sering dilibatkan atau dijadikan mitra oleh pemerintah desa ?
5. Siapa pihak yang biasanya memberikan kritik atau masukan terhadap kebijakan pemerintah desa ?
6. Kapan pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau program pembangunan ?
7. Kapan terjadi perbedaan pendapat yang menonjol antara pemerintah desa dan masyarakat ?
8. Dimana biasanya kegiatan atau forum diskusi antara pemerintah desa dengan masyarakat dilaksanakan ?
9. Mengapa pemerintah desa memilih pendekatan tertentu dalam membangun hubungan dengan masyarakat ?
10. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa kebijakan yang dibuat diterima secara luas oleh masyarakat ?

11. Bagaimana pemerintah desa menangani kelompok masyarakat yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan ?

Dukuh

1. Siapa yang Anda anggap sebagai pihak utama dalam relasi antara pemerintah desa dan masyarakat di Kalurahan Guwosari?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat padukuhan?
3. Apa yang Anda lakukan untuk membangun hubungan yang egaliter dengan masyarakat?
4. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menjaga relasi ini?
5. Kapan biasanya Anda melakukan interaksi atau komunikasi dengan masyarakat? Apakah ada waktu tertentu yang lebih efektif?
6. Kapan Anda merasa relasi ini paling kuat atau paling lemah?
7. Di mana sering terjadi interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat? Apakah di kantor desa, lokasi padukuhan, atau tempat lain?
8. Di mana Anda melihat adanya perubahan dalam relasi ini selama masa kepemimpinan Anda?
9. Mengapa Anda merasa penting untuk memiliki relasi yang egaliter dengan masyarakat?
10. Mengapa ada perbedaan dalam relasi antara pemerintah desa dan masyarakat di Kalurahan Guwosari dibandingkan dengan daerah lain?
11. Bagaimana cara Anda mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat?
12. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan relasi egaliter ini dalam konteks pelayanan publik?

Kader PUSKESOS

1. Apakah ada keputusan dari pemerintah desa atau kalurahan yang ditentukan sepihak tanpa melibatkan masyarakat ?
2. Siapa yang paling berperan dalam mengambil keputusan terkait kegiatan sosial dimasyarakat ?
3. Dimana biasanya masyarakat mendapatkan informasi terkait kebijakan desa ?
4. Apa bentuk konflik yang pernah terjadi antara pemerintah desa dan masyarakat ?

5. Siapa yang biasanya berperan menyelesaikan konflik tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut ?
6. Dimana masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau protes terhadap kebijakan desa ?
7. Siapa pihak pemerintah desa yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat ?
8. Bagaimana komunikasi antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat selama ini berlangsung ?

Masyarakat Kalurahan Guwosari

1. Dimana masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait kebijakan desa ?
2. Dimana masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau aspirasi kepada pemerintah desa ?
3. Apa contoh konflik yang pernah terjadi di masyarakat ?
4. Apakah Anda pernah menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan (musyawarah, sosialisasi, dll)?
5. Apakah menurut Anda informasi dari pemerintah kalurahan mudah diakses oleh masyarakat?
6. Apakah Anda merasa pelayanan pemerintah kalurahan sudah ramah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat?
7. Apakah Anda pernah mengajukan keluhan, saran, atau permohonan ke pemerintah kalurahan? Jika ya, bagaimana responsnya?
8. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau perencanaan program di tingkat kalurahan?

Karang Taruna Kalurahan Guwosari

1. Bagaimana peran pemuda dalam membantu pemerintah menyelesaikan masalah dilingkup masyarakat ?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai keterlibatan pemerintah dalam kegiatan di dusun ini, terutama keterlibatan kegiatan yang diselenggarakan oleh karang taruna ?
3. Bagaimana partisipasi pemuda dalam rapat desa atau musyawarah yang melibatkan pengambilan keputusan ?
4. Konflik antara pemuda dengan pemerintah desa ?

Bamuskal Kalurahan Guwosari

1. Bagaimana proses musyawarah desa biasanya dilakukan? Apakah masyarakat benar-benar terlibat dalam pengambilan keputusan?
2. Apakah Anda melihat adanya dominasi suara dari pemerintah desa dalam musyawarah? Bisa dijelaskan contohnya?
3. Menurut Anda, apakah masyarakat merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas?
4. Sejauh mana hasil musyawarah mencerminkan aspirasi masyarakat, bukan hanya kepentingan pemerintah desa?
5. Apakah pernah terjadi ketegangan atau konflik antara pemerintah desa dan masyarakat? Jika ya, apa penyebab utamanya?
6. Bagaimana biasanya konflik tersebut diselesaikan? Apakah ada mediasi dari pihak luar seperti Bamuskal atau tokoh masyarakat?
7. Apakah masyarakat merasa puas dengan cara pemerintah desa merespons kritik atau protes?
8. Menurut Anda, apakah konflik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kepentingan atau ketidakadilan dalam kebijakan desa?
9. Apakah Anda melihat adanya hubungan yang setara antara pemerintah desa dan masyarakat dalam praktik sehari-hari?
10. Dalam hal apa pemerintah desa menunjukkan sikap terbuka dan setara terhadap masyarakat?



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 088/PEM/J/X/2024

H a l : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

K e p a d a :


Dr. Gregorius Sahdan, M.A

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	:	Rifa Husniya
No. Mahasiswa	:	21520121
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	:	10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024
Ketua Program Studi

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A





YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PROGRAM STUDI SARJANA KEMENTERIAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI SARJANA KEMENTERIAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI SARJANA KEMENTERIAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
Alamat : Jl. Timoho No 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 532/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Rifa Husniya
Nomor Mahasiswa : 21520121
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
b. Sasaran : Relasi Pemerintah Desa dengan Masyarakat (Studi di Kalurahan Guwosari Pajangan Bantul)
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 23 Desember 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI BAKESKAL
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI BAKESKAL
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAKESKAL

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website: www.apmd.ac.id, e-mail: info@apmd.ac.id

Nomor : 1020/I/U/2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
Di tempat.

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Rifa Husniya
No Mhs : 21520121
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Relasi Pemerintah Desa dengan Masyarakat (Studi di Kalurahan Guwasari Pajangan Bantul)
Tempat : Kalurahan Guwasari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
Dosen Pembimbing : Dr. Gregorius Sahdan, M.A.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Desember 2024

Yogyakarta, 23 Desember 2019

Ketua

[Signature]

Dr. Sutoro Eko Yunanto

NIY. 170 230 190

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Pak Umar Wanto selaku Ulu-Ulu di Kalurahan Guwosari
Pada tanggal 23 Januari 2025



Wawancara bersama Ibu Eka Wahyuni selaku masyarakat di Kalurahan Guwosari
Pada tanggal 4 Maret 2025



Wawancara bersama Ibu Gumiyah selaku kader puskesmas di Kalurahan Guwosari
Pada tanggal 4 Maret 2025



Wawancara bersama Pak Tanto dan Ibu Rusmiati selaku masyarakat di Kalurahan
Guwosari
Pada tanggal 4 Maret 2025



Wawancara bersama Nanang, Febri, Diki, Ibnu selaku anggota
Karang Taruna di Kalurahan Guwosari
Pada tanggal 4 Maret 2025



Wawancara bersama Pak Sukatno selaku anggota Bamuskal di Kalurahan Guwosari
Pada tanggal 22 Mei 2025